



SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2015/2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kemendikbud, Analisis Sumber Daya Manusia
Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016/Disusun oleh:
Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan
Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. – Jakarta: Pusat Data
dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
xii, 106 hal, bbl, illus, 23 cm

ISBN 979 401 628 4

- | | |
|----------|--------------|
| 1. DATA | 5. SMA |
| 2. SD | 6. SMA |
| 3. SLB | 7. KURIKULUM |
| 4. SMA | |
| I. Judul | |

Tim Penyusun Buku

Pengarah:
Bastari
Siti Sofiah

Penulis:
Ida Kintamani

Penyunting:
Sudarwati

Desain Cover:
Fitri Sumairawati

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016" ini bertujuan untuk melakukan analisis data pendidikan khusus tentang sumber daya manusia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah kepala sekolah dan guru, pendidikan dasar dan menengah yang dimaksud adalah SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK serta 2015/2016 yang dimaksud adalah tahun pelajaran 2015/2016.

Metode yang digunakan ada dua jenis, yaitu studi dokumentasi berdasarkan Statistik Persekolahan dan dari Data Pokok Pendidikan yang diolah kembali. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan item data yang diperlukan dalam melakukan analisis. Item data tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu data kepala sekolah dan data guru yang dirinci menjadi lima jenis, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, menurut status kepegawaian, menurut status PNS, dan menurut usia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil dan bahasan disesuaikan dengan tujuan, yaitu 1) analisis SDM berdasarkan data yang terdiri kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM, 2) analisis SDM berdasarkan indikator pendidikan, dan 3) kinerja SDM berdasarkan lima indikator pendidikan. Sumber data yang digunakan adalah statistik pendidikan yang tersedia di PDSPK, sebagian dapodikdas, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus SMA, SMA, dan SMK.

Hasil analisis berdasarkan data menunjukkan bahwa secara keseluruhan dikdasmen masih terjadi kekurangan guru sebesar 146.987 orang dengan rincian SD kelebihan guru sebesar 90.618, SLB kekurangan guru sebesar 3.596, SMP kelebihan guru sebesar 34.901, SMA kekurangan guru sebesar 160.661 dan SMK kekurangan guru sebesar 108.249. Berdasarkan rasio siswa per guru menurut kebutuhan juga jelas terlihat bahwa SD sebesar 15,18 lebih besar daripada yang ada sebesar 14,42, sehingga terjadi kelebihan guru, demikian juga SMP sebesar 15,53 lebih besar daripada yang ada sebesar 14,73, sehingga terjadi kelebihan guru. Sebaliknya, rasio siswa per guru menurut kebutuhan pada SLB, SMA, dan SMK masing-masing sebesar 3,75, 9,45, dan 11,36 lebih kecil daripada yang ada masing-masing sebesar 4,25, 14,57, dan 15,86, sehingga terjadi kekurangan guru.

Hasil analisis berdasarkan indikator menunjukkan bahwa jumlah kepala sekolah dan guru dikdasmen yang layak mengajar atau memiliki ijazah S1 atau D4 sebesar 84,82% berarti masih ada 15,18% kepala sekolah dan guru yang tidak layak mengajar. Jumlah kepala sekolah dan guru perempuan ternyata lebih besar perempuan sebesar 57,80%, berarti guru laki-laki sebesar 42,20%. Kepala sekolah dan guru tetap menunjukkan jumlah cukup baik, yaitu sebesar 70,33% yang berarti masih terdapat kepala sekolah dan guru yang tidak tetap sebesar 29,67%. Kepala sekolah dan guru yang berstatus PNS sebesar 57,29% yang berarti masih terdapat 42,71% yang bukan PNS. Kepala sekolah dan guru yang pensiun ternyata cukup besar 10,51%.

Kinerja SDM berdasarkan 5 indikator pendidikan menunjukkan bahwa kinerja dikdasmen termasuk kategori kurang dengan nilai 77,69, namun kinerja kepala sekolah dikdasmen termasuk kategori madya sebesar 85,43 dan kinerja guru dikdasmen termasuk kategori kurang sebesar 76,43. Kinerja SDM SD, SLB, SMP, dan SMK termasuk kurang dengan nilai masing-masing 76,37, 74,96, 79,16, dan 76,86, sedangkan SMA termasuk kategori pratama dengan nilai sebesar 81,16.

Simpulannya adalah masih diperlukan tambahan guru sebesar 146.957 orang, mutu SDM dilihat dari kelayakan mengajar sebesar 84,82%, dilihat dari kesetaraan mengajar sebesar 57,80%, dilihat dari status kepegawaian tetap sebesar 70,33%, dilihat dari status PNS sebesar 57,29% dan dilihat dari pensiun sebesar 10,51%. Bila dilihat dari kinerja SDM dikdasmen maka secara keseluruhan termasuk kategori kurang sebesar 77,69, bila dirinci menurut status sekolah maka SD, SLB, SMP, dan SMK termasuk kategori kurang, sedangkan SMA, termasuk kategori pratama.

Berdasarkan simpulan maka diberikan saran agar kekurangan guru hendaknya segera dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu melalui tambahan formasi guru, kelayakan mengajar supaya ditingkatkan mencapai 100% melalui penyetaraan guru, kepala sekolah diberikan kuota sehingga terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi kepala sekolah, kepala sekolah dan guru supaya memiliki status kepegawaian tetap sehingga dapat mengajar dengan lebih baik di satu tempat, dan bila memungkinkan menjadi PNS sehingga dapat mengajar lebih baik dan agar pensiun berkurang maka ketika ada formasi supaya memilih kepala sekolah dan guru yang lebih muda, dan perlu penyetaraan kepala sekolah dan guru agar mencapai 100%.

KATA PENGANTAR

Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2015/2016 ini merupakan hasil kajian tentang data dan informasi pendidikan khususnya mengenai sumber daya manusia (SDM) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Data dan informasi yang dimaksud terdapat pada statistik persekolahan tahun pelajaran 2015/2016 yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Statistik yang dimaksud adalah statistik Sekolah Dasar (SD), statistik Sekolah Luar Biasa (SLB), statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP), statistik Sekolah Menengah Atas (SMA), dan statistik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta dari data pokok pendidikan (dapodik) sebagai bahan pelengkap dan pembanding.

Analisis SDM dilakukan menjadi dua, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan. Berdasarkan data maka diperoleh kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM dikdasmen termasuk rasio siswa per guru. Berdasarkan indikator pendidikan dapat diketahui masalah SDM berdasarkan lima indikator pendidikan, yaitu persentase kepala sekolah dan guru layak, persentase kepala sekolah dan guru perempuan, persentase kepala sekolah dan guru tetap, persentase kepala sekolah dan guru PNS, dan persentase kepala sekolah dan guru pensiun. Dengan menggunakan kelima indikator pendidikan maka dapat dihitung kinerja SDM dikdasmen.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2016
Kepala,

Dr. Bastari
NIP 19660730 1990011001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Manfaat	4
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	6
A. Analisis	6
B. Sumber Daya Manusia	6
C. Pendidikan Dasar dan Menengah	7
D. Kinerja	8
BAB III: METODOLOGI	10
A. Metode	10
B. Sumber Data	10
C. Analisis Sumber Daya Manusia	11
1. Analisis Berdasarkan Data	11
2. Analisis Berdasarkan Indikator Sumber Daya Manusia	20
3. Kinerja Berdasarkan Indikator Sumber Daya Manusia	23
BAB IV: HASIL DAN BAHASAN	25
A. Kebutuhan, Kekurangan/Kelebihan Sumber Daya Manusia	25
1. SD	27
2. SLB	31
3. SMP	33
4. SMA	38
5. SMK	45
6. Dikdasmen	50

	Halaman
B. Indikator Sumber Daya Manusia	52
1. SD	53
2. SLB	57
3. SMP	60
4. SMA	63
5. SMK	66
6. Dikdasmen	69
C. Kinerja Berdasarkan Indikator Sumber Daya Manusia	73
1. SD	74
2. SLB	78
3. SMP	82
4. SMA	86
5. SMK	90
6. Dikdasmen	94
BAB V: PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB III	
Tabel 3.1 : Kurikulum SD 2013, Permendikbud Nomor 67, Tahun 2013	12
Tabel 3.2 : Kurikulum SMA 2013, Permendikbud Nomor 58, Tahun 2014	12
Tabel 3.3 : Kurikulum SMA 2013, Permendikbud Nomor 59, Tahun 2014	13
Tabel 3.4 : Kurikulum SMK 2013, Permendikbud Nomor 60, Tahun 2014	14
Tabel 3.5 : Standar Menentukan Kinerja Sumber Daya Manusia	23
Tabel 3.6 : Jenis Kinerja Sumber Daya Manusia	24
 BAB IV	
Tabel 4.1 : Sekolah, Kelas, Siswa, Kebutuhan, Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru serta Rasio Siswa per Guru menurut Jenjang Pendidikan	25
Tabel 4.2 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Dasar	28
Tabel 4.3 : Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi Sekolah Dasar	29
Tabel 4.4 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	30
Tabel 4.5 : Rasio Siswa per Guru menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	31
Tabel 4.6 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru serta Yang Ada Tiap Provinsi, Sekolah Luar Biasa	32
Tabel 4.7 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru, Rasio Siswa per Guru Tiap Provinsi, Sekolah Luar Biasa	33
Tabel 4.8 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	34
Tabel 4.9 : Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	36
Tabel 4.10 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Pertama	37
Tabel 4.11 : Rasio Siswa per Guru menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Pertama	38
Tabel 4.12 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	39
Tabel 4.13 : Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	41
Tabel 4.14 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Atas	43
Tabel 4.15 : Rasio Siswa per Guru Berdasarkan Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Atas	45
Tabel 4.16 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	46

	Halaman
Tabel 4.17 : Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	47
Tabel 4.18 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Kejuruan	48
Tabel 4.19 : Rasio Siswa per Guru Berdasarkan Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Kejuruan	49
Tabel 4.20 : Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru serta Yang Ada Tiap Provinsi, Dikdasmen	50
Tabel 4.21 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan serta Rasio Siswa per Guru Berdasarkan Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Dikdasmen	51
Tabel 4.22 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan	52
Tabel 4.23 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	54
Tabel 4.23A: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Dasar	55
Tabel 4.23B: Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	56
Tabel 4.24 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Luar Biasa	57
Tabel 4.24A: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	58
Tabel 4.24B: Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	59
Tabel 4.25 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Pertama	60
Tabel 4.25A: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	61
Tabel 4.25B: Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi Indikator, Sekolah Menengah Pertama	62
Tabel 4.26 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Atas	64
Tabel 4.26A: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	65
Tabel 4.26B: Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	66
Tabel 4.27 : Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Sekolah Menengah Kejuruan	67
Tabel 4.27A: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	68
Tabel 4.27B: Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	69

Tabel 4.28 :	Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi, Dikdasmen	70
Tabel 4.28A:	Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi Dikdasmen	71
Tabel 4.28B:	Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi, Dikdasmen	72
Tabel 4.29 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	73
Tabel 4.30 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Dasar	75
Tabel 4.30A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	76
Tabel 4.30B:	Kinerja Guru Tiap Provinsi, Sekolah Dasar	77
Tabel 4.31 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	78
Tabel 4.31A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	79
Tabel 4.31B:	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	80
Tabel 4.32 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	81
Tabel 4.32A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	82
Tabel 4.32B:	Kinerja Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	83
Tabel 4.33 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	84
Tabel 4.33A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	85
Tabel 4.33B:	Kinerja Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	86
Tabel 4.34 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	87
Tabel 4.34A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	88
Tabel 4.34B:	Kinerja Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	89
Tabel 4.35 :	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Dikdasmen	90
Tabel 4.35A:	Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi, Dikdasmen	91
Tabel 4.35B:	Kinerja Guru Tiap Provinsi, Dikdasmen	92

BAB V

Tabel 5.1	:	Kebutuhan, Yang Ada, Kekurangan/Kelebihan SDM Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	99
Tabel 5.2	:	Analisis Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	100
Tabel 5.3	:	Kinerja Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	102

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
BAB IV	
Grafik 4.1 : Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan	26
Grafik 4.2 : Rasio Siswa per Guru menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Jenjang Pendidikan	26
Grafik 4.3 : Indikator SDM Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	53
Grafik 4.4 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru, menurut Jenjang Pendidikan	74
Grafik 4.5 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Dasar	76
Grafik 4.6 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa	80
Grafik 4.7 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Pertama	84
Grafik 4.8 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Atas	88
Grafik 4.9 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan	92
Grafik 4.10 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi Dikdasmen	96
BAB V	
Grafik 5.1 : Kebutuhan, Yang Ada, Kekurangan/Kelebihan SDM Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan	100
Grafik 5.2 : Analisis SDM Kepala Sekolah dan Guru Berdasarkan Indikator SDM menurut Jenjang Pendidikan	101
Grafik 5.3 : Kinerja SDM Kepala Sekolah dan Guru Berdasarkan Indikator SDM menurut Jenjang Pendidikan	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai delapan tujuan. Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Kelima, melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. Kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Untuk mencapai kedelapan tujuan tersebut maka pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang tahun 2005-2025 memiliki visi 2025 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini sangat relevan dipertahankan dengan tetap mempertimbangkan integrasi antara pendidikan dan kebudayaan dalam satu kementerian. Arti insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Sebaliknya, insan kompetitif ada 13 jenis, yaitu berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, jujur, mandiri, pantang menyerah, pembangunan dan pembinaan jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan,

produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajaran sepanjang hayat, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Dengan mengacu pada Nawacita dan memperhatikan visi 2025 maka ditetapkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2019, yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen, yaitu 1) sekolah yang kondusif, 2) guru sebagai penyemangat, 3) orang tua yang terlibat aktif, 4) masyarakat yang sangat peduli, 5) industri yang berperan penting, 6) organisasi yang berkontribusi besar, dan 7) pemerintah yang berperan optimal.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2019 maka ditetapkan misi dengan kode M1, M2, M3, M4, dan M5. Dalam kaitan pendidikan maka hanya M2 dan M3. M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, sedangkan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Untuk menggambarkan misi dan tercapainya visi maka dijabarkan dalam tujuan strategis 2015-2019 khusus pendidikan, yaitu T3 dan T4. T3 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, sedangkan T4 adalah peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sasaran enam strategis yang terkait pendidikan, yaitu 1) SS5 meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, 2) SS6 meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah, 3) SS7 meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, 4) SS8 meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah, 5) SS9 meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan, dan 6) SS10 meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan pendidikan maka beberapa komponen penting yang dapat dijadikan sebagai indikator di antaranya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bagi siswa dan sekaligus menjadi salah satu kunci keunggulan suatu bangsa pada era globalisasi. Sementara itu, peningkatan kualifikasi akademik seluruh sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga kependidikan merupakan faktor penentu lainnya dan sekaligus merupakan aset bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, guru minimal memiliki ijazah S1 atau Diploma 4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam pengetahuan mata pelajaran dan pengetahuan pendidikan.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia karena juga masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan Asia. Hasil penelitian beberapa tahun yang lalu

menunjukkan bahwa di antara tujuh sampel di Asia ternyata Indonesia merupakan negara yang memiliki produktivitas tenaga kerja paling rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah di Indonesia antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, prasarana dan sarana pendidikan, materi ajar, mutu guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Khusus untuk guru dan tenaga kependidikan maka perlu ditingkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas melalui empat strategi, yaitu 1) penguatan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa, 2) pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, adil, transparan, dan berkesinambungan, 3) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan program dan keselarasan disiplin ilmu, dan 4) pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPPK) dalam statistik yang dihasilkan maka hanya strategi ketiga yang dapat dilakukan analisis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pendayagunaan data dan statistik.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis sumber daya manusia berdasarkan data pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah?
2. Bagaimanakah analisis sumber daya manusia berdasarkan indikator pendidikan atau sumber daya manusia pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah?
3. Bagaimanakah kinerja sumber daya manusia berdasarkan indikator pendidikan atau sumber daya manusia pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah?

C. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat dua tujuan dilakukannya kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2016, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan masukan terhadap statistik persekolahan yang dihasilkan khususnya sumber daya manusia pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan khususnya terdiri dari tiga hal sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti disajikan berikut ini.

1. Tersusunnya analisis sumber daya manusia berdasarkan data yang terdiri dari kebutuhan, kekurangan/kelebihan sumber daya manusia pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015/2016.

2. Tersusunnya analisis sumber daya manusia berdasarkan indikator pendidikan atau indikator sumber daya manusia tiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015/2016.
3. Tersusunnya kinerja sumber daya manusia berdasarkan indikator sumber daya manusia tiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015/2016.

D. Ruang Lingkup

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2015/2016 maka ruang lingkungannya dibatasi pada data statistik yang tersedia pada tahun pelajaran 2015/2016, kurikulum satuan pendidikan 2013, jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan dengan menggunakan dua jenis analisis, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan atau indikator sumber daya manusia.

Pembatasan pada jenis statistik pendidikan dasar dan menengah karena kelima satuan pendidikan tersebut memiliki kesamaan dalam hal kepala sekolah dan guru. Kurikulum 2013 karena yang digunakan pada saat sekarang adalah kurikulum 2013. Jenjang pendidikan dasar dan menengah karena sesuai dengan kegiatan pendayagunaan data yang ada. Data yang dimaksud adalah data kepala sekolah dan guru sesuai dengan rincian yang ada. Di samping itu, terdapat indikator-indikator penting tentang sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia pendidikan.

Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat diperlukan karena dengan melakukan analisis data yang ada pada statistik pendidikan dasar dan menengah maka dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan terhadap statistik persekolahan yang dihasilkan. Keuntungan lainnya adalah memacu PDSPK, Kemendikbud untuk mengumpulkan data yang lebih rinci dan memperbaiki item data, sehingga memperkaya data dan informasi yang dimiliki oleh PDSPK, Kemendikbud pada khususnya dan untuk KemenKemendikbuddikbud pada umumnya.

E. Manfaat

Dengan disusunnya buku Analisis Sumber daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2015/2016 ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, *stakeholder*, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah serta analisisnya yang dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan satuan pendidikan yang ada khususnya tentang sumber daya manusia.

Untuk Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tersedianya data sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah dapat digunakan untuk mengkaji tiga indikator sumber daya

manusia, yaitu 1) menghitung kebutuhan, kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia di tiap satuan pendidikan dasar dan menengah, 2) menghitung indikator sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menilai mutu sumber daya manusia di tiap satuan pendidikan dasar dan menengah, dan 3) menghitung kinerja sumber daya manusia di tiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang pendidikan dasar dan menengah khususnya sumber daya manusia pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Stakeholder dapat memanfaatkan data sumber daya manusia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pendidikan seperti kualifikasi guru, guru yang perlu disetarakan, guru perempuan, guru tetap, guru yang berstatus PNS, dan guru yang akan pensiun.

Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data sumber daya manusia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia pendidikan serta pembinaan sumber daya manusia atau penelitian lainnya yang terkait dengan sumber daya manusia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/analisis>).

Analisis dalam linguistik merupakan kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Pada kegiatan laboratorium, kata analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisi, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (Inggris), yaitu *analysis*. Dari akhiran *-lysis* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *-isis*. Jadi, harus diluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>).

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah melakukan kajian terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari kepala sekolah dan guru menurut jenjang pendidikan dan satuan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk data dan indikator SDM.

B. Sumber Daya Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Di dalam sekolah potensi manusia yang dapat dikembangkan adalah kepala sekolah dan guru. (<http://kamusbahasaindonesia.org/sumber%20daya%20manusia>).

Salah satu faktor penting dan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan adalah sumber daya manusia atau sering disingkat sebagai SDM. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. SDM berupa manusia dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang bahwa karyawan bukan sebagai sumber daya, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi organisasi. Oleh karena itu, muncul istilah baru, yaitu *Human Capital* (HC). SDM dilihat tidak hanya sekedar sebagai aset utama melainkan

juga aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi), dan juga bukan sebagai beban atau biaya organisasi. Jadi, perspektif SDM sebagai investasi bagi organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja. Secara makro, SDM adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia).

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya manusia pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kepala sekolah dan guru pada jenjang pendidikan dan satuan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK.

C. Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 (UU 20/2003), pada Bagian Kedua menjelaskan tentang Pendidikan Dasar. Pada pasal 17 (1) pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMA) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah UU 20/2003, pada pasal 18 (1) pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus UU 20/2003, pada ayat (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang wajib diikuti siswa selama sembilan tahun. Periode pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMA. Pada akhir pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). UN sangat penting karena menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau ke pendidikan menengah. (https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_dasar).

Pendidikan menengah terdiri dari dua, yaitu umum dan kejuruan. Pendidikan menengah umum adalah sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA) yang dikelola oleh Kementerian Agama, dikelompokkan dalam program studi sesuai

dengan kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat, dan terdiri atas tiga tingkat. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK) yang dikelola oleh Kementerian Agama, dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas tiga tingkat, dapat juga terdiri atas empat tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja. (https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_menengah).

Berdasarkan penjelasan di atas maka pendidikan dasar dan menengah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sesuai dengan UU 20/2003 tentang satuan pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK.

D. Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi dan bisa berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan atau tidak mengetahui betapa buruknya kinerja perusahaan atau menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/kinerja>).

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67), "Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223), "Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya". Maluyu S.P. Hasibuan (2001: 34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu". (<http://definisi.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>).

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998), "Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan". Veizal Rivai (2004:309) mengemukakan kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan". Robert L. Mathis dan John H. Jackson terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001: 78), "menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan". Menurut John Whitmore dalam *Coaching for Performance* (1997: 104) "kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu keterampilan". Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. (<http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>.)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi kinerja menurut Bambang Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9) adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). Faustino Cardosa Gomes dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 9) mengemukakan definisi kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas yang sering dihubungkan dengan produktivitas. Selanjutnya, kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya. (<http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>.)

Menurut Leon C. Mengginson dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 10), penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Andrew E. Sikula dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 10) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang. Menurut T. Hani Handoko (2001: 235), penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah proses yang dilalui organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini digunakan untuk memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. (<http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>.)

Berdasarkan penjelasan di atas maka kinerja sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah melihat kemampuan kepala sekolah dan guru tiap satuan pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK menggunakan indikator SDM.

BAB III METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016 ini menggunakan pendekatan studi dokumentasi baik yang ada di PDSPK maupun di lingkungan Kemendikbud.

Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi atau dokumentasi yang tersedia di PDSPK dan lingkungan Kemendikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik persekolahan, data pokok pendidikan yang diolah, aspek legalitas atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data sumber daya manusia pendidikan.

Teknik pengumpulan data atau kompilasi data dilaksanakan menggunakan item data yang digunakan untuk menjangkau data sekunder yang meliputi data SDM tiap satuan dikdasmen. Wawancara dan diskusi dilakukan kepada para pemegang data di PDSPK dan di lingkungan Kemendikbud sebagai responden tentang jenis data yang digunakan untuk analisis SDM dikdasmen.

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang Analisis SDM Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis menggunakan data maupun menggunakan indikator pendidikan SDM dan kinerja SDM pendidikan.

Penyajian data berupa kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM dikdasmen dan menggunakan indikator SDM berupa kepala sekolah dan guru yang layak mengajar, kepala sekolah dan guru perempuan, kepala sekolah dan guru tetap, dan kepala sekolah dan guru pegawai negeri sipil, kepala sekolah dan guru pensiun, dan kinerja SDM berdasarkan lima indikator SDM serta disertai dengan grafik untuk memudahkan deskripsinya.

B. Sumber Data

Analisis SDM Dikdasmen menggunakan empat jenis sumber data, yaitu statistik persekolahan, data pokok pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), serta peraturan Menteri. Statistik persekolahan dimaksud pada tahun pelajaran 2015/2016 dari pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Statistik Sekolah Dasar (SD) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016a)
2. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016b)
3. Statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016c)

4. Statistik Sekolah Menengah Atas (SMA) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016d)
5. Statistik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2016e)

Data pokok pendidikan yang dimaksud adalah data yang berasal dari Dapodik tahun 2015/2016 sebagai bahan pelengkap, sedangkan Kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama, Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas, dan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri dimaksud misalnya tentang Guru dan Dosen.

C. Analisis Sumber Daya Manusia

Untuk analisis SDM maka cara penghitungannya terdiri dari dua hal, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan atau indikator SDM. Berdasarkan data maka diperoleh kebutuhan kepala sekolah dan guru/guru mata pelajaran untuk satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, dilakukan analisis kekurangan dan kelebihan kepala sekolah dan gurunya menggunakan standar tertentu. (Kintamani, 2007).

Sebaliknya, berdasarkan indikator pendidikan atau indikator SDM maka diperoleh lima indikator SDM yang penting untuk mengetahui kelayakan kepala sekolah dan guru mengajar, kepala sekolah dan guru perempuan, kepala sekolah dan guru tetap, kepala sekolah dan guru berstatus pegawai negeri sipil, dan kepala sekolah dan guru yang akan pensiun. Selanjutnya, dengan menggunakan lima indikator SDM maka dapat dihitung kinerja SDM untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nilai maksimal atau ideal adalah 100 dan makin mendekati 100 maka makin baik.

1. Analisis Berdasarkan Data

Analisis berdasarkan data sesuai dengan program pendidikan persekolahan dapat dihasilkan kebutuhan, kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru kelas atau mata pelajaran. Analisis ini sesuai dengan jumlah satuan pendidikan yang termasuk dalam pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK.

Berdasarkan kurikulum SD 2013 yang terdapat pada Tabel 3.1, analisis SDM SD yang dihitung adalah kepala sekolah dan guru menurut jabatan yang terdiri dari guru kelas (GK), guru pendidikan agama (GA), guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) (GOR), dan guru seni budaya (GSB). Mata pelajaran lainnya seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dilaksanakan oleh guru kelas (GK). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Untuk analisis SDM SLB maka yang dihitung adalah kepala sekolah dan guru kelas, karena ketersediaan data yang ada.

Tabel 3.1
Kurikulum Sekolah Dasar 2013
Permendikbud Nomor 67, Tahun 2013

No.	Kelompok	No. Urut	Mata Pelajaran	Tingkat						Jumlah	%
				I	II	III	IV	V	VI		
1	A Umum	1	Pendidikan Agama	4	4	4	4	4	4	24	11.59
		2	PPKN	5	5	6	5	5	5	31	14.98
		3	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7	48	23.19
		4	Matematika	5	6	6	6	6	6	35	16.91
		5	IPA	-	-	-	3	3	3	9	4.35
		6	IPS	-	-	-	3	3	3	9	4.35
2	B Umum	8	Seni Budaya	4	4	4	5	5	5	27	13.04
		9	Penjaskes	4	4	4	4	4	4	24	11.59
			Jumlah	30	32	34	37	37	37	207	100.00

Berdasarkan kurikulum SMP 2013 yang terdapat pada Tabel 3.2 maka untuk analisis SDM SMP yang dihitung adalah kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang terdiri dari 10 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, PPKn, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, penjaskes, prakarya, dan guru bimbingan dan penyuluhan (BP) atau guru bimbingan karier (BK). Kebutuhan guru dihitung menggunakan kurikulum tersebut dengan jam mengajar guru adalah 24 jam per minggu. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014a).

Tabel 3.2
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 2013
Permendikbud Nomor 58, Tahun 2014

No.	Kelompok	No. Urut	Mata Pelajaran	Tingkat			Jumlah	%
				VII	VIII	IX		
1	A Umum	1	Pendidikan Agama	3	3	3	9	7.89
		2	PPKN	3	3	3	9	7.89
		3	Bahasa Indonesia	6	6	6	18	15.79
		4	Matematika	5	5	5	15	13.16
		5	IPA	5	5	5	15	13.16
		6	IPS	4	4	4	12	10.53
		7	Bahasa Inggris	4	4	4	12	10.53
2	B Umum	8	Seni Budaya	3	3	3	9	7.89
		9	Penjaskes	3	3	3	9	7.89
		10	Prakarya	2	2	2	6	5.26
		11	BP/BK				150 siswa	
			Jam Mengajar Guru				24 jam	
			Jumlah	38	38	38	114	100.00

Berdasarkan kurikulum SMA yang terdapat pada Tabel 3.3 maka untuk analisis SDM SMA yang dihitung adalah kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang terdiri dari 18 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, seni budaya, penjaskes, keterampilan, biologi, fisika, kimia,

geografi, sosiologi, ekonomi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, antropologi, dan guru BP/BK. Kebutuhan guru dihitung menggunakan kurikulum tersebut dengan jam mengajar guru adalah 24 jam per minggu. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014b).

Tabel 3.3
Kurikulum Sekolah Menengah Atas 2013
Permendikbud Nomor 59, Tahun 2014

No.	Kelompok	No. Urut	Mata Pelajaran	Tingkat									Jumlah	%
				X			XI			XII				
				MIPA	IPS	Bhs & Bud	MIPA	IPS	Bhs & Bud	MIPA	IPS	Bhs & Bud		
1	A Umum	1	Pend Ag & Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	6.92
		2	PPKN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.62
		3	Bhs Ind	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	9.23
		4	Matematika	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	9.23
		5	Sejarah Ind	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.62
		6	Bhs Inggris	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.62
2	B Umum	7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.62
		8	Penjaskes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	6.92
		9	Prakarya & Kewruh	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	4.62
3	C. Peminatan I. MIPA	10	Matematika	3	-	-	4	-	-	4	-	-	11	2.82
		11	Biologi	3	-	-	4	-	-	4	-	-	11	2.82
		12	Fisika	3	-	-	4	-	-	4	-	-	11	2.82
		13	Kimia	3	-	-	4	-	-	4	-	-	11	2.82
	C. Peminatan II. IPS	14	Geografi	-	3	-	-	4	-	-	4	-	11	2.82
		15	Sejarah	-	3	-	-	4	-	-	4	-	11	2.82
		16	Sosiologi	-	3	-	-	4	-	-	4	-	11	2.82
		17	Ekonomi	-	3	-	-	4	-	-	4	-	11	2.82
	C. Peminatan III. Bhs & Bud	18	Bhs & Sastra Ind	-	-	3	-	-	4	-	-	4	11	2.82
		19	Bhs & Sastra Inggris	-	-	3	-	-	4	-	-	4	11	2.82
		20	Bhs & Sastra Asing	-	-	3	-	-	4	-	-	4	11	2.82
		21	Antropologi	-	-	3	-	-	4	-	-	4	11	2.82
4		22	Lintas minat/pendalaman	6	6	6	4	4	4	4	4	4	42	10.77
5		23	BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 siswa	
			Jam mengajar guru										24 jam	
			Jumlah	42	42	42	44	44	44	44	44	44	390	100.00

Guru mata pelajaran SMK terdapat 9 bidang peminatan, yaitu bidang teknologi rekayasa, bidang teknologi informasi dan komputer, bidang kesehatan, bidang agribisnis dan agroteknologi, bidang perikanan dan kelautan, bidang bisnis dan manajemen, bidang pariwisata, bidang senirupa dan kriya, dan bidang seni pertunjukkan. Dengan adanya 9 bidang peminatan maka jumlah guru mata pelajaran yang ada mencapai 25 mata pelajaran. Oleh karena keterbatasan data yang ada maka berdasarkan kurikulum SMK yang terdapat pada Tabel 3.4 maka untuk analisis SDM SMK yang dihitung hanyalah kepala sekolah dan 11 jenis guru mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, PPKn, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjaskes, prakarya, guru program keahlian, dan guru BP/BK. Kebutuhan guru dihitung menggunakan kurikulum tersebut dengan jam mengajar guru adalah 24 jam per minggu. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014c).

Tabel 3.4
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 2013
Berdasarkan Permendikbud Nomor 60, Tahun 2014

No.	Kelompok	No. Urut	Mata Pelajaran	Tingkat			Jumlah	%
				X	XI	XII		
				MIPA	IPS	MIPA		
1	A Umum	1	Pend Ag & Budi Pekerti	3	3	3	9	2,31
		2	PPKN	2	2	2	6	1,54
		3	Bhs Ind	4	4	4	12	3,08
		4	Matematika	4	4	4	12	3,08
		5	Sejarah Ind	2	2	2	6	1,54
		6	Bhs Inggris	2	2	2	6	1,54
2	B Umum	7	Seni Budaya	2	2	2	6	1,54
		8	Penjaskes	3	3	3	9	2,31
		9	Prakarya & Kewirausahaan	2	2	2	6	1,54
3	C Peminatan							
			1. Bidang Teknologi Rekayasa					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Fisika	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Kimia	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Gambar Teknik	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			2. Teknologi Informasi dan Komputer					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Fisika	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Pemrograman Dasar	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Sistem Komputer	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			3. Kesehatan					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Fisika	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Kimia	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Biologi	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			4. Agribisnis dan Agroteknologi					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Fisika	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Kimia	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Biologi	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			5. Perikanan dan Kelautan					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Fisika	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Kimia	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Biologi	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			6. Bisnis dan Manajemen					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Pengantar Ekonomi & Bisnis	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Pengantar Akuntansi	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Pengantar Administrasi Perknta	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			7. Pariwisata					
		10	C1 Ds Bid Keahlian IPA Terapan	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Pengantar Pariwisata	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	20	-	-	20	5,13
			C3 Paket Keahlian	-	20	24	44	11,28
			8. Seni rupa dan Kriya					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Dasar2 desain	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Pengetahuan Bahan	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	20	-	-	20	5,13
			C3 Paket Keahlian	-	20	24	44	11,28
			9. Seni Pertunjukkan					
		10	C1 Ds Bid Keahlian Wawasan Seni Pertunjukkan	2	2	-	4	1,03
		11	C1 Ds Bid Keahlian Tata teknis pentas	2	2	-	4	1,03
		12	C1 Ds Bid Keahlian Manajemen Pertunjukkan	2	2	-	4	1,03
			C2 Ds Prg Keahlian	18	-	-	18	4,62
			C3 Paket Keahlian	-	18	24	42	10,77
			BP	-	-	-	150	siswa
			Jam mengajar guru	-	-	-	24	jam
			Jumlah	48	48	48	144	

Data yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan kepala sekolah dan guru di SD, SLB, SMP, SMA dan SMK pada dasarnya sama namun memiliki variasi berbeda seperti disajikan berikut ini.

Untuk menghitung kepala sekolah dan guru SD maka diperlukan jumlah sekolah, kepala sekolah, guru menurut jabatan, kelas, dan siswa. Untuk menghitung kepala sekolah dan guru SLB maka diperlukan jumlah sekolah, kepala sekolah, guru kelas, kelas, dan siswa. Untuk menghitung kepala sekolah dan guru SMP maka diperlukan jumlah sekolah, kepala sekolah, 10 jenis guru mata pelajaran, guru BP/BK, kelas, siswa, dan kurikulum SMP 2013. Untuk menghitung guru SMA maka diperlukan jumlah kepala sekolah, 18 jenis guru mata pelajaran, guru BP/BK, kelas menurut tingkat, siswa, dan kurikulum SMA 2013. Untuk menghitung guru SMK maka diperlukan jumlah kepala sekolah dan 10 guru mata pelajaran umum dan guru program keahlian, guru BP/BK, kelas menurut tingkat, siswa, dan kurikulum SMK 2013. Kebutuhan guru mata pelajaran SMK tidak dihitung seluruhnya karena banyaknya mata pelajaran yang ada di SMK dari 9 kelompok yang ada dan ketidaktersediaan data guru mata pelajaran.

a. Kebutuhan Kepala Sekolah (BKS) (SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK)

Kebutuhan kepala sekolah adalah sama dengan jumlah sekolah yang ada berdasarkan ketentuan bahwa setiap sekolah harus memiliki seorang kepala sekolah, rumusnya adalah:

$$\text{BKS } t = \text{Sek } t$$

Keterangan:

BKS t = kebutuhan kepala sekolah pada tahun t

Sek t = sekolah pada tahun t

Dengan demikian, tambahan kepala sekolah yang diperlukan adalah:

$$\text{TKS } t = \text{BKS } t - \text{KS } t$$

Keterangan:

TKS t = tambahan kepala sekolah pada tahun t

BKS t = kebutuhan kepala sekolah pada tahun t

KS t = kepala sekolah pada tahun t .

Catatan: Bila terjadi jumlah kepala sekolah yang ada kurang daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan kepala sekolah.

b. Kebutuhan guru kelas (BGK) (SD dan SLB)

Untuk menghitung kebutuhan guru kelas terdapat dua alternatif, yaitu

- 1) Kebutuhan guru kelas (SD dan SLB) adalah sama dengan jumlah kelas yang ada dengan ketentuan setiap kelas memiliki seorang guru kelas, rumusnya adalah:

$$\text{BGK } t = \text{K } t$$

Keterangan:

BGK t = kebutuhan guru kelas pada tahun t

K t = kelas pada tahun t

Dengan demikian, tambahan guru kelas yang diperlukan untuk alternatif 1 ini adalah:

$$\text{TGK } t = \text{BGK } t - \text{GK } t$$

Keterangan:

TGK t = tambahan guru kelas pada tahun t

BGK t = kebutuhan guru kelas pada tahun t (kelas)

GK t = guru kelas pada tahun t .

Catatan: Bila terjadi jumlah guru kelas yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru kelas. Sebaliknya, guru kelas yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru kelas.

- 2) Kebutuhan guru kelas (SD) adalah sama dengan jumlah kelas yang ada dikurangi jumlah kelas II dengan ketentuan guru kelas I dapat merangkap mengajar di kelas II. Alasan dikurangi dengan kelas II karena pada kenyataannya jumlah kelas II selalu lebih kecil daripada jumlah kelas I, sehingga jika disediakan guru kelas I dapat juga mengajar di kelas II dan tidak terjadi kekurangan guru, rumusnya adalah:

$$\text{BGK } t = K t - K \text{ II } t$$

Keterangan:

BGK t = kebutuhan guru kelas pada tahun t

K t = kelas seluruhnya pada tahun t

K II t = kelas II pada tahun t

Dengan demikian, tambahan guru kelas yang diperlukan untuk alternatif 2 ini adalah:

$$\text{TGK } t = \text{BGK } t - \text{GK } t$$

Keterangan:

TGK t = tambahan guru kelas pada tahun t

BGK t = kebutuhan guru kelas pada tahun t (kelas-kelas II)

GK t = guru kelas pada tahun t .

Catatan: Dalam analisis ini kebutuhan guru kelas SD digunakan alternatif 1.

c. Kebutuhan guru penjaskes (BGOR) (SD)

Kebutuhan guru penjaskes dihitung seperti halnya kepala sekolah, yaitu sama dengan jumlah sekolah dengan ketentuan setiap sekolah minimal harus memiliki seorang guru penjaskes, rumusnya adalah:

$$\text{BGOR } t = \text{Sek } t$$

Keterangan:

BGOR t = kebutuhan guru penjaskes pada tahun t

Sek t = sekolah pada tahun t

Dengan demikian, tambahan guru penjaskes yang diperlukan adalah:

$$\text{TGOR } t = \text{BGOR } t - \text{GOR } t$$

Keterangan:

TGOR t = tambahan guru penjaskes pada tahun t

BGOR t = kebutuhan guru penjaskes pada tahun t

GOR t = guru penjaskes pada tahun t

Catatan: Bila terjadi jumlah guru penjaskes yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru penjaskes. Sebaliknya, guru penjaskes yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru penjaskes.

d. Kebutuhan guru pendidikan agama (BGA) (SD)

Kebutuhan guru pendidikan agama dihitung seperti halnya kepala sekolah, yaitu minimal sama dengan jumlah sekolah yang ada dengan ketentuan setiap sekolah minimal harus memiliki seorang guru pendidikan agama. Oleh karena adanya 6 jenis agama maka pada statistik sudah lebih besar dari jumlah sekolah, rumusnya adalah:

$$\text{BGA } t = 1.05 \times \text{Sek } t$$

Keterangan:

BGA t = kebutuhan guru pendidikan agama pada tahun t

1.05 = guru pendidikan agama 1.05 x artinya setiap 100 sekolah terdapat 105 guru agama.

Sek t = sekolah pada tahun t

Dengan demikian, tambahan guru pendidikan agama yang diperlukan adalah:

$$\text{TGA } t = \text{BGA } t - \text{GA } t$$

Keterangan:

TGA t = tambahan guru pendidikan agama pada tahun t

BGA t = kebutuhan guru pendidikan agama pada tahun t

GA t = guru pendidikan agama pada tahun t

Catatan: Bila terjadi jumlah guru pendidikan agama yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru pendidikan agama. Sebaliknya, guru penjasokes yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru pendidikan agama.

e. Kebutuhan guru Seni Budaya (BGSB) (SD)

Kebutuhan guru seni budaya dihitung seperti halnya kepala sekolah, yaitu sama dengan jumlah sekolah yang ada dengan ketentuan setiap sekolah minimal harus memiliki seorang guru seni budaya, rumusnya adalah:

$$\text{BGSB } t = \text{Sek } t$$

Keterangan:

BGSB t = kebutuhan guru seni budaya pada tahun t

Sek t = sekolah pada tahun t

Dengan demikian, tambahan guru Seni Budaya yang diperlukan adalah:

$$\text{TGSB } t = \text{BGSB } t - \text{GSB } t$$

Keterangan:

TGSB t = tambahan guru seni budaya pada tahun t

BGBI t = kebutuhan guru pendidikan bahasa Inggris pada tahun t

GBI t = guru pendidikan bahasa Inggris pada tahun t

Catatan: Bila terjadi jumlah guru seni budaya yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru seni budaya. Sebaliknya, guru seni budaya yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru seni budaya.

f. Kebutuhan guru bimbingan dan penyuluhan (guru BP) atau guru bimbingan karier (guru BK) (BGBP/BK) (khusus SMP dan SM)

Kebutuhan guru BP atau BK dihitung dari jumlah siswa dibagi dengan angka 150 (siswa) artinya setiap orang guru dapat menangani 150 siswa, rumusnya adalah:

$$\text{BGBP/BK } t = S t / 150$$

Keterangan:

BGBP/BK t = kebutuhan guru BP/BK pada tahun t

$S t$ = siswa seluruhnya pada tahun t

150 = setiap 150 siswa dilayani oleh seorang guru BP/BK

Dengan demikian, tambahan guru BP atau BK yang diperlukan adalah:

$$\text{TGBP/BK } t = \text{BGBP/BK } t - \text{GBP/BK } t$$

Keterangan:

TGBP/BK t = tambahan guru BP/BK pada tahun t

BGBP/BK t = kebutuhan guru BP/BK pada tahun t

GBP/BK t = guru BP/BK pada tahun t

Catatan: Bila terjadi jumlah guru BP/BK yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru BP/BK. Sebaliknya, guru BP/BK yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru BP/BK.

g. Kebutuhan guru mata pelajaran (BGMP) (khusus SMP)

Kebutuhan guru mata pelajaran dihitung dari jumlah kelas dikalikan dengan jam belajar mata pelajaran tertentu menurut kurikulum (kurikulum SMP dapat dilihat pada Tabel 3.2) dibagi dengan angka 24 jam, yaitu jam wajib mengajar guru, rumusnya adalah:

$$\text{BGMP SMP at} = \frac{(K t \times \text{MP a})}{24}$$

Keterangan:

BGMP SMP at = kebutuhan guru SMP mata pelajaran a pada tahun t

$K t$ = kelas pada tahun t

MP a = jam belajar mata pelajaran a sesuai dengan kurikulum

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Dengan demikian, tambahan guru mata pelajaran tertentu yang diperlukan adalah:

$$\text{TGMP at} = \text{BGMP at} - \text{GMP at}$$

Keterangan:

TGMP at = tambahan guru mata pelajaran a pada tahun t

BGMP at = kebutuhan guru mata pelajaran a pada tahun t

GMP at = guru mata pelajaran a pada tahun t (10 jenis).

a = jenis mata pelajaran, misalnya PKn, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dst.

Catatan: Bila terjadi jumlah guru mata pelajaran yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru mata pelajaran. Sebaliknya, guru mata pelajaran yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru mata pelajaran.

Bila akan dihitung semua guru mata pelajaran di SMP maka rumusnya adalah:

$$\text{BGMP SMP } t = \frac{(JK t \times \text{JMP})}{24}$$

Keterangan:

BGMP SMP t = kebutuhan guru SMP mata pelajaran seluruhnya pada tahun t

JK t = jumlah kelas seluruhnya pada tahun t

JMP = jumlah jam belajar mata pelajaran seluruhnya sesuai dengan kurikulum (10 jenis)

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Khusus semua guru mata pelajaran di SMP dapat diberlakukan rumus di atas karena semua mata pelajaran di SMP memiliki jumlah jam yang sama di semua tingkat.

h. Kebutuhan guru mata pelajaran (BGMP) (khusus SMA)

Kebutuhan guru mata pelajaran dihitung dari jumlah kelas per tingkat dikalikan dengan jam belajar mata pelajaran tertentu menurut kurikulum (kurikulum SMA dapat dilihat pada Tabel 3.3) dibagi dengan angka 24 jam, yaitu jam wajib mengajar guru, rumusnya adalah:

BGMP at	=	$\frac{(KXpp \times MPa) + (KXIpp \times MPa) + (KXIIpp \times MPa)}{24}$
---------	---	---

Keterangan

MP adalah mata pelajaran

a adalah mata pelajaran a (18 mata pelajaran SMA)

t adalah tahun

BGMP at = kebutuhan guru SMA mata pelajaran a pada tahun t (18 jenis)

KXpp t = kelas (rombongan belajar) tingkat X peminatan p pada tahun t

KXIpp t = kelas XI peminatan p pada tahun t

KXIIpp t = kelas XII peminatan p pada tahun t

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Dengan demikian, tambahan guru mata pelajaran tertentu yang diperlukan adalah:

TGMP at	=	$BGMP at - GMP at$
---------	---	--------------------

Keterangan:

TGMP at = tambahan guru mata pelajaran a pada tahun t

BGMP at = kebutuhan guru mata pelajaran a pada tahun t

GMP at = guru mata pelajaran a pada tahun t.

a = jenis mata pelajaran, misalnya PPKn, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dst.

Catatan: Bila terjadi jumlah guru mata pelajaran yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru mata pelajaran. Sebaliknya, guru mata pelajaran yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru mata pelajaran.

i. Kebutuhan guru mata pelajaran (BGMP) (SMK)

Kebutuhan guru mata pelajaran dihitung dari jumlah kelas dikalikan dengan jam belajar mata pelajaran tertentu menurut Kurikulum (kurikulum SMK dapat dilihat pada Tabel 3.4) dibagi dengan angka 24 jam, yaitu jam wajib mengajar guru, rumusnya adalah:

BGMP at	=	$\frac{(KXpp \times MPa) + (KXIpp \times MPa) + (KXIIpp \times MPa)}{24}$
---------	---	---

Keterangan

MP adalah mata pelajaran

a adalah mata pelajaran a (10 mata pelajaran umum dan program keahlian SMK)

t adalah tahun

BGMP at = kebutuhan guru mata pelajaran a pada tahun t

KXpp t = kelas (rombongan belajar) tingkat X peminatan p pada tahun t

KXIpp t = kelas XI peminatan p pada tahun t

KXIIpp t = kelas XII peminatan p pada tahun t

24 = jam wajib mengajar guru per minggu

Dengan demikian, tambahan guru mata pelajaran umum yang diperlukan adalah:

$$\text{TGMP at} = \text{BGMP at} - \text{GMP at}$$

Keterangan:

TGMP at = tambahan guru mata pelajaran a pada tahun t

BGMP at = kebutuhan guru mata pelajaran a pada tahun t

GMP at = guru mata pelajaran a pada tahun t.

a = jenis mata pelajaran, misalnya Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal, Program Keahlian, dst.

Catatan: Bila terjadi jumlah guru mata pelajaran yang ada lebih besar daripada kebutuhan maka terjadi kelebihan guru mata pelajaran. Sebaliknya, guru mata pelajaran yang ada lebih kecil daripada kebutuhan maka terjadi kekurangan guru mata pelajaran.

2. Analisis Berdasarkan Indikator SDM

Analisis berdasarkan indikator menggunakan jenis indikator SDM yang terdiri dari lima jenis, yaitu 1) persentase kepala sekolah dan guru layak (%KSGL), 2) persentase kepala sekolah dan guru perempuan (%KSGP), 3) persentase kepala sekolah dan guru tetap (%KSGT), 4) persentase kepala sekolah dan guru PNS (%KSGPNS), dan 5) persentase kepala sekolah dan guru pensiun (%KSGpen).

Rumusan untuk menghitung indikator tersebut disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya.

a. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar (%KSGL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kepala sekolah dan guru dengan ijazah yang dimiliki (Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan lebih tinggi) dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah kepala sekolah dan guru menurut ijazah tertinggi SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK
- 2) jumlah kepala sekolah dan guru seluruhnya SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%KSGL: \frac{\text{Jumlah KSG S1/D4 \& lbh tinggi*})}{\text{Jumlah KSG seluruhnya *)}} \times 100$$

*) KSG adalah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru. Nilai idealnya = 100% berarti semua guru mempunyai kualifikasi S1/D4 dan lebih tinggi pada jenjang pendidikan tertentu.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru yang ijazahnya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk menentukan kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualifikasi guru atau penyetaraan guru bagi guru yang ijazahnya belum sesuai.

b. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Perempuan (%KSGP)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kepala sekolah dan guru jenis kelamin perempuan dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah kepala sekolah dan guru menurut jenis kelamin SD, SLB, SMA, SMA dan SMK
- 2) jumlah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%KSGP: \frac{\text{Jumlah KSG perempuan*})}{\text{Jumlah KSG seluruhnya*})} \times 100$$

*) KSG adalah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin banyak kepala sekolah dan guru perempuan pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya = 50 berarti ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah kepala sekolah dan guru perempuan mengajar sehingga dapat diketahui adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

c. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Tetap (%KSGT)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kepala sekolah dan guru dengan status kepegawaian tetap dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah kepala sekolah dan guru menurut status kepegawaian SD, SLB, SMA, SMA dan SMK
- 2) jumlah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%KSGT: \frac{\text{Jumlah KSG tetap *})}{\text{Jumlah KSG seluruhnya *})} \times 100$$

*) KSG adalah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin banyak kepala sekolah dan guru tetap pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya = 100

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah kepala sekolah dan guru tetap sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan karena kepala sekolah dan guru hanya mengajar di satu tempat.

d. Persentase Kepala Sekolah dan Guru PNS (%KSGPNS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kepala sekolah dan guru dengan status kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah kepala sekolah dan guru menurut status kepegawaian sebagai PNS di SD, SLB, SMA, SMA dan SMK
- 2) jumlah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%KSGPNS: \frac{\text{Jumlah KSG PNS *)}}{\text{Jumlah KSG seluruhnya *)}} \times 100$$

*) KSG adalah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin banyak kepala sekolah dan guru yang berstatus PNS pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya = 100

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah kepala sekolah dan guru PNS sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan karena kepala sekolah dan guru memiliki status kepegawaian yang lebih mapan.

e. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Pensiun (%KSGPen)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kepala sekolah dan guru yang akan pensiun (yang berusia di atas 56 tahun) dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah kepala sekolah dan guru menurut menurut kelompok usia SD, SLB, SMA, SMA dan SMK
- 2) jumlah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%KSGPen: \frac{\text{Jumlah KSG usia >56 th *)}}{\text{Jumlah KSG seluruhnya *)}} \times 100$$

*) KSG adalah kepala sekolah dan guru SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin rendah nilainya berarti makin sedikit kepala sekolah dan guru yang akan pensiun. Belum ada idealnya tetapi ditentukan mendekati 0%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah kepala sekolah dan guru yang akan pensiun sehingga dapat dilakukan formasi atau penggantian kepala sekolah dan guru yang akan pensiun.

3. Kinerja SDM Berdasarkan Indikator SDM

Dengan menggunakan indikator SDM dalam analisis SDM maka kinerja SDM juga dapat dihitung dari kelima indikator SDM seperti yang dijelaskan di atas. Kelima indikator SDM yang disajikan adalah menunjukkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, makin tinggi nilainya menunjukkan mutu makin bagus. Sebaliknya, makin rendah nilainya maka mutu belum bagus. Nilai ideal kinerja adalah 100.

Indikator %KSGL menggunakan standar ideal 100%, artinya semua KS dan guru harusnya layak mengajar semuanya. Demikian juga %KSGT menggunakan standar ideal 100%, artinya semua KS dan guru harusnya tetap sehingga guru tidak perlu mengajar di beberapa sekolah. %KSGP seharusnya sebesar 50%, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika menjadi kepala sekolah atau mengajar sehingga antara laki-laki dan perempuan setara. %KSGPNS ditentukan sebesar 100%, artinya makin besar KS dan guru PNS menunjukkan kondisi makin bagus karena semua pegawai telah mapan, sehingga terjamin kesejahteraannya sampai mereka pensiun. %KSGPen ditentukan sebesar mendekati 0%, artinya makin besar KS dan guru pensiun menunjukkan kondisi kurang normal karena harus segera mengganti mereka yang pensiun.

Oleh karena indikator tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan ideal sebesar 100% maka diperlukan standarisasi untuk menentukan mutu KS dan guru yang baik. Khusus untuk %KSGP dan %KSGPen karena idealnya tidak 100 maka perlu dilakukan konversi dengan cara tertentu. %KSGP dihitung dengan dua cara, yaitu 1) bila nilainya kurang dari 50 maka dirumuskan nilai dibagi 50 dikalikan 100 dan 2) bila nilainya lebih dari 50 maka dirumuskan $100 - 50$ kemudian dikalikan 100. %KSG pen dihitung dengan cara 100 dikurangi nilainya. Hal ini berarti makin kecil yang pensiun maka nilainya makin baik. Standar menentukan SDM disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Standar Menentukan Kinerja Sumber Daya Manusia

No.	Jenis	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Asumsi
1	%KSG Layak	100	100	100	100	100	Ideal
2	%KSG Perempuan	50	50	50	50	50	Ideal
3	%KSG Tetap	100	100	100	100	100	Ideal
4	%KSG PNS	100	100	100	100	100	Ideal
5	%KSG Pensiun	0	0	0	0	0	Ideal

Catatan: 0 artinya mendekati 0

Untuk memudahkan dalam memahami pencapaian kinerja SDM maka digunakan 5 jenis kinerja seperti halnya pada wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang. Disebut paripurna bila nilainya mencapai 95,00-100,00, disebut utama bila nilainya 90,00-94,99, disebut madya bila nilainya 85,00-89,99, disebut pratama bila nilainya 80,00-84,99, dan disebut kurang bila nilainya kurang dari 80,00. Rincian kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Jenis Kinerja Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Paripurna	95.00-100.00
2	Utama	90.00-94.99
3	Madya	85.00-89.99
4	Pratama	80.00-84.99
5	Kurang	kurang dari 80.00

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

Sesuai dengan tujuan penulisan maka yang dibahas ada tiga hal, yaitu analisis berdasarkan data yang menghasilkan kebutuhan dan kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru, analisis berdasarkan indikator SDM yang berisi lima indikator, dan kinerja SDM berdasarkan lima indikator SDM.

A. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM

Sesuai penjelasan pada metodologi maka analisis berdasarkan data akan menghasilkan kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM dirinci menurut jenis satuan pendidikan dasar dan menengah. Bila kebutuhan kepala sekolah dan guru lebih besar daripada yang ada maka terjadi kekurangan. Sebaliknya, bila kebutuhan lebih kecil daripada yang ada maka terjadi kelebihan. Sebagai pengecekan apakah kebutuhan kepala sekolah dan guru sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka dihitung melalui rasio siswa per guru (R-S/G). Bila R-S/G berdasarkan kebutuhan lebih besar daripada yang ada maka terjadi kelebihan kepala sekolah dan guru, sebaliknya, bila R-S/G berdasarkan kebutuhan lebih kecil daripada yang ada maka terjadi kekurangan kepala sekolah dan guru.

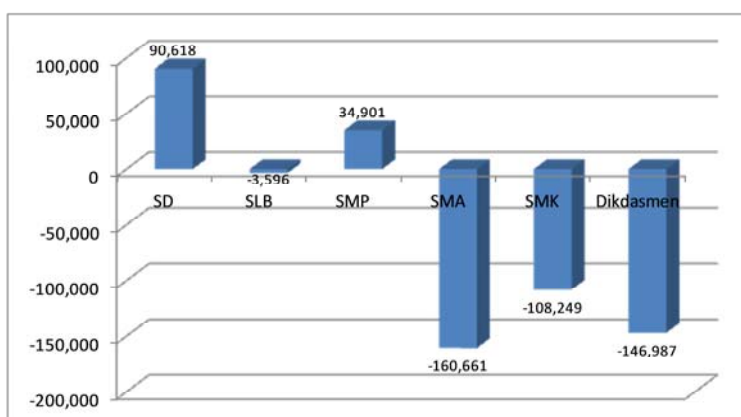
Tabel 4.1
Sekolah, Kelas, dan Siswa, Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru serta Rasio Siswa per Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016

No	Variabel	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Jumlah
1	Sekolah	147,536	1,962	37,023	12,689	12,659	211,869
2	Kelas	1,100,097	28,493	342,656	146,893	153,150	1,771,289
3	Siswa	25,885,053	114,085	10,040,277	4,312,407	4,334,987	44,686,809
4	Kebutuhan	1,704,995	30,455	646,521	456,573	381,602	3,220,146
	a. Kepala sekolah	147,536	1,962	37,023	12,689	12,659	211,869
	b. Guru	1,557,459	28,493	609,498	443,884	368,943	3,008,277
5	Yang Ada	1,795,613	26,859	681,422	295,912	273,353	3,073,159
	a. Kepala sekolah	147,536	1,962	37,023	12,689	12,659	211,869
	b. Guru	1,648,077	24,897	644,399	283,223	260,694	2,861,290
6	Kekurangan/Kelebihan	90,618	-3,596	34,901	-160,661	-108,249	-146,987
	a. Kepala sekolah	0	0	0	0	0	0
	b. Guru	90,618	-3,596	34,901	-160,661	-108,249	-146,987
7	Rasio S/G						
	a. Kebutuhan	15.18	3.75	15.53	9.45	11.36	13.88
	b. Yang Ada	14.42	4.25	14.73	14.57	15.86	14.54
	Artinya	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan

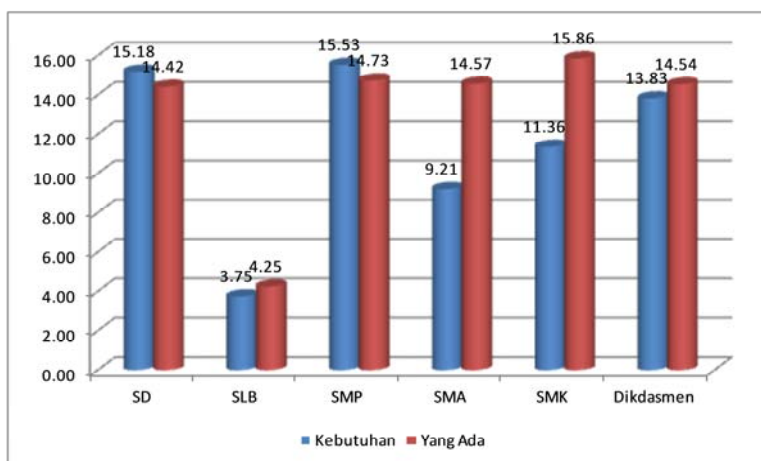
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa berdasarkan sekolah maka dapat dihitung kebutuhan kepala sekolah. Dari data tahun 2015/2016 ternyata semua

jenjang pendidikan tidak memerlukan tambahan kepala sekolah. Namun, dari kelas yang ada terjadi kekurangan guru di SLB sebesar 3.596 orang dan ditambah dengan kurikulum maka kekurangan guru SMA dan SMK masing-masing sebesar 160.661 dan 108.249 orang. Sebaliknya, SD dan SMP telah kelebihan guru masing-masing sebesar 90.618 dan 34.901 orang. Secara keseluruhan, dikdasmen masih kekurangan 146,987 guru. Kekurangan dan kelebihan guru juga bisa dilihat dari R-S/G, terlihat SD dan SMP kelebihan guru. Sebaliknya, SLB, SMA, dan SMK kekurangan guru. Ketika menggunakan rasio siswa per guru hanya diketahui kurang atau lebih namun tidak diketahui kuantitasnya.

Grafik 4.1
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015/2016



Grafik 4.2
Rasio Siswa per Guru Menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016



1. Sekolah Dasar (SD)

Seperti yang dijelaskan pada metodologi maka kebutuhan kepala sekolah dan guru SD dihitung dari jumlah sekolah dan kelas. Tabel 4.2 menunjukkan kebutuhan kepala sekolah dan guru SD menurut jabatan. Berdasarkan jumlah sekolah dan kelas maka kebutuhan kepala sekolah dan guru secara nasional sebesar 1.704.995 dengan rincian kepala sekolah, guru penjaskes, dan guru seni budaya masing-masing sebesar 147.536, guru kelas sebesar 1.100.097, dan guru pendidikan agama sebesar 162.290 karena adanya 6 jenis agama, sehingga ketika menghitung kebutuhan guru digunakan 1,10 sekolah yang berarti dari 100 sekolah terdapat 110 guru agama.

Tabel 4.2
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas	Siswa	Kebutuhan Kepsek dan Guru					Jumlah
					Kepsek	GK	GA	GOR	GSB	
1	DKI Jakarta	2,648	28,139	822,420	2,648	28,139	2,913	2,648	2,648	38,996
2	Jawa Barat	19,848	159,631	4,560,218	19,848	159,631	21,833	19,848	19,848	241,008
3	Banten	4,522	41,114	1,206,719	4,522	41,114	4,974	4,522	4,522	59,654
4	Jawa Tengah	19,087	127,203	2,908,119	19,087	127,203	20,996	19,087	19,087	205,460
5	DI Yogyakarta	1,840	13,482	291,647	1,840	13,482	2,024	1,840	1,840	21,026
6	Jawa Timur	19,362	134,917	2,910,051	19,362	134,917	21,298	19,362	19,362	214,301
7	Aceh	3,400	23,748	482,493	3,400	23,748	3,740	3,400	3,400	37,688
8	Sumatera Utara	9,528	72,815	1,780,003	9,528	72,815	10,481	9,528	9,528	111,880
9	Sumatera Barat	4,120	30,047	654,687	4,120	30,047	4,532	4,120	4,120	46,939
10	Riau	3,583	33,101	803,489	3,583	33,101	3,941	3,583	3,583	47,791
11	Kepulauan Riau	889	8,877	221,910	889	8,877	978	889	889	12,522
12	Jambi	2,433	18,337	395,806	2,433	18,337	2,676	2,433	2,433	28,312
13	Sumatera Selatan	4,629	38,952	944,172	4,629	38,952	5,092	4,629	4,629	57,931
14	Bangka Belitung	799	6,402	159,462	799	6,402	879	799	799	9,678
15	Bengkulu	1,355	10,446	220,771	1,355	10,446	1,491	1,355	1,355	16,002
16	Lampung	4,629	36,494	845,662	4,629	36,494	5,092	4,629	4,629	55,473
17	Kalimantan Barat	4,341	30,548	610,168	4,341	30,548	4,775	4,341	4,341	48,346
18	Kalimantan Tengah	2,600	17,125	294,057	2,600	17,125	2,860	2,600	2,600	27,785
19	Kalimantan Selatan	2,900	20,297	385,350	2,900	20,297	3,190	2,900	2,900	32,187
20	Kalimantan Timur	1,834	17,120	413,925	1,834	17,120	2,017	1,834	1,834	24,639
21	Kalimantan Utara	452	3,747	78,064	452	3,747	497	452	452	5,600
22	Sulawesi Utara	2,209	14,297	258,824	2,209	14,297	2,430	2,209	2,209	23,354
23	Gorontalo	927	6,197	134,344	927	6,197	1,020	927	927	9,998
24	Sulawesi Tengah	2,849	18,697	364,869	2,849	18,697	3,134	2,849	2,849	30,378
25	Sulawesi Selatan	6,357	45,353	970,423	6,357	45,353	6,993	6,357	6,357	71,417
26	Sulawesi Barat	1,311	8,825	168,986	1,311	8,825	1,442	1,311	1,311	14,200
27	Sulawesi Tenggara	2,287	16,319	337,018	2,287	16,319	2,516	2,287	2,287	25,696
28	Maluku	1,729	11,551	230,905	1,729	11,551	1,902	1,729	1,729	18,640
29	Maluku Utara	1,274	8,073	161,875	1,274	8,073	1,401	1,274	1,274	13,296
30	Bali	2,439	16,890	405,508	2,439	16,890	2,683	2,439	2,439	26,890
31	Nusa Tenggara Barat	3,143	21,943	514,051	3,143	21,943	3,457	3,143	3,143	34,829
32	Nusa Tenggara Timur	4,951	36,964	816,018	4,951	36,964	5,446	4,951	4,951	57,263
33	Papua	2,284	15,753	402,063	2,284	15,753	2,512	2,284	2,284	25,117
34	Papua Barat	977	6,693	130,976	977	6,693	1,075	977	977	10,699
	Indonesia	147,536	1,100,097	25,885,053	147,536	1,100,097	162,290	147,536	147,536	1,704,995

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, GK: guru kelas, GA: guru pendidikan agama, GOR: guru penjaskes, dan GSB: guru seni budaya.

Bila dilihat di setiap provinsi dan sesuai dengan besarnya sekolah maka kebutuhan terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 241.008 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5.600. Kebutuhan yang lebih besar dari 100 ribu terjadi di empat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebaliknya, kebutuhan yang kurang dari 10 ribu terjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

Tabel 4.3
Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kepsek dan Guru yg Ada					Jumlah
		Kepsek	GK	GA	GOR	GSB	
1	DKI Jakarta	2,648	28,139	3,206	5,681	2,397	42,071
2	Jawa Barat	19,848	159,631	23,122	18,330	22,632	243,563
3	Banten	4,522	41,114	6,234	3,721	7,887	63,478
4	Jawa Tengah	19,087	127,203	18,958	20,735	23,893	209,876
5	DI Yogyakarta	1,840	13,482	1,519	2,064	3,744	22,649
6	Jawa Timur	19,362	134,917	19,293	29,846	30,780	234,198
7	Aceh	3,400	23,748	4,127	10,441	10,693	52,409
8	Sumatera Utara	9,528	72,815	11,642	13,365	12,304	119,654
9	Sumatera Barat	4,120	30,047	6,531	4,127	4,536	49,361
10	Riau	3,583	33,101	3,990	6,708	6,915	54,297
11	Kepulauan Riau	889	8,877	1,100	980	1,797	13,643
12	Jambi	2,433	18,337	3,598	3,112	2,752	30,232
13	Sumatera Selatan	4,629	38,952	5,184	8,160	7,441	64,366
14	Bangka Belitung	799	6,402	912	821	766	9,700
15	Bengkulu	1,355	10,446	1,277	2,173	1,768	17,019
16	Lampung	4,629	36,494	4,418	7,921	7,379	60,841
17	Kalimantan Barat	4,341	30,548	8,786	254	344	44,273
18	Kalimantan Tengah	2,600	17,125	3,514	3,131	1,062	27,432
19	Kalimantan Selatan	2,900	20,297	1,666	4,022	4,819	33,704
20	Kalimantan Timur	1,834	17,120	2,443	2,881	2,617	26,895
21	Kalimantan Utara	452	3,747	585	700	624	6,108
22	Sulawesi Utara	2,209	14,297	2,662	1,593	594	21,355
23	Gorontalo	927	6,197	1,083	629	830	9,666
24	Sulawesi Tengah	2,849	18,697	2,987	4,418	1,790	30,741
25	Sulawesi Selatan	6,357	45,353	6,733	12,338	8,066	78,847
26	Sulawesi Barat	1,311	8,825	1,736	1,423	1,291	14,586
27	Sulawesi Tenggara	2,287	16,319	6,987	696	381	26,670
28	Maluku	1,729	11,551	1,571	2,862	1,384	19,097
29	Maluku Utara	1,274	8,073	1,057	867	566	11,837
30	Bali	2,439	16,890	2,236	2,592	4,683	28,840
31	Nusa Tenggara Barat	3,143	21,943	4,188	5,411	8,782	43,467
32	Nusa Tenggara Timur	4,951	36,964	5,908	4,939	5,400	58,162
33	Papua	2,284	15,355	319	244	184	18,386
34	Papua Barat	977	6,693	354	121	45	8,190
	Indonesia	147,536	1,099,699	169,926	187,306	191,146	1,795,613

Tabel 4.3 merupakan jumlah kepala sekolah dan guru SD yang ada. Jumlah kepala sekolah dan guru SD pada tingkat nasional sebesar 1.795.613 dengan rincian terbesar pada guru kelas sebesar 1.099.699 dan terkecil pada guru pendidikan agama sebesar 169.926. Sesuai dengan kebutuhan seharusnya guru penjaskes dan guru seni budaya adalah sama karena satu sekolah memiliki satu guru penjaskes dan satu guru seni budaya. Namun, pada kenyataannya guru penjaskes sebesar 187.306 dan guru seni budaya sebesar 191.146. Bila dirinci menurut provinsi, yang terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 243.563 dan terkecil di Provinsi Kalimantan

Utara sebesar 6.108. Perbedaan antara provinsi terbesar dan terkecil menunjukkan disparitas wilayah yang sangat besar pada kepala sekolah dan guru SD.

Tabel 4.4
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru					Jumlah
		KS	GK	GA	GO	GSB	
1	DKI Jakarta	0	0	293	3,033	-251	3,075
2	Jawa Barat	0	0	1,289	-1,518	2,784	2,555
3	Banten	0	0	1,260	-801	3,365	3,824
4	Jawa Tengah	0	0	-2,038	1,648	4,806	4,416
5	DI Yogyakarta	0	0	-505	224	1,904	1,623
6	Jawa Timur	0	0	-2,005	10,484	11,418	19,897
7	Aceh	0	0	387	7,041	7,293	14,721
8	Sumatera Utara	0	0	1,161	3,837	2,776	7,774
9	Sumatera Barat	0	0	1,999	7	416	2,422
10	Riau	0	0	49	3,125	3,332	6,506
11	Kepulauan Riau	0	0	122	91	908	1,121
12	Jambi	0	0	922	679	319	1,920
13	Sumatera Selatan	0	0	92	3,531	2,812	6,435
14	Bangka Belitung	0	0	33	22	-33	22
15	Bengkulu	0	0	-214	818	413	1,017
16	Lampung	0	0	-674	3,292	2,750	5,368
17	Kalimantan Barat	0	0	4,011	-4,087	-3,997	-4,073
18	Kalimantan Tengah	0	0	654	531	-1,538	-353
19	Kalimantan Selatan	0	0	-1,524	1,122	1,919	1,517
20	Kalimantan Timur	0	0	426	1,047	783	2,256
21	Kalimantan Utara	0	0	88	248	172	508
22	Sulawesi Utara	0	0	232	-616	-1,615	-1,999
23	Gorontalo	0	0	63	-298	-97	-332
24	Sulawesi Tengah	0	0	-147	1,569	-1,059	363
25	Sulawesi Selatan	0	0	-260	5,981	1,709	7,430
26	Sulawesi Barat	0	0	294	112	-20	386
27	Sulawesi Tenggara	0	0	4,471	-1,591	-1,906	974
28	Maluku	0	0	-331	1,133	-345	457
29	Maluku Utara	0	0	-344	-407	-708	-1,459
30	Bali	0	0	-447	153	2,244	1,950
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	731	2,268	5,639	8,638
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	462	-12	449	899
33	Papua	0	-398	-2,193	-2,040	-2,100	-6,731
34	Papua Barat	0	0	-721	-856	-932	-2,509
	Indonesia	0	-398	7,636	39,770	43,610	90,618

Kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru SD disajikan pada Tabel 4.4. Secara nasional, jumlah kepala sekolah dan guru SD kelebihan 90.618. Jumlah kepala sekolah SD sudah sesuai dengan kebutuhannya. Namun, guru kelas SD terjadi kekurangan sebesar 398 di Provinsi Papua. Dengan menggunakan perhitungan guru pendidikan agama 1,10 kali sekolah maka terjadi kelebihan 7.636 orang dan terdapat 13 provinsi yang kelebihan, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Bali, Papua, dan Papua Barat, sehingga terdapat 21 provinsi masih kekurangan guru. Guru penjaskes kelebihan 39.770 orang karena di 24 provinsi telah kelebihan dan sisanya 10 provinsi masih kekurangan guru penjaskes,

yaitu Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Guru seni budaya kekurangan 43.610 karena terdapat kekurangan di 13 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dan telah kelebihan guru di 21 provinsi.

Tabel 4.5
Rasio Siswa per Guru Menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Siswa	Kebutuhan	KS+G	R-S/G berdasarkan		
			KS+G	Yang Ada	Kebutuhan	Yang Ada	Artinya
1	DKI Jakarta	822,420	38,996	42,071	21.09	19.55	KELEBIHAN
2	Jawa Barat	4,560,218	241,008	243,563	18.92	18.72	KELEBIHAN
3	Banten	1,206,719	59,654	63,478	20.23	19.01	KELEBIHAN
4	Jawa Tengah	2,908,119	205,460	209,876	14.15	13.86	KELEBIHAN
5	DI Yogyakarta	291,647	21,026	22,649	13.87	12.88	KELEBIHAN
6	Jawa Timur	2,910,051	214,301	234,198	13.58	12.43	KELEBIHAN
7	Aceh	482,493	37,688	52,409	12.80	9.21	KELEBIHAN
8	Sumatera Utara	1,780,003	111,880	119,654	15.91	14.88	KELEBIHAN
9	Sumatera Barat	654,687	46,939	49,361	13.95	13.26	KELEBIHAN
10	Riau	803,489	47,791	54,297	16.81	14.80	KELEBIHAN
11	Kepulauan Riau	221,910	12,522	13,643	17.72	16.27	KELEBIHAN
12	Jambi	395,806	28,312	30,232	13.98	13.09	KELEBIHAN
13	Sumatera Selatan	944,172	57,931	64,366	16.30	14.67	KELEBIHAN
14	Bangka Belitung	159,462	9,678	9,700	16.48	16.44	KELEBIHAN
15	Bengkulu	220,771	16,002	17,019	13.80	12.97	KELEBIHAN
16	Lampung	845,662	55,473	60,841	15.24	13.90	KELEBIHAN
17	Kalimantan Barat	610,168	48,346	44,273	12.62	13.78	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	294,057	27,785	27,432	10.58	10.72	KEKURANGAN
19	Kalimantan Selatan	385,350	32,187	33,704	11.97	11.43	KELEBIHAN
20	Kalimantan Timur	413,925	24,639	26,895	16.80	15.39	KELEBIHAN
21	Kalimantan Utara	78,064	5,600	6,108	13.94	12.78	KELEBIHAN
22	Sulawesi Utara	258,824	23,354	21,355	11.08	12.12	KEKURANGAN
23	Gorontalo	134,344	9,998	9,666	13.44	13.90	KEKURANGAN
24	Sulawesi Tengah	364,869	30,378	30,741	12.01	11.87	KELEBIHAN
25	Sulawesi Selatan	970,423	71,417	78,847	13.59	12.31	KELEBIHAN
26	Sulawesi Barat	168,986	14,200	14,586	11.90	11.59	KELEBIHAN
27	Sulawesi Tenggara	337,018	25,696	26,670	13.12	12.64	KELEBIHAN
28	Maluku	230,905	18,640	19,097	12.39	12.09	KELEBIHAN
29	Maluku Utara	161,875	13,296	11,837	12.17	13.68	KEKURANGAN
30	Bali	405,508	26,890	28,840	15.08	14.06	KELEBIHAN
31	Nusa Tenggara Barat	514,051	34,829	43,467	14.76	11.83	KELEBIHAN
32	Nusa Tenggara Timur	816,018	57,263	58,162	14.25	14.03	KELEBIHAN
33	Papua	402,063	25,117	18,386	16.01	21.87	KEKURANGAN
34	Papua Barat	130,976	10,699	8,190	12.24	15.99	KEKURANGAN
	Indonesia	25,885,053	1,704,995	1,795,613	15.18	14.42	KELEBIHAN

Berdasarkan Tabel 4.5 disajikan perhitungan kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru SD menggunakan R-S/G yang dihitung berdasarkan siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional telah kelebihan guru SD karena nilai kebutuhan 15,18 lebih besar daripada yang ada sebesar 14,42. Hal ini disebabkan kelebihan guru SD di 27 provinsi. Sebaliknya, masih kekurangan guru SD di 7 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dengan demikian, perhitungan

menggunakan R-S/G telah sesuai dengan perhitungan kebutuhan dan kekurangan/kelebihan yang terdapat kuantitasnya.

2. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Kebutuhan kepala sekolah dan guru SLB dihitung dari jumlah sekolah dan kelas. Tabel 4.6 menunjukkan kebutuhan kepala sekolah dan guru serta kepala sekolah dan guru yang ada pada SLB. Secara nasional kebutuhan kepala sekolah sama dengan jumlah sekolah SLB sebesar 1.962 dan guru kelas sama dengan jumlah kelas sebesar 28.493, sehingga kebutuhan seluruhnya sebesar 30.455.

Tabel 4.6
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru serta Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas	Kebutuhan KS & Guru			KS & Guru yang Ada		
				KS	GK	Jumlah	KS	GK	Jumlah
1	DKI Jakarta	87	1,169	87	1,169	1,256	87	1,178	1,265
2	Jawa Barat	353	5,781	353	5,781	6,134	353	4,521	4,874
3	Banten	78	1,392	78	1,392	1,470	78	1,021	1,099
4	Jawa Tengah	167	3,018	167	3,018	3,185	167	2,840	3,007
5	DI Yogyakarta	76	1,321	76	1,321	1,397	76	1,344	1,420
6	Jawa Timur	401	4,337	401	4,337	4,738	401	3,554	3,955
7	Aceh	52	706	52	706	758	52	636	688
8	Sumatera Utara	46	639	46	639	685	46	654	700
9	Sumatera Barat	135	1,526	135	1,526	1,661	135	1,279	1,414
10	Riau	38	529	38	529	567	38	478	516
11	Kepulauan Riau	12	227	12	227	239	12	179	191
12	Jambi	14	305	14	305	319	14	280	294
13	Sumatera Selatan	28	412	28	412	440	28	464	492
14	Bangka Belitung	9	208	9	208	217	9	148	157
15	Bengkulu	15	269	15	269	284	15	256	271
16	Lampung	20	326	20	326	346	20	352	372
17	Kalimantan Barat	18	221	18	221	239	18	188	206
18	Kalimantan Tengah	20	251	20	251	271	20	228	248
19	Kalimantan Selatan	31	449	31	449	480	31	483	514
20	Kalimantan Timur	29	491	29	491	520	29	350	379
21	Kalimantan Utara	4	81	4	81	85	4	46	50
22	Sulawesi Utara	22	270	22	270	292	22	243	265
23	Gorontalo	8	276	8	276	284	8	176	184
24	Sulawesi Tengah	18	294	18	294	312	18	216	234
25	Sulawesi Selatan	79	1,216	79	1,216	1,295	79	1,108	1,187
26	Sulawesi Barat	21	270	21	270	291	21	206	227
27	Sulawesi Tenggara	53	561	53	561	614	53	510	563
28	Maluku	12	182	12	182	194	12	147	159
29	Maluku Utara	13	162	13	162	175	13	185	198
30	Bali	16	362	16	362	378	16	390	406
31	Nusa Tenggara Barat	39	726	39	726	765	39	595	634
32	Nusa Tenggara Timur	34	389	34	389	423	34	520	554
33	Papua	10	83	10	83	93	10	94	104
34	Papua Barat	4	44	4	44	48	4	28	32
	Indonesia	1,962	28,493	1,962	28,493	30,455	1,962	24,897	26,859

Catatan: KS adalah kepala sekolah, guru adalah guru kelas

Kebutuhan kepala sekolah dan guru SLB terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 6.134 dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 48. Kebutuhan yang lebih besar dari 3.000 terjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebaliknya, kebutuhan yang kurang dari 100 terjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Jumlah kepala sekolah dan guru SLB yang ada pada tingkat nasional sebesar 26.859 dengan rincian kepala sekolah sebesar 1.962 dan guru kelas 24.897. Bila dilihat di setiap provinsi, kepala sekolah dan guru terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.874 dan terkecil di Provinsi Papua Barat sebesar 32.

Tabel 4.7
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru, Rasio Siswa per Guru Tiap Provinsi Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan KS+G			Siswa	Kebutuhan		Rasio S/G		
		KS	GK	Jumlah		KS+G	Yang Ada	Kebut	Yg Ada	Arti
1	DKI Jakarta	0	9	9	5,359	1,256	1,265	4.27	4.24	KELEBIHAN
2	Jawa Barat	0	-1,260	-1,260	20,130	6,134	4,874	3.28	4.13	KEKURANGAN
3	Banten	0	-371	-371	4,443	1,470	1,099	3.02	4.04	KEKURANGAN
4	Jawa Tengah	0	-178	-178	14,665	3,185	3,007	4.60	4.88	KEKURANGAN
5	DI Yogyakarta	0	23	23	4,803	1,397	1,420	3.44	3.38	KELEBIHAN
6	Jawa Timur	0	-783	-783	16,040	4,738	3,955	3.39	4.06	KEKURANGAN
7	Aceh	0	-70	-70	2,692	758	688	3.55	3.91	KEKURANGAN
8	Sumatera Utara	0	15	15	4,020	685	700	5.87	5.74	KELEBIHAN
9	Sumatera Barat	0	-247	-247	5,891	1,661	1,414	3.55	4.17	KEKURANGAN
10	Riau	0	-51	-51	2,218	567	516	3.91	4.30	KEKURANGAN
11	Kepulauan Riau	0	-48	-48	1,034	239	191	4.33	5.41	KEKURANGAN
12	Jambi	0	-25	-25	1,439	319	294	4.51	4.89	KEKURANGAN
13	Sumatera Selatan	0	52	52	2,102	440	492	4.78	4.27	KELEBIHAN
14	Bangka Belitung	0	-60	-60	804	217	157	3.71	5.12	KEKURANGAN
15	Bengkulu	0	-13	-13	1,136	284	271	4.00	4.19	KEKURANGAN
16	Lampung	0	26	26	1,515	346	372	4.38	4.07	KELEBIHAN
17	Kalimantan Barat	0	-33	-33	1,095	239	206	4.58	5.32	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	0	-23	-23	939	271	248	3.46	3.79	KEKURANGAN
19	Kalimantan Selatan	0	34	34	1,867	480	514	3.89	3.63	KELEBIHAN
20	Kalimantan Timur	0	-141	-141	1,861	520	379	3.58	4.91	KEKURANGAN
21	Kalimantan Utara	0	-35	-35	341	85	50	4.01	6.82	KEKURANGAN
22	Sulawesi Utara	0	-27	-27	1,057	292	265	3.62	3.99	KEKURANGAN
23	Gorontalo	0	-100	-100	918	284	184	3.23	4.99	KEKURANGAN
24	Sulawesi Tengah	0	-78	-78	1,043	312	234	3.34	4.46	KEKURANGAN
25	Sulawesi Selatan	0	-108	-108	4,454	1,295	1,187	3.44	3.75	KEKURANGAN
26	Sulawesi Barat	0	-64	-64	906	291	227	3.11	3.99	KEKURANGAN
27	Sulawesi Tenggara	0	-51	-51	2,288	614	563	3.73	4.06	KEKURANGAN
28	Maluku	0	-35	-35	797	194	159	4.11	5.01	KEKURANGAN
29	Maluku Utara	0	23	23	757	175	198	4.33	3.82	KELEBIHAN
30	Bali	0	28	28	1,862	378	406	4.93	4.59	KELEBIHAN
31	Nusa Tenggara Barat	0	-131	-131	2,725	765	634	3.56	4.30	KEKURANGAN
32	Nusa Tenggara Timur	0	131	131	2,209	423	554	5.22	3.99	KELEBIHAN
33	Papua	0	11	11	505	93	104	5.43	4.86	KELEBIHAN
34	Papua Barat	0	-16	-16	170	48	32	3.54	5.31	KEKURANGAN
	Indonesia	0	-3,596	-3,596	114,085	30,455	26,859	3.75	4.25	KEKURANGAN

Berdasarkan Tabel 4.7 maka terdapat kekurangan guru SLB sebesar 3.596 dengan rincian kekurangan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.260 dan terkecil di Provinsi Bengkulu sebesar 13. Namun, terdapat 10 provinsi, yaitu DKI

Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua telah kelebihan guru berkisar antara 9 sampai 52 orang. Kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru juga dapat terlihat dari R-S/G yang dihitung dari siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional, masih terjadi kekurangan guru SLB karena R-S/G kebutuhan 3,75 lebih kecil daripada yang ada 4,25. Hal ini disebabkan kekurangan guru di 24 provinsi dan kelebihan guru di 10 provinsi. Dengan demikian, perhitungan menggunakan R-S/G telah sesuai dengan perhitungan kebutuhan, kekurangan/kelebihan guru SLB walaupun tidak diketahui kuantitasnya dengan tepat.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kebutuhan kepala sekolah dan guru SMP dihitung dari jumlah sekolah, kelas, dan jam belajar menurut kurikulum SMP yang terdapat pada Tabel 4.8. Secara nasional, kebutuhan kepala sekolah dan guru mata pelajaran tingkat nasional sebesar 646.521, yang dirinci menurut kepala sekolah dan 11 guru mata pelajaran dan guru BP/BK.

Sesuai dengan jam belajar menurut kurikulum SMP maka terdapat tujuh kelompok kebutuhan kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMP, yaitu 1) kepala sekolah sebesar 37.023, 2) 4 guru mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, PPKn, seni budaya, dan penjasokes, masing-masing sebesar 42.833, 3) 2 guru mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA masing-masing sebesar 71.387, 4) 2 guru mata pelajaran, yaitu IPS dan bahasa Inggris masing-masing sebesar 57.115, 5) guru bahasa Indonesia sebesar 85.671, 6) guru prakarya sebesar 28.557, dan 7) guru BP/BK sebesar 66.934.

Sesuai dengan besarnya sekolah di setiap provinsi maka kebutuhan kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMP terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 101.889 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2.084. Kebutuhan kepala sekolah dan guru SMP yang lebih besar dari 75 ribu terjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebaliknya, kebutuhan kepala sekolah dan guru SMP yang kurang dari 5 ribu terjadi di enam provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Perbedaan kebutuhan KS dan guru SMP antara yang terbesar dan terkecil menunjukkan adanya disparitas antarwilayah. Makin besar perbedaan berarti makin besar disparitas antarwilayah.

Tabel 4.8
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas	Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran					
				Kepsek	P. Agama	PPKn	Bhs Ind	Matematika	IPA
1	DKI Jakarta	1,066	11,914	1,066	1,489	1,489	2,979	2,482	2,482
2	Jawa Barat	4,744	53,815	4,744	6,727	6,727	13,454	11,211	11,211
3	Banten	1,334	13,067	1,334	1,633	1,633	3,267	2,722	2,722
4	Jawa Tengah	3,221	40,440	3,221	5,055	5,055	10,110	8,425	8,425
5	DI Yogyakarta	433	4,576	433	572	572	1,144	953	953
6	Jawa Timur	4,396	43,810	4,396	5,476	5,476	10,953	9,127	9,127
7	Aceh	1,037	7,965	1,037	996	996	1,991	1,659	1,659
8	Sumatera Utara	2,420	21,243	2,420	2,655	2,655	5,311	4,426	4,426
9	Sumatera Barat	770	8,019	770	1,002	1,002	2,005	1,671	1,671
10	Riau	1,082	8,915	1,082	1,114	1,114	2,229	1,857	1,857
11	Kepulauan Riau	321	2,622	321	328	328	656	546	546
12	Jambi	627	4,702	627	588	588	1,176	980	980
13	Sumatera Selatan	1,247	11,183	1,247	1,398	1,398	2,796	2,330	2,330
14	Bangka Belitung	198	1,864	198	233	233	466	388	388
15	Bengkulu	412	3,364	412	421	421	841	701	701
16	Lampung	1,292	10,919	1,292	1,365	1,365	2,730	2,275	2,275
17	Kalimantan Barat	1,222	7,975	1,222	997	997	1,994	1,661	1,661
18	Kalimantan Tengah	783	4,302	783	538	538	1,076	896	896
19	Kalimantan Selatan	578	4,602	578	575	575	1,151	959	959
20	Kalimantan Timur	589	5,254	589	657	657	1,314	1,095	1,095
21	Kalimantan Utara	152	1,094	152	137	137	274	228	228
22	Sulawesi Utara	698	4,749	698	594	594	1,187	989	989
23	Gorontalo	318	2,042	318	255	255	511	425	425
24	Sulawesi Tengah	799	5,341	799	668	668	1,335	1,113	1,113
25	Sulawesi Selatan	1,599	14,639	1,599	1,830	1,830	3,660	3,050	3,050
26	Sulawesi Barat	331	2,306	331	288	288	577	480	480
27	Sulawesi Tenggara	712	5,259	712	657	657	1,315	1,096	1,096
28	Maluku	594	3,902	594	488	488	976	813	813
29	Maluku Utara	444	2,460	444	308	308	615	513	513
30	Bali	396	6,153	396	769	769	1,538	1,282	1,282
31	Nusa Tenggara Barat	831	6,849	831	856	856	1,712	1,427	1,427
32	Nusa Tenggara Timur	1,523	11,625	1,523	1,453	1,453	2,906	2,422	2,422
33	Papua	587	3,982	587	498	498	996	830	830
34	Papua Barat	267	1,704	267	213	213	426	355	355
	Indonesia	37,023	342,656	37,023	42,833	42,833	85,671	71,387	71,387

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, P. Agama: pendidikan agama, PPKn: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, IPA: ilmu pengetahuan alam

Tabel 4.8 lanjutan
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Lanjutan Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru						
		IPS	Bhs Inggris	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	BP/BK	Jumlah
1	DKI Jakarta	1,986	1,986	1,489	1,489	993	2,468	22,398
2	Jawa Barat	8,969	8,969	6,727	6,727	4,485	11,938	101,889
3	Banten	2,178	2,178	1,633	1,633	1,089	2,844	24,866
4	Jawa Tengah	6,740	6,740	5,055	5,055	3,370	8,111	75,362
5	DI Yogyakarta	763	763	572	572	381	867	8,545
6	Jawa Timur	7,302	7,302	5,476	5,476	3,651	8,419	82,181
7	Aceh	1,328	1,328	996	996	664	1,318	14,968
8	Sumatera Utara	3,541	3,541	2,655	2,655	1,770	4,361	40,416
9	Sumatera Barat	1,337	1,337	1,002	1,002	668	1,430	14,897
10	Riau	1,486	1,486	1,114	1,114	743	1,675	16,871
11	Kepulauan Riau	437	437	328	328	219	527	5,001
12	Jambi	784	784	588	588	392	822	8,897
13	Sumatera Selatan	1,864	1,864	1,398	1,398	932	2,316	21,271
14	Bangka Belitung	311	311	233	233	155	381	3,530
15	Bengkulu	561	561	421	421	280	579	6,320
16	Lampung	1,820	1,820	1,365	1,365	910	2,109	20,691
17	Kalimantan Barat	1,329	1,329	997	997	665	1,520	15,369
18	Kalimantan Tengah	717	717	538	538	359	701	8,297
19	Kalimantan Selatan	767	767	575	575	384	802	8,667
20	Kalimantan Timur	876	876	657	657	438	1,016	9,927
21	Kalimantan Utara	182	182	137	137	91	199	2,084
22	Sulawesi Utara	792	792	594	594	396	797	9,016
23	Gorontalo	340	340	255	255	170	328	3,877
24	Sulawesi Tengah	890	890	668	668	445	853	10,110
25	Sulawesi Selatan	2,440	2,440	1,830	1,830	1,220	2,613	27,392
26	Sulawesi Barat	384	384	288	288	192	408	4,388
27	Sulawesi Tenggara	877	877	657	657	438	835	9,874
28	Maluku	650	650	488	488	325	634	7,407
29	Maluku Utara	410	410	308	308	205	393	4,735
30	Bali	1,026	1,026	769	769	513	1,306	11,445
31	Nusa Tenggara Barat	1,142	1,142	856	856	571	1,201	12,877
32	Nusa Tenggara Timur	1,938	1,938	1,453	1,453	969	2,110	22,040
33	Papua	664	664	498	498	332	763	7,658
34	Papua Barat	284	284	213	213	142	290	3,255
	Indonesia	57,115	57,115	42,833	42,833	28,557	66,934	646,521

Catatan: IPS: ilmu pengetahuan sosial, Bhs Inggris: bahasa Inggris, Seni Bud: seni budaya, penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan, BP/BK: bimbingan penyuluhan/bimbingan karier

Berdasarkan Tabel 4.9, jumlah kepala sekolah dan guru SMP pada tingkat nasional sebesar 681.422. Walaupun sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah dan guru SMP hanya tujuh kelompok guru yang sama, namun pada kenyataannya guru yang ada berbeda dan terbesar adalah guru IPA SMP sebesar 83.366 dan terkecil guru BP/BK SMP sebesar 26.873. Bila dilihat setiap provinsi maka kepala sekolah dan guru SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 89.673 dan terkecil di Provinsi Papua Barat sebesar 3.550. Kondisi ini menunjukkan disparitas wilayah yang sangat besar antara kepala sekolah dan guru SMP pada provinsi terbesar dan terkecil.

Tabel 4.9
Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada											
		Kepsek	P. Agama	PPKn	Bhs Ind	Mat	IPA	IPS	Bhs Inggris	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	BP/BK
1	DKI Jakarta	1,066	1,446	1,200	2,490	2,544	2,582	2,492	2,244	1,054	1,141	704	1,201
2	Jawa Barat	4,744	6,588	5,741	10,865	10,297	10,324	10,143	9,711	5,062	5,609	7,549	3,040
3	Banten	1,334	1,668	1,517	2,743	2,618	2,576	2,571	2,473	1,317	1,447	1,211	579
4	Jawa Tengah	3,221	5,488	4,870	9,117	9,019	9,245	8,444	8,209	4,273	4,555	4,886	5,118
5	DI Yogyakarta	433	843	546	1,080	1,165	1,192	1,064	1,003	551	547	507	750
6	Jawa Timur	4,396	6,347	5,689	10,190	10,404	10,189	9,665	9,052	4,750	5,199	5,055	4,879
7	Aceh	1,037	2,041	1,513	2,635	2,535	2,951	2,504	2,354	1,782	1,623	1,615	336
8	Sumatera Utara	2,420	4,101	2,861	5,503	5,387	5,427	5,013	4,873	2,500	2,603	1,847	1,625
9	Sumatera Barat	770	1,284	1,215	2,251	2,234	2,383	2,236	2,027	1,127	1,217	1,135	761
10	Riau	1,082	1,687	1,277	2,290	2,256	2,420	2,238	2,166	1,138	1,265	1,129	543
11	Kepulauan Riau	321	455	342	635	639	654	598	585	299	349	159	87
12	Jambi	627	837	644	1,339	1,307	1,308	1,222	1,168	658	712	581	301
13	Sumatera Selatan	1,247	1,720	1,555	3,187	2,976	3,120	2,789	2,690	1,646	1,670	1,329	818
14	Bangka Belitung	198	244	212	403	409	424	383	381	222	222	95	104
15	Bengkulu	412	486	514	950	872	973	849	847	464	462	367	155
16	Lampung	1,292	1,614	1,418	2,908	2,613	2,701	2,564	2,407	1,304	1,436	1,450	941
17	Kalimantan Barat	1,222	1,666	1,030	1,781	1,818	1,730	1,784	1,642	744	928	560	297
18	Kalimantan Tengah	783	1,132	588	1,036	1,026	1,088	1,166	958	425	577	374	179
19	Kalimantan Selatan	578	663	639	1,196	1,196	1,300	1,182	1,070	541	639	473	455
20	Kalimantan Timur	589	1,068	703	1,244	1,211	1,307	1,189	1,136	578	700	260	266
21	Kalimantan Utara	152	284	159	267	270	276	292	252	130	169	82	49
22	Sulawesi Utara	698	812	623	1,155	1,075	1,241	1,290	1,012	569	664	395	118
23	Gorontalo	318	325	298	497	480	573	506	465	221	283	166	145
24	Sulawesi Tengah	799	1,052	807	1,325	1,211	1,372	1,225	1,147	596	660	360	235
25	Sulawesi Selatan	1,599	2,392	2,098	3,855	3,661	3,851	3,467	3,330	1,847	1,962	1,450	975
26	Sulawesi Barat	331	431	371	620	561	579	537	485	300	312	175	117
27	Sulawesi Tenggara	712	868	787	1,357	1,295	1,445	1,379	1,261	633	666	525	303
28	Maluku	594	843	675	996	958	1,186	1,154	743	492	559	309	90
29	Maluku Utara	444	532	433	610	591	723	671	561	312	363	171	16
30	Bali	396	955	819	1,468	1,389	1,432	1,329	1,232	758	786	928	738
31	Nusa Tenggara Barat	831	1,359	1,118	1,942	2,029	2,184	1,930	1,837	1,321	1,193	1,059	968
32	Nusa Tenggara Timur	1,523	2,191	1,616	3,149	2,860	3,247	3,035	2,903	1,317	1,654	907	497
33	Papua	587	820	559	912	882	927	970	827	379	458	250	141
34	Papua Barat	267	390	246	428	413	436	446	385	163	211	119	46
	Indonesia	37,023	54,632	44,683	82,424	80,201	83,366	78,327	73,436	39,434	42,841	38,182	26,873

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, P. Agama: pendidikan agama, PPKn: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, Mat: matematika, IPA: ilmu pengetahuan alam IPS: ilmu pengetahuan sosial, Bhs Inggris: bahasa Inggris, Seni Bud: seni budaya, penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan, BP/BK: bimbingan penyuluhan/bimbingan karier

Kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru SMP disajikan pada Tabel 4.10. Secara nasional, jumlah kepala sekolah dan guru SMP kelebihan 34.901. Jumlah kepala sekolah SMP sudah sesuai dengan kebutuhannya. Kekurangan guru SMP terbesar terjadi pada guru BP/BK sebesar 40.061 karena semua provinsi kekurangan, sedangkan kekurangan terkecil terjadi pada guru Bahasa Indonesia sebesar 3.247 karena 16 provinsi kelebihan. Sebaliknya, kelebihan terbesar pada guru IPS sebesar 21.212 karena semua provinsi kelebihan, dan terkecil pada guru penjaskes sebesar 8 orang karena 12 provinsi kekurangan guru.

Tabel 4.10
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan Kepsek dan Guru Bid Studi											
		Kepsek	P. Agama	PKn	Bhs Ind	Mat	IPA	IPS	Bhs Inggris	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	BP/BK
1	DKI Jakarta	0	-43	-289	-489	62	100	506	258	-435	-348	-289	-1,267
2	Jawa Barat	0	-139	-986	-2,589	-914	-887	1,174	742	-1,665	-1,118	3,064	-8,898
3	Banten	0	35	-116	-524	-104	-146	393	295	-316	-186	122	-2,265
4	Jawa Tengah	0	433	-185	-993	594	820	1,704	1,469	-782	-500	1,516	-2,993
5	DI Yogyakarta	0	271	-26	-64	212	239	301	240	-21	-25	126	-117
6	Jawa Timur	0	871	213	-763	1,277	1,062	2,363	1,750	-726	-277	1,404	-3,540
7	Aceh	0	1,045	517	644	876	1,292	1,176	1,026	786	627	951	-982
8	Sumatera Utara	0	1,446	206	192	961	1,001	1,472	1,332	-155	-52	77	-2,736
9	Sumatera Barat	0	282	213	246	563	712	899	690	125	215	467	-669
10	Riau	0	573	163	61	399	563	752	680	24	151	386	-1,132
11	Kepulauan Riau	0	127	14	-21	93	108	161	148	-29	21	-60	-440
12	Jambi	0	249	56	163	327	328	438	384	70	124	189	-521
13	Sumatera Selatan	0	322	157	391	646	790	925	826	248	272	397	-1,498
14	Bangka Belitung	0	11	-21	-63	21	36	72	70	-50	-11	-60	-277
15	Bengkulu	0	65	93	109	171	272	288	286	43	41	87	-424
16	Lampung	0	249	53	178	338	426	744	587	-61	71	540	-1,168
17	Kalimantan Barat	0	669	33	-213	157	69	455	313	-253	-69	-105	-1,223
18	Kalimantan Tengah	0	594	50	-40	130	192	449	241	-113	39	15	-522
19	Kalimantan Selatan	0	88	64	45	237	341	415	303	-34	64	89	-347
20	Kalimantan Timur	0	411	46	-70	116	212	313	260	-79	43	-178	-750
21	Kalimantan Utara	0	147	22	-7	42	48	110	70	-7	32	-9	-150
22	Sulawesi Utara	0	218	29	-32	86	252	498	220	-25	70	-1	-679
23	Gorontalo	0	70	43	-14	55	148	166	125	-34	28	-4	-183
24	Sulawesi Tengah	0	384	139	-10	98	259	335	257	-72	-8	-85	-618
25	Sulawesi Selatan	0	562	268	195	611	801	1,027	890	17	132	230	-1,638
26	Sulawesi Barat	0	143	83	43	81	99	153	101	12	24	-17	-291
27	Sulawesi Tenggara	0	211	130	42	199	349	502	384	-24	9	87	-532
28	Maluku	0	355	187	20	145	373	504	93	4	71	-16	-544
29	Maluku Utara	0	224	125	-5	78	210	261	151	4	55	-34	-377
30	Bali	0	186	50	-70	107	150	303	206	-11	17	415	-568
31	Nusa Tenggara Barat	0	503	262	230	602	757	788	695	465	337	488	-233
32	Nusa Tenggara Timur	0	738	163	243	438	825	1,097	965	-136	201	-62	-1,613
33	Papua	0	322	61	-84	52	97	306	163	-119	-40	-82	-622
34	Papua Barat	0	177	33	2	58	81	162	101	-50	-2	-23	-244
	Indonesia	0	11,799	1,850	-3,247	8,814	11,979	21,212	16,321	-3,399	8	9,625	-40,061

Bila dilihat per provinsi, lima provinsi masih kekurangan guru SMP, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, sedangkan 29 provinsi lainnya kelebihan guru. Namun, kekurangan guru bukan berarti semua mata pelajaran juga kekurangan guru, demikian juga kelebihan guru bukan berarti semua mata pelajaran juga kelebihan guru. Hal ini menunjukkan tidak telitinya dalam rekrutmen guru sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan guru mata pelajaran atau akibat perencanaan kebutuhan guru mata pelajaran menggunakan data yang kurang valid atau kebijakan tanpa melihat data yang ada.

Berdasarkan Tabel 4.11 disajikan R-S/G SMP menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional, sudah kelebihan guru SMP dengan R-S/G kebutuhan sebesar 15,53 lebih besar daripada yang ada sebesar 14,73. Dengan demikian, terdapat kelebihan di 29 provinsi dan kekurangan di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Perhitungan menggunakan R-S/G ternyata

sudah sesuai dengan menggunakan rumusan kebutuhan dan kekurangan/kelebihan guru, walaupun tidak diketahui secara tepat berapa kuantitasnya.

Tabel 4.11
Rasio Siswa per Guru menurut Kebutuhan dan Yang ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Siswa	Kebutuhan KS+G	KS+G Yang Ada	R-S/G berdasarkan		
					Kebutuha	Yang Ada	Artinya
1	DKI Jakarta	370,160	22,398	20,164	16.53	18.36	KEKURANGAN
2	Jawa Barat	1,790,762	101,889	89,673	17.58	19.97	KEKURANGAN
3	Banten	426,658	24,866	22,054	17.16	19.35	KEKURANGAN
4	Jawa Tengah	1,216,596	75,362	76,445	16.14	15.91	KELEBIHAN
5	DI Yogyakarta	129,991	8,545	9,681	15.21	13.43	KELEBIHAN
6	Jawa Timur	1,262,919	82,181	85,815	15.37	14.72	KELEBIHAN
7	Aceh	197,649	14,968	22,926	13.20	8.62	KELEBIHAN
8	Sumatera Utara	654,138	40,416	44,160	16.19	14.81	KELEBIHAN
9	Sumatera Barat	214,535	14,897	18,640	14.40	11.51	KELEBIHAN
10	Riau	251,319	16,871	19,491	14.90	12.89	KELEBIHAN
11	Kepulauan Riau	79,005	5,001	5,123	15.80	15.42	KELEBIHAN
12	Jambi	123,288	8,897	10,704	13.86	11.52	KELEBIHAN
13	Sumatera Selatan	347,335	21,271	24,747	16.33	14.04	KELEBIHAN
14	Bangka Belitung	57,204	3,530	3,258	16.21	17.56	KEKURANGAN
15	Bengkulu	86,848	6,320	7,351	13.74	11.81	KELEBIHAN
16	Lampung	316,299	20,691	22,648	15.29	13.97	KELEBIHAN
17	Kalimantan Barat	228,046	15,369	15,202	14.84	15.00	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	105,119	8,297	9,332	12.67	11.26	KELEBIHAN
19	Kalimantan Selatan	120,241	8,667	9,932	13.87	12.11	KELEBIHAN
20	Kalimantan Timur	152,417	9,927	10,251	15.35	14.87	KELEBIHAN
21	Kalimantan Utara	29,834	2,084	2,382	14.32	12.52	KELEBIHAN
22	Sulawesi Utara	119,531	9,016	9,652	13.26	12.38	KELEBIHAN
23	Gorontalo	49,186	3,877	4,277	12.69	11.50	KELEBIHAN
24	Sulawesi Tengah	128,020	10,110	10,789	12.66	11.87	KELEBIHAN
25	Sulawesi Selatan	391,982	27,392	30,487	14.31	12.86	KELEBIHAN
26	Sulawesi Barat	61,266	4,388	4,819	13.96	12.71	KELEBIHAN
27	Sulawesi Tenggara	125,202	9,874	11,231	12.68	11.15	KELEBIHAN
28	Maluku	95,165	7,407	8,599	12.85	11.07	KELEBIHAN
29	Maluku Utara	58,890	4,735	5,427	12.44	10.85	KELEBIHAN
30	Bali	195,956	11,445	12,230	17.12	16.02	KELEBIHAN
31	Nusa Tenggara Barat	180,202	12,877	17,771	13.99	10.14	KELEBIHAN
32	Nusa Tenggara Timur	316,551	22,040	24,899	14.36	12.71	KELEBIHAN
33	Papua	114,514	7,658	7,712	14.95	14.85	KELEBIHAN
34	Papua Barat	43,449	3,255	3,550	13.35	12.24	KELEBIHAN
	Indonesia	10,040,277	646,521	681,422	15.53	14.73	KELEBIHAN

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kebutuhan kepala sekolah dan guru SMA dihitung dari jumlah sekolah, kelas menurut tingkat, dan jam belajar menurut kurikulum SMA yang terdapat pada Tabel 4.12. Berdasarkan jumlah sekolah, kelas menurut tingkat, dan jam belajar menurut kurikulum SMA maka kebutuhan kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMA secara nasional sebesar 456.573 dengan rincian kepala sekolah dan 18 guru mata pelajaran dan guru BP/BK.

Tabel 4.12
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas				Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru							
			IX	X	XII	Jumlah	Kepsek	Pend. Ag	PPKN	Bhs Ind	tematika	Sej. Ind	Seni Bud	Penjaskes
1	DKI Jakarta	467	1,856	1,737	1,803	5,396	467	675	450	899	1,721	1,272	450	675
2	Jawa Barat	1,441	6,470	5,944	5,643	18,057	1,441	2,257	1,505	3,010	5,749	4,245	1505	2257
3	Banten	497	1,863	1,766	1,650	5,279	497	660	440	880	1,682	1,242	440	660
4	Jawa Tengah	847	4,256	4,140	4,036	12,432	847	1,554	1,036	2,072	3,967	2,931	1036	1554
5	DI Yogyakarta	160	660	669	670	1,999	160	250	167	333	639	472	167	250
6	Jawa Timur	1,441	5,747	5,515	5,352	16,614	1,441	2,077	1,385	2,769	5,299	3,914	1385	2077
7	Aceh	487	1,826	1,734	1,675	5,235	487	654	436	873	1,669	1,233	436	654
8	Sumatera Utara	1,020	3,663	3,477	3,250	10,390	1,020	1,299	866	1,732	3,311	2,445	866	1299
9	Sumatera Barat	301	1,653	1,580	1,533	4,766	301	596	397	794	1,520	1,123	397	596
10	Riau	413	1,642	1,578	1,482	4,702	413	588	392	784	1,499	1,107	392	588
11	Kepulauan Riau	114	426	408	387	1,221	114	153	102	204	389	288	102	153
12	Jambi	210	828	805	747	2,380	210	298	198	397	759	561	198	298
13	Sumatera Selatan	570	2,148	2,037	1,912	6,097	570	762	508	1,016	1,943	1,435	508	762
14	Bangka Belitung	65	273	257	243	773	65	97	64	129	246	182	64	97
15	Bengkulu	129	567	538	506	1,611	129	201	134	269	513	379	134	201
16	Lampung	462	1,650	1,542	1,489	4,681	462	585	390	780	1,492	1,102	390	585
17	Kalimantan Barat	378	1,227	1,165	1,094	3,486	378	436	291	581	1,111	820	291	436
18	Kalimantan Tengah	230	670	677	615	1,962	230	245	164	327	626	463	164	245
19	Kalimantan Selatan	183	721	695	641	2,057	183	257	171	343	656	484	171	257
20	Kalimantan Timur	210	795	737	686	2,218	210	277	185	370	706	521	185	277
21	Kalimantan Utara	55	179	183	169	531	55	66	44	89	170	125	44	66
22	Sulawesi Utara	209	694	736	693	2,123	209	265	177	354	679	502	177	265
23	Gorontalo	57	317	287	266	870	57	109	73	145	277	204	73	109
24	Sulawesi Tengah	189	791	752	689	2,232	189	279	186	372	711	525	186	279
25	Sulawesi Selatan	552	2,544	2,443	2,324	7,311	552	914	609	1,219	2,331	1,722	609	914
26	Sulawesi Barat	76	297	280	264	841	76	105	70	140	268	198	70	105
27	Sulawesi Tenggara	270	1,093	1,050	987	3,130	270	391	261	522	998	737	261	391
28	Maluku	250	829	863	815	2,507	250	313	209	418	801	592	209	313
29	Maluku Utara	174	462	474	432	1,368	174	171	114	228	437	323	114	171
30	Bali	157	900	851	838	2,589	157	324	216	432	826	610	216	324
31	Nusa Tenggara Barat	286	1,126	1,117	1,046	3,289	286	411	274	548	1,049	775	274	411
32	Nusa Tenggara Timur	472	1,991	1,984	1,874	5,849	472	731	487	975	1,867	1,379	487	731
33	Papua	206	647	655	631	1,933	206	242	161	322	617	456	161	242
34	Papua Barat	111	322	332	310	964	111	121	80	161	308	228	80	121
35	Indonesia	12,689	51,133	49,008	46,752	146,893	12,689	18,363	12,242	24,487	46,836	34,595	12,242	18,363

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, Pend. Ag: pendidikan agama, PPKN: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, Sej. Ind: Sejarah Indonesia, Seni Bud: seni budaya, penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan

Sesuai dengan jam belajar menurut kurikulum SMA, terdapat 8 kelompok kebutuhan kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMA, yaitu 1) kepala sekolah sebesar 12.689, 2) dua jenis guru, yaitu pendidikan agama dan penjaskes masing-masing sebesar 18.363, 3) tiga jenis guru, yaitu PPKn, seni budaya, dan prakarya sebesar 12.242, 4) bahasa Indonesia sebesar 24.487, 5) guru matematika sebesar 46.835, 6) dua jenis guru, yaitu sejarah Indonesia dan bahasa Inggris sebesar 34.595, 7) 9 jenis guru, yaitu biologi, fisika, kimia, geografi, sosiologi, ekonomi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra asing, dan antropologi sebesar 22.353, dan 8) BP/BK sebesar 28.751.

Tabel 4.12 lanjutan
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Lanjutan Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru												Jumlah
		Prakarya	Biologi	Fisika	Kimia	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	B&S Ind	B&S Ingg	B&S Asing	tropologi	B & P	
1	DKI Jakarta	450	822	822	822	822	822	822	822	1,272	822	822	1035	16,764
2	Jawa Barat	1,505	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	4,245	2,740	2,740	3851	56,230
3	Banten	440	802	802	802	802	802	802	802	1,242	802	802	1105	16,506
4	Jawa Tengah	1,036	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	1,895	2,931	1,895	1,895	2473	38,492
5	DI Yogyakarta	167	306	306	306	306	306	306	306	472	306	306	344	6,175
6	Jawa Timur	1,385	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	3,914	2,530	2,530	3271	51,687
7	Aceh	436	796	796	796	796	796	796	796	1,233	796	796	896	16,171
8	Sumatera Utara	866	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	2,445	1,579	1,579	2247	32,607
9	Sumatera Barat	397	725	725	725	725	725	725	725	1,123	725	725	909	14,678
10	Riau	392	715	715	715	715	715	715	715	1,107	715	715	910	14,607
11	Kepulauan Riau	102	186	186	186	186	186	186	186	288	186	186	231	3,800
12	Jambi	198	362	362	362	362	362	362	362	561	362	362	445	7,381
13	Sumatera Selatan	508	927	927	927	927	927	927	927	1,435	927	927	1259	19,049
14	Bangka Belitung	64	117	117	117	117	117	117	117	182	117	117	147	2,390
15	Bengkulu	134	245	245	245	245	245	245	245	379	245	245	300	4,978
16	Lampung	390	711	711	711	711	711	711	711	1,102	711	711	914	14,591
17	Kalimantan Barat	291	530	530	530	530	530	530	530	820	530	530	707	10,932
18	Kalimantan Tengah	164	299	299	299	299	299	299	299	463	299	299	327	6,109
19	Kalimantan Selatan	171	313	313	313	313	313	313	313	484	313	313	382	6,376
20	Kalimantan Timur	185	337	337	337	337	337	337	337	521	337	337	416	6,886
21	Kalimantan Utara	44	81	81	81	81	81	81	81	125	81	81	96	1,653
22	Sulawesi Utara	177	325	325	325	325	325	325	325	502	325	325	340	6,572
23	Gorontalo	73	132	132	132	132	132	132	132	204	132	132	165	2,677
24	Sulawesi Tengah	186	339	339	339	339	339	339	339	525	339	339	424	6,913
25	Sulawesi Selatan	609	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,722	1,113	1,113	1465	22,683
26	Sulawesi Barat	70	128	128	128	128	128	128	128	198	128	128	163	2,615
27	Sulawesi Tenggara	261	476	476	476	476	476	476	476	737	476	476	550	9,663
28	Maluku	209	383	383	383	383	383	383	383	592	383	383	423	7,776
29	Maluku Utara	114	209	209	209	209	209	209	209	323	209	209	214	4,264
30	Bali	216	394	394	394	394	394	394	394	610	394	394	544	8,021
31	Nusa Tenggara Barat	274	501	501	501	501	501	501	501	775	501	501	662	10,248
32	Nusa Tenggara Timur	487	892	892	892	892	892	892	892	1,379	892	892	1040	18,063
33	Papua	161	295	295	295	295	295	295	295	456	295	295	346	6,025
34	Papua Barat	80	147	147	147	147	147	147	147	228	147	147	150	2,991
	Indonesia	12,242	22,352	22,352	22,352	22,352	22,352	22,352	22,352	34,595	22,352	22,352	28,751	456,573

Catatan: B&S Ind adalah bahasa dan sastra Indonesia, B&S Ingg adalah bahasa dan sastra Inggris, B&S Asing adalah bahasa dan sastra asing, dan BP/BK adalah bimbingan penyuluhan/ bimbingan karier.

Sesuai dengan besarnya sekolah di setiap provinsi maka kebutuhan terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 56.230 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.653. Kebutuhan yang lebih besar dari 20 ribu terjadi di lima provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sebaliknya, kebutuhan yang kurang dari 3 ribu terjadi di empat provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Tabel 4.13
Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada									
		Kepsek	Pend . Ag	PPKN	Bhs Ind	matematika	Sej. Ind	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	Biologi
1	DKI Jakarta	467	747	500	852	1,344	654	411	519	436	590
2	Jawa Barat	1,441	1,944	1,587	2,708	4,212	1,655	1,304	1,717	1,854	1,934
3	Banten	497	608	483	802	1,204	452	383	474	366	531
4	Jawa Tengah	847	1,600	1,206	2,074	3,273	1,313	961	1,308	1,543	1,425
5	DI Yogyakarta	160	302	208	335	557	207	180	213	258	254
6	Jawa Timur	1,441	2,011	1,582	2,721	4,328	1,618	1,298	1,702	1,718	1,870
7	Aceh	487	875	656	1,143	1,921	697	670	715	498	907
8	Sumatera Utara	1,020	1,457	1,078	1,796	2,842	889	860	956	805	1,297
9	Sumatera Barat	301	597	565	916	1,489	624	456	535	504	625
10	Riau	413	640	487	822	1,358	480	430	514	473	540
11	Kepulauan Riau	114	154	111	198	296	125	98	113	92	125
12	Jambi	210	287	243	449	693	275	232	281	266	289
13	Sumatera Selatan	570	764	636	1,205	1,856	671	653	653	645	754
14	Bangka Belitung	65	91	62	109	186	77	54	65	61	74
15	Bengkulu	129	186	162	316	441	197	154	164	177	222
16	Lampung	462	592	484	836	1,345	525	382	500	443	548
17	Kalimantan Barat	378	530	328	527	838	306	272	308	302	298
18	Kalimantan Tengah	230	409	201	345	517	187	170	203	171	221
19	Kalimantan Selatan	183	266	214	349	549	212	164	209	183	246
20	Kalimantan Timur	210	326	203	350	547	217	164	215	156	242
21	Kalimantan Utara	55	108	60	96	139	49	43	57	38	55
22	Sulawesi Utara	209	230	184	320	465	183	150	183	150	204
23	Gorontalo	57	88	67	126	207	85	61	78	65	87
24	Sulawesi Tengah	189	306	220	355	525	193	167	202	146	263
25	Sulawesi Selatan	552	877	725	1,283	1,930	630	624	718	599	874
26	Sulawesi Barat	76	111	89	155	225	84	71	92	67	86
27	Sulawesi Tenggara	270	333	327	596	843	326	280	281	259	403
28	Maluku	250	371	303	455	645	295	208	262	222	303
29	Maluku Utara	174	183	162	223	359	122	117	127	100	192
30	Bali	157	322	249	474	682	232	213	278	377	315
31	Nusa Tenggara Barat	286	499	392	699	1,040	424	365	432	462	479
32	Nusa Tenggara Timur	472	765	600	1,127	1,546	592	454	603	544	610
33	Papua	206	311	207	311	456	183	160	179	156	226
34	Papua Barat	111	170	107	167	243	100	77	98	82	117
	Indonesia	12,689	19,060	14,688	25,240	39,101	14,879	12,286	14,954	14,218	17,206

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, Pend. Ag: pendidikan agama, PPKN: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, Sej. Ind: Sejarah Indonesia, Seni Bud: seni budaya, penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan

Berdasarkan Tabel 4.13, jumlah kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMA pada tingkat nasional sebesar 295.912. Walaupun sesuai dengan kebutuhan hanya 8 kelompok guru yang sama, namun pada kenyataannya jumlah guru yang ada sangat berbeda dengan perhitungan kebutuhan. Jumlah guru terbesar adalah guru matematika sebesar 39.101 dan terkecil guru bahasa dan sastra Indonesia dan antropologi masing-masing sebesar 187 dan 188. Jumlah guru matematika yang terbesar dan telah sesuai dengan kebutuhannya namun tetap berbeda dalam kuantitasnya. Jumlah guru biologi, fisika, kimia, geografi, sosiologi, ekonomoi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra asing, dan antropologi harusnya sama karena jam belajar menurut kurikulum sama, namun pada kenyataannya guru-

guru tersebut berbeda jumlahnya. Contoh ini sudah menunjukkan adanya kesenjangan guru yang ada.

Bila dilihat setiap provinsi maka kepala sekolah dan guru terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 32.824 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.064. Kondisi ini menunjukkan disparitas wilayah yang sangat besar antara kepala sekolah dan guru pada provinsi terbesar dan terkecil.

Tabel 4.13 lanjutan
Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Lanjutan Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada										Jumlah
		Fisika	Kimia	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	B&S Ind	&S Inggris	B&S Asing	ntropologi	B & P	
1	DKI Jakarta	590	581	439	436	664	10	724	307	1	411	10,683
2	Jawa Barat	1,684	1,751	1,212	1,243	1,916	8	2,568	916	10	938	32,602
3	Banten	456	482	376	387	574	2	779	234	0	236	9,326
4	Jawa Tengah	1377	1318	1057	966	1,478	14	1,948	565	19	1,126	25,418
5	DI Yogyakarta	245	231	168	153	247	0	320	74	1	203	4,316
6	Jawa Timur	1,798	1,705	1,275	1,224	1,935	17	2,531	851	21	1,178	32,824
7	Aceh	866	885	525	519	703	7	1,151	235	2	168	13,630
8	Sumatera Utara	1,191	1,243	725	763	1,218	11	1,766	430	4	327	20,678
9	Sumatera Barat	602	578	509	484	696	3	903	230	2	380	10,999
10	Riau	504	534	398	432	606	2	844	256	1	171	9,905
11	Kepulauan Riau	105	125	110	113	169	8	192	37	2	34	2,321
12	Jambi	261	283	199	226	310	5	421	80	1	121	5,132
13	Sumatera Selatan	673	662	550	564	749	7	1,076	351	1	237	13,277
14	Bangka Belitung	68	61	56	57	101	2	113	30	1	27	1,360
15	Bengkulu	176	213	154	152	231	0	262	99	0	70	3,505
16	Lampung	500	501	437	435	629	3	829	211	2	264	9,928
17	Kalimantan Barat	259	257	276	311	428	2	489	113	0	117	6,339
18	Kalimantan Tengah	201	211	170	198	277	2	339	45	3	61	4,161
19	Kalimantan Selatan	205	223	185	185	234	2	342	84	0	126	4,161
20	Kalimantan Timur	226	240	176	168	245	5	343	64	5	107	4,209
21	Kalimantan Utara	43	49	45	47	73	0	88	3	0	16	1,064
22	Sulawesi Utara	176	180	132	142	234	3	311	167	12	39	3,674
23	Gorontalo	80	86	69	68	91	0	111	29	0	39	1,494
24	Sulawesi Tengah	220	234	167	182	222	1	355	105	0	72	4,124
25	Sulawesi Selatan	788	803	524	579	747	16	1,201	317	5	301	14,093
26	Sulawesi Barat	82	88	64	65	92	2	129	45	1	17	1,641
27	Sulawesi Tenggara	353	368	247	287	411	5	544	114	1	95	6,343
28	Maluku	291	281	250	265	307	4	361	96	1	88	5,258
29	Maluku Utara	189	144	111	111	140	3	225	39	3	19	2,743
30	Bali	276	290	166	149	273	13	386	167	30	189	5,238
31	Nusa Tenggara Barat	387	405	307	349	420	7	664	228	16	215	8,076
32	Nusa Tenggara Timur	533	539	509	517	683	17	1,057	223	34	195	11,620
33	Papua	197	198	165	156	245	4	295	70	8	74	3,807
34	Papua Barat	101	100	76	88	113	2	164	29	1	17	1,963
	Indonesia	15,703	15,849	11,829	12,021	17,461	187	23,831	6,844	188	7,678	295,912

Kekurangan/kelebihan kepala sekolah dan guru SMA disajikan pada Tabel 4.14. Secara nasional, jumlah kepala sekolah dan guru SMA kekurangan sebesar 160.661, namun dilihat setiap jenis guru mata pelajaran ternyata kepala sekolah SMA telah sesuai, sedangkan 14 jenis guru mata pelajaran masih kekurangan guru dan 5 jenis guru mata pelajaran telah kelebihan, yaitu pendidikan agama, PPKn, bahasa

Indonesia, seni budaya, dan prakarya. Kekurangan terbesar terjadi pada guru bahasa dan sastra Indonesia sebesar 22.164, sedangkan kekurangan terkecil terjadi pada guru penjaskes sebesar 3.409. Kelebihan dan kekurangan guru ini adalah akibat dalam perencanaan guru tidak sesuai dengan kebutuhan guru yang diperlukan, data yang digunakan kurang valid atau kebijakan yang tidak memperhatikan data. Selain itu, akibat formasi guru yang ada belum sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 4.14
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru									
		Kepsek	Pend . Ag	PPKN	Bhs Ind	Matematika	Sej. Ind	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	Biologi
1	DKI Jakarta	0	72	50	-47	-377	-618	-39	-156	-14	-232
2	Jawa Barat	0	-313	82	-302	-1,537	-2,590	-201	-540	349	-806
3	Banten	0	-52	43	-78	-478	-790	-57	-186	-74	-271
4	Jawa Tengah	0	46	170	2	-694	-1,618	-75	-246	507	-470
5	DI Yogyakarta	0	52	41	2	-82	-265	13	-37	91	-52
6	Jawa Timur	0	-66	197	-48	-971	-2,296	-87	-375	333	-660
7	Aceh	0	221	220	270	252	-536	234	61	62	111
8	Sumatera Utara	0	158	212	64	-469	-1,556	-6	-343	-61	-282
9	Sumatera Barat	0	1	168	122	-31	-499	59	-61	107	-100
10	Riau	0	52	95	38	-141	-627	38	-74	81	-175
11	Kepulauan Riau	0	1	9	-6	-93	-163	-4	-40	-10	-61
12	Jambi	0	-11	45	52	-66	-286	34	-17	68	-73
13	Sumatera Selatan	0	2	128	189	-87	-764	145	-109	137	-173
14	Bangka Belitung	0	-6	-2	-20	-60	-105	-10	-32	-3	-43
15	Bengkulu	0	-15	28	47	-72	-182	20	-37	43	-23
16	Lampung	0	7	94	56	-147	-577	-8	-85	53	-163
17	Kalimantan Barat	0	94	37	-54	-273	-514	-19	-128	11	-232
18	Kalimantan Tengah	0	164	37	18	-109	-276	6	-42	7	-78
19	Kalimantan Selatan	0	9	43	6	-107	-272	-7	-48	12	-67
20	Kalimantan Timur	0	49	18	-20	-159	-304	-21	-62	-29	-95
21	Kalimantan Utara	0	42	16	7	-31	-76	-1	-9	-6	-26
22	Sulawesi Utara	0	-35	7	-34	-214	-319	-27	-82	-27	-121
23	Gorontalo	0	-21	-6	-19	-70	-119	-12	-31	-8	-45
24	Sulawesi Tengah	0	27	34	-17	-186	-332	-19	-77	-40	-76
25	Sulawesi Selatan	0	-37	116	64	-401	-1,092	15	-196	-10	-239
26	Sulawesi Barat	0	6	19	15	-43	-114	1	-13	-3	-42
27	Sulawesi Tenggara	0	-58	66	74	-155	-411	19	-110	-2	-73
28	Maluku	0	58	94	37	-156	-297	-1	-51	13	-80
29	Maluku Utara	0	12	48	-5	-78	-201	3	-44	-14	-17
30	Bali	0	-2	33	42	-144	-378	-3	-46	161	-79
31	Nusa Tenggara Barat	0	88	118	151	-9	-351	91	21	188	-22
32	Nusa Tenggara Timur	0	34	113	152	-321	-787	-33	-128	57	-282
33	Papua	0	69	46	-11	-161	-273	-1	-63	-5	-69
34	Papua Barat	0	49	27	6	-65	-128	-3	-23	2	-30
	Indonesia	0	697	2,446	753	-7,735	-19,716	44	-3,409	1,976	-5,146

Bila dilihat per provinsi, ternyata semua provinsi kekurangan guru SMA. Kekurangan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Barat sebesar 23.628 dan terkecil pada di Kalimantan Utara sebesar 589. Kekurangan lebih besar dari 10 ribu terjadi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebaliknya, kekurangan kurang dari seribu terjadi di dua provinsi, yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat.

Tabel 4.14 lanjutan
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Lanjutan Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru										Jumlah
		Fisika	Kimia	Geografi	Sosiologi	Ekonomi	B&S Ind	B&S Inggris	B&S Asing	Antropologi	B & P	
1	DKI Jakarta	-232	-241	-383	-386	-158	-812	-548	-515	-821	-624	-6,081
2	Jawa Barat	-1,056	-989	-1,528	-1,497	-824	-2,732	-1,677	-1,824	-2,730	-2,913	-23,628
3	Banten	-346	-320	-426	-415	-228	-800	-463	-568	-802	-869	-7,180
4	Jawa Tengah	-518	-577	-838	-929	-417	-1,881	-983	-1,330	-1,876	-1,347	-13,074
5	DI Yogyakarta	-61	-75	-138	-153	-59	-306	-152	-232	-305	-141	-1,859
6	Jawa Timur	-732	-825	-1,255	-1,306	-595	-2,513	-1,383	-1,679	-2,509	-2,093	-18,863
7	Aceh	70	89	-271	-277	-93	-789	-82	-561	-794	-728	-2,541
8	Sumatera Utara	-388	-336	-854	-816	-361	-1,568	-679	-1,149	-1,575	-1,920	-11,929
9	Sumatera Barat	-123	-147	-216	-241	-29	-722	-220	-495	-723	-529	-3,679
10	Riau	-211	-181	-317	-283	-109	-713	-263	-459	-714	-739	-4,702
11	Kepulauan Riau	-81	-61	-76	-73	-17	-178	-96	-149	-184	-197	-1,479
12	Jambi	-101	-79	-163	-136	-52	-357	-140	-282	-361	-324	-2,249
13	Sumatera Selatan	-254	-265	-377	-363	-178	-920	-359	-576	-926	-1,022	-5,772
14	Bangka Belitung	-49	-56	-61	-60	-16	-115	-69	-87	-116	-120	-1,030
15	Bengkulu	-69	-32	-91	-93	-14	-245	-117	-146	-245	-230	-1,473
16	Lampung	-211	-210	-274	-276	-82	-708	-273	-500	-709	-650	-4,663
17	Kalimantan Barat	-271	-273	-254	-219	-102	-528	-331	-417	-530	-590	-4,593
18	Kalimantan Tengah	-98	-88	-129	-101	-22	-297	-124	-254	-296	-266	-1,948
19	Kalimantan Selatan	-108	-90	-128	-128	-79	-311	-142	-229	-313	-256	-2,215
20	Kalimantan Timur	-111	-97	-161	-169	-92	-332	-178	-273	-332	-309	-2,677
21	Kalimantan Utara	-38	-32	-36	-34	-8	-81	-37	-78	-81	-80	-589
22	Sulawesi Utara	-149	-145	-193	-183	-91	-322	-191	-158	-313	-301	-2,898
23	Gorontalo	-52	-46	-63	-64	-41	-132	-93	-103	-132	-126	-1,183
24	Sulawesi Tengah	-119	-105	-172	-157	-117	-338	-170	-234	-339	-352	-2,789
25	Sulawesi Selatan	-325	-310	-589	-534	-366	-1,097	-521	-796	-1,108	-1,164	-8,590
26	Sulawesi Barat	-46	-40	-64	-63	-36	-126	-69	-83	-127	-146	-974
27	Sulawesi Tenggara	-123	-108	-229	-189	-65	-471	-193	-362	-475	-455	-3,320
28	Maluku	-92	-102	-133	-118	-76	-379	-231	-287	-382	-335	-2,518
29	Maluku Utara	-20	-65	-98	-98	-69	-206	-98	-170	-206	-195	-1,521
30	Bali	-118	-104	-228	-245	-121	-381	-224	-227	-364	-355	-2,783
31	Nusa Tenggara Barat	-114	-96	-194	-152	-81	-494	-111	-273	-485	-447	-2,172
32	Nusa Tenggara Timur	-359	-353	-383	-375	-209	-875	-322	-669	-858	-845	-6,443
33	Papua	-98	-97	-130	-139	-50	-291	-161	-225	-287	-272	-2,218
34	Papua Barat	-46	-47	-71	-59	-34	-145	-64	-118	-146	-133	-1,028
	Indonesia	-6,649	-6,503	-10,523	-10,331	-4,891	-22,165	-10,764	-15,508	-22,164	-21,073	-160,661

Berdasarkan Tabel 4.15 disajikan R-S/G SMA menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional, masih kekurangan guru SMA dengan nilai R- S/G kebutuhan sebesar 9,45 lebih kecil daripada yang ada sebesar 14,57. Dengan demikian, di semua provinsi ternyata kekurangan guru. Oleh karena itu, dengan menggunakan R-S/G sudah dapat diketahui secara makro kelebihan/kekurangan guru. Namun, bila diperlukan jumlahnya maka harus melalui penghitungan kebutuhan guru. Hasil penghitungan kepala sekolah dan guru SMA menggunakan R-S/G juga sesuai dengan perhitungan kebutuhan kepala sekolah dan guru SMA.

Tabel 4.15
Rasio Siswa dan Guru menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Siswa	KS+G		R-S/G berdasarkan		
			Kebutuhan	Yang Ada	Kebutuha	Yang Ada	Artinya
1	DKI Jakarta	155,240	16,764	10,683	9.26	14.53	KEKURANGAN
2	Jawa Barat	577,605	56,230	32,602	10.27	17.72	KEKURANGAN
3	Banten	165,794	16,506	9,326	10.04	17.78	KEKURANGAN
4	Jawa Tengah	370,935	38,492	25,418	9.64	14.59	KEKURANGAN
5	DI Yogyakarta	51,617	6,175	4,316	8.36	11.96	KEKURANGAN
6	Jawa Timur	490,630	51,687	32,824	9.49	14.95	KEKURANGAN
7	Aceh	134,325	16,171	13,630	8.31	9.86	KEKURANGAN
8	Sumatera Utara	337,011	32,607	20,678	10.34	16.30	KEKURANGAN
9	Sumatera Barat	136,361	14,678	10,999	9.29	12.40	KEKURANGAN
10	Riau	136,562	14,607	9,905	9.35	13.79	KEKURANGAN
11	Kepulauan Riau	34,636	3,800	2,321	9.11	14.92	KEKURANGAN
12	Jambi	66,728	7,381	5,132	9.04	13.00	KEKURANGAN
13	Sumatera Selatan	188,876	19,049	13,277	9.92	14.23	KEKURANGAN
14	Bangka Belitung	22,064	2,390	1,360	9.23	16.22	KEKURANGAN
15	Bengkulu	44,967	4,978	3,505	9.03	12.83	KEKURANGAN
16	Lampung	137,159	14,591	9,928	9.40	13.82	KEKURANGAN
17	Kalimantan Barat	106,006	10,932	6,339	9.70	16.72	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	49,016	6,109	4,161	8.02	11.78	KEKURANGAN
19	Kalimantan Selatan	57,344	6,376	4,161	8.99	13.78	KEKURANGAN
20	Kalimantan Timur	62,399	6,886	4,209	9.06	14.83	KEKURANGAN
21	Kalimantan Utara	14,357	1,653	1,064	8.69	13.49	KEKURANGAN
22	Sulawesi Utara	50,978	6,572	3,674	7.76	13.88	KEKURANGAN
23	Gorontalo	24,749	2,677	1,494	9.25	16.57	KEKURANGAN
24	Sulawesi Tengah	63,601	6,913	4,124	9.20	15.42	KEKURANGAN
25	Sulawesi Selatan	219,708	22,683	14,093	9.69	15.59	KEKURANGAN
26	Sulawesi Barat	24,386	2,615	1,641	9.33	14.86	KEKURANGAN
27	Sulawesi Tenggara	82,539	9,663	6,343	8.54	13.01	KEKURANGAN
28	Maluku	63,394	7,776	5,258	8.15	12.06	KEKURANGAN
29	Maluku Utara	32,041	4,264	2,743	7.51	11.68	KEKURANGAN
30	Bali	81,590	8,021	5,238	10.17	15.58	KEKURANGAN
31	Nusa Tenggara Barat	99,329	10,248	8,076	9.69	12.30	KEKURANGAN
32	Nusa Tenggara Timur	156,071	18,063	11,620	8.64	13.43	KEKURANGAN
33	Papua	51,905	6,025	3,807	8.61	13.63	KEKURANGAN
34	Papua Barat	22,484	2,991	1,963	7.52	11.45	KEKURANGAN
	Indonesia	4,312,407	456,573	295,912	9.45	14.57	KEKURANGAN

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kebutuhan kepala sekolah dan guru SMK dihitung dari jumlah sekolah, kelas, dan jam belajar kurikulum SMK, namun khusus mata pelajaran umum dan peminatan. Tabel 4.16 menunjukkan kebutuhan kepala sekolah dan guru SMK menurut mata pelajaran umum dan peminatan dari 9 bidang keahlian. Secara nasional, kebutuhan kepala sekolah dan guru SMK sebesar 381.602 yang terdiri dengan 7 jenis kelompok kepala sekolah dan guru, yaitu 1) kepala sekolah sebesar 12.659, 2) guru pendidikan agama dan penjaskes masing-masing sebesar 19.146, 3) guru bahasa Indonesia sebesar 25.530, 4) guru matematika sebesar 44.668, 5)

sejarah Indonesia sebesar 31.911, 6) guru program keahlian sebesar 148.576, dan 7) BP sebesar 28.902. Sesuai dengan besarnya sekolah maka kebutuhan terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 73.382 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 706. Kebutuhan yang lebih besar dari 20 ribu terjadi di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebaliknya, kebutuhan yang kurang dari 2.000 terjadi di 5 provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Tabel 4.16
Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas				Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru														
			X	XI	XII	Jumlah	Kepsek	Pend. Ag	PPKN	Bhs Ind	Matematika	Sej. Ind	s Inggris	Seni Bud	Penjaskes	Prakarya	Prg Keahlian	BP/BK	Jumlah		
1	DKI Jakarta	586	2,343	2,254	2,227	6,824	586	853	569	1,137	1,990	1,422	569	569	853	569	6,759	1,352	17,228		
2	Jawa Barat	2,515	10,796	9,610	8,910	29,316	2,515	3,665	2,443	4,886	8,551	6,108	2,443	2,443	3,665	2,443	28,198	6,022	73,382		
3	Banten	622	2,607	2,348	2,212	7,167	622	896	597	1,195	2,090	1,493	597	597	896	597	6,936	1,485	18,001		
4	Jawa Tengah	1,524	8,482	7,636	7,199	23,317	1,524	2,915	1,943	3,886	6,801	4,858	1,943	1,943	2,915	1,943	22,566	4,712	57,949		
5	DI Yogyakarta	218	1,097	1,030	1,039	3,166	218	396	264	528	923	660	264	264	396	264	3,139	542	7,858		
6	Jawa Timur	1,809	7,996	7,291	7,103	22,390	1,809	2,799	1,866	3,732	6,530	4,665	1,866	1,866	2,799	1,866	21,897	4,408	56,103		
7	Aceh	189	767	687	629	2,083	189	260	174	347	608	434	174	174	260	174	2,000	309	5,103		
8	Sumatera Utara	924	3,403	3,218	3,025	9,646	924	1,206	804	1,608	2,813	2,010	804	804	1,206	804	9,409	1,829	24,221		
9	Sumatera Barat	199	1,101	992	948	3,041	199	380	253	507	887	634	253	253	380	253	2,954	508	7,461		
10	Riau	262	1,172	1,063	992	3,227	262	403	269	538	941	672	269	269	403	269	3,119	536	7,950		
11	Kepulauan Riau	88	377	363	334	1,074	88	134	90	179	313	224	90	90	134	90	1,045	168	2,645		
12	Jambi	155	603	565	533	1,701	155	213	142	284	496	354	142	142	213	142	1,658	284	4,225		
13	Sumatera Selatan	264	1,193	1,069	951	3,213	264	402	268	536	937	669	268	268	402	268	3,063	624	7,969		
14	Bangka Belitung	54	276	244	228	748	54	94	62	125	218	156	62	62	94	62	720	142	1,851		
15	Bengkulu	85	379	351	319	1,049	85	131	87	175	306	219	87	87	131	87	1,011	164	2,570		
16	Lampung	410	1,592	1,412	1,268	4,272	410	534	356	712	1,246	890	356	356	534	356	4,074	791	10,615		
17	Kalimantan Barat	180	700	606	564	1,870	180	234	156	312	545	390	156	156	234	156	1,792	349	4,660		
18	Kalimantan Tengah	128	436	407	355	1,198	128	150	100	200	349	250	100	100	150	100	1,145	184	2,956		
19	Kalimantan Selatan	118	622	565	535	1,722	118	215	144	287	502	359	144	144	215	144	1,671	331	4,274		
20	Kalimantan Timur	207	910	864	835	2,609	207	326	217	435	761	544	217	217	326	217	2,564	459	6,490		
21	Kalimantan Utara	25	99	94	89	282	25	35	24	47	82	59	24	24	35	24	276	51	706		
22	Sulawesi Utara	172	793	726	660	2,179	172	272	182	363	636	454	182	182	272	182	2,096	311	5,304		
23	Gorontalo	51	286	258	233	777	51	97	65	130	227	162	65	65	97	65	744	123	1,891		
24	Sulawesi Tengah	167	630	561	537	1,728	167	216	144	288	504	360	144	144	216	144	1,676	252	4,255		
25	Sulawesi Selatan	414	1,764	1,662	1,613	5,039	414	630	420	840	1,470	1,050	420	420	630	420	4,951	811	12,476		
26	Sulawesi Barat	112	348	325	298	971	112	121	81	162	283	202	81	81	121	81	939	156	2,420		
27	Sulawesi Tenggara	138	515	467	430	1,412	138	177	118	235	412	294	118	118	177	118	1,360	191	3,456		
28	Maluku	103	322	294	276	892	103	112	74	149	260	186	74	74	112	74	865	109	2,192		
29	Maluku Utara	107	285	264	249	798	107	100	67	133	233	166	67	67	100	67	776	98	1,981		
30	Bali	168	932	888	904	2,724	168	341	227	454	795	568	227	227	341	227	2,714	555	6,844		
31	Nusa Tenggara Barat	261	840	802	740	2,382	261	298	199	397	695	496	199	199	298	199	2,317	405	5,963		
32	Nusa Tenggara Timur	245	980	858	771	2,609	245	326	217	435	761	544	217	217	326	217	2,483	404	6,392		
33	Papua	115	453	410	372	1,235	115	154	103	206	360	257	103	103	154	103	1,185	167	3,010		
34	Papua Barat	44	176	162	151	489	44	61	41	82	143	102	41	41	61	41	474	70	1,201		
	Indonesia	12,659	55,275	50,346	47,529	153,150	12,659	19,146	12,766	25,530	44,668	31,911	12,766	12,766	19,146	12,766	148,576	28,902	381,602		

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, Pend Ag: pendidikan agama, PPKN: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, Seni Bud: seni budaya, Penjaskes adalah pendidikan jasmani dan kesehatan, Prg Keahlian: program keahlian dan BP/BK: bimbingan penyuluhan/bimbingan karier.

Berdasarkan Tabel 4.17, jumlah kepala sekolah dan guru mata pelajaran SMK pada tingkat nasional sebesar 273.353. Walaupun sesuai dengan kebutuhan hanya 7 kelompok guru yang sama, namun pada kenyataannya guru yang ada sangat berbeda dan terbesar adalah guru program keahlian karena merupakan gabungan dari 9 jenis program yang terdiri dari bermacam mata pelajaran sebesar 162.144 dan terkecil guru sejarah Indonesia sebesar 2.355. Bila dilihat setiap provinsi maka kepala sekolah dan guru terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 43.878 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 667. Kondisi ini menunjukkan disparitas wilayah yang sangat besar antara kepala sekolah dan guru pada provinsi terbesar dan terkecil.

Tabel 4.17
Kepala Sekolah dan Guru yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada												
		Kepsek	Pend . Ag	PPKN	Bhs Ind	tematika	Sej. Ind	Bhs Ingg	Seni Bud	enjas kes	Prakarya	Prg Keahl	BP/BK	Jumlah
1	DKI Jakarta	586	478	420	481	678	88	573	288	339	165	6,165	130	10,391
2	Jawa Barat	2,515	2,011	1,703	2,267	2,849	497	2,363	1,125	1,642	743	25,874	289	43,878
3	Banten	622	481	374	511	654	84	582	275	340	137	5,751	73	9,884
4	Jawa Tengah	1,524	2,220	1,698	2,269	3,178	495	2,582	1,238	1,769	684	24,291	923	42,871
5	DI Yogyakarta	218	386	241	333	481	66	419	202	258	94	3,904	234	6,836
6	Jawa Timur	1,809	1,967	1,558	2,135	3,000	427	2,435	1,206	1,646	637	23,034	660	40,514
7	Aceh	189	241	169	267	335	51	288	193	189	74	3,387	61	5,444
8	Sumatera Utara	924	712	750	903	1,263	77	1,145	557	652	158	10,338	158	17,637
9	Sumatera Barat	199	299	189	285	419	42	398	172	215	55	4,413	90	6,776
10	Riau	262	294	225	279	390	35	335	166	231	48	3,847	28	6,140
11	Kepulauan Riau	88	70	59	72	99	11	76	48	52	13	1,035	4	1,627
12	Jambi	155	148	131	196	266	11	222	111	141	17	1,965	38	3,401
13	Sumatera Selatan	264	287	232	344	434	48	376	172	217	61	3,758	83	6,276
14	Bangka Belitung	54	71	58	82	109	18	101	45	66	29	744	8	1,385
15	Bengkulu	85	107	101	133	171	12	169	73	82	22	1,246	35	2,236
16	Lampung	410	410	288	414	563	48	533	240	311	69	4,594	91	7,971
17	Kalimantan Barat	180	164	127	146	226	6	177	102	116	9	2,080	24	3,357
18	Kalimantan Tengah	128	151	105	116	170	8	144	88	109	15	1,393	33	2,460
19	Kalimantan Selatan	118	151	103	151	217	22	183	88	111	52	1,962	52	3,210
20	Kalimantan Timur	207	229	160	222	294	52	254	140	175	84	2,562	34	4,413
21	Kalimantan Utara	25	23	18	18	31	4	20	12	14	6	484	12	667
22	Sulawesi Utara	172	114	142	174	204	20	207	106	130	33	2,061	18	3,381
23	Gorontalo	51	52	58	63	87	14	82	47	58	23	816	17	1,368
24	Sulawesi Tengah	167	118	118	117	154	9	146	80	97	11	1,998	13	3,028
25	Sulawesi Selatan	414	331	315	449	609	43	542	236	311	87	5,936	89	9,362
26	Sulawesi Barat	112	78	75	87	112	14	93	49	55	16	1,140	3	1,834
27	Sulawesi Tenggara	138	141	126	146	215	9	202	106	108	10	1,747	17	2,965
28	Maluku	103	59	73	82	93	3	88	53	58	4	1,495	7	2,118
29	Maluku Utara	107	69	62	76	84	8	83	41	50	9	975	4	1,568
30	Bali	168	241	162	241	268	73	229	131	171	89	3,134	116	5,023
31	Nusa Tenggara Barat	261	240	197	254	349	34	308	152	209	60	3,922	48	6,034
32	Nusa Tenggara Timur	245	215	216	269	315	7	325	137	191	16	3,949	32	5,917
33	Papua	115	96	86	102	123	9	109	67	63	15	1,559	8	2,352
34	Papua Barat	44	58	44	58	80	10	62	34	35	15	585	4	1,029
	Indonesia	12,659	12,712	10,383	13,742	18,520	2,355	15,851	7,780	10,211	3,560	162,144	3,436	273,353

Kelebihan/kekurangan kepala sekolah dan guru SMK disajikan pada Tabel 4.18. Secara nasional, jumlah kepala sekolah dan guru SMK kekurangan 108.249, namun dilihat setiap jenis guru mata pelajaran ternyata 9 jenis guru masih kekurangan dan dua jenis guru sudah kelebihan. Jumlah kepala sekolah SMK sudah sesuai, guru

bahasa Inggris dan program keahlian telah kelebihan masing-masing sebesar 3.085 dan 13.568, sedangkan guru pendidikan agama, PPKn, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, seni budaya, penjasokes, prakarya, dan BP/BK kekurangan masing-masing sebesar 6.434, 2.383, 11.788, 26.148, 29.556, 4.986, 8.935, 9.206, dan 25.466. Kekurangan terbesar terjadi pada sejarah Indonesia sebesar 29.556, sedangkan kekurangan terkecil terjadi pada guru PPKn sebesar 2.383.

Tabel 4.18
Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru												Jumlah
		Kepsek	Pend . Ag	PPKN	Bhs Ind	tematika	Sej. Ind	s Inggris	Seni Bud	enjasokes	Prakarya	Prg Keahi	BP/BK	
1	DKI Jakarta	0	-375	-149	-656	-1,312	-1,334	4	-281	-514	-404	-594	-1,222	-6,837
2	Jawa Barat	0	-1,654	-740	-2,619	-5,702	-5,611	-80	-1,318	-2,023	-1,700	-2,324	-5,733	-29,504
3	Banten	0	-415	-223	-684	-1,436	-1,409	-15	-322	-556	-460	-1,185	-1,412	-8,117
4	Jawa Tengah	0	-695	-245	-1,617	-3,623	-4,363	639	-705	-1,146	-1,259	1,725	-3,789	-15,078
5	DI Yogyakarta	0	-10	-23	-195	-442	-594	155	-62	-138	-170	765	-308	-1,022
6	Jawa Timur	0	-832	-308	-1,597	-3,530	-4,238	569	-660	-1,153	-1,229	1,137	-3,748	-15,589
7	Aceh	0	-19	-5	-80	-273	-383	114	19	-71	-100	1,387	-248	341
8	Sumatera Utara	0	-494	-54	-705	-1,550	-1,933	341	-247	-554	-646	929	-1,671	-6,584
9	Sumatera Barat	0	-81	-64	-222	-468	-592	145	-81	-165	-198	1,459	-418	-685
10	Riau	0	-109	-44	-259	-551	-637	66	-103	-172	-221	728	-508	-1,810
11	Kepulauan Riau	0	-64	-31	-107	-214	-213	-14	-42	-82	-77	-10	-164	-1,018
12	Jambi	0	-65	-11	-88	-230	-343	80	-31	-72	-125	307	-246	-824
13	Sumatera Selatan	0	-115	-36	-192	-503	-621	108	-96	-185	-207	695	-541	-1,693
14	Bangka Belitung	0	-23	-4	-43	-109	-138	39	-17	-28	-33	24	-134	-466
15	Bengkulu	0	-24	14	-42	-135	-207	82	-14	-49	-65	235	-129	-334
16	Lampung	0	-124	-68	-298	-683	-842	177	-116	-223	-287	520	-700	-2,644
17	Kalimantan Barat	0	-70	-29	-166	-319	-384	21	-54	-118	-147	288	-325	-1,303
18	Kalimantan Tengah	0	1	5	-84	-179	-242	44	-12	-41	-85	248	-151	-496
19	Kalimantan Selatan	0	-64	-41	-136	-285	-337	39	-56	-104	-92	291	-279	-1,064
20	Kalimantan Timur	0	-97	-57	-213	-467	-492	37	-77	-151	-133	-2	-425	-2,077
21	Kalimantan Utara	0	-12	-6	-29	-51	-55	-4	-12	-21	-18	208	-39	-39
22	Sulawesi Utara	0	-158	-40	-189	-432	-434	25	-76	-142	-149	-35	-293	-1,923
23	Gorontalo	0	-45	-7	-67	-140	-148	17	-18	-39	-42	72	-106	-523
24	Sulawesi Tengah	0	-98	-26	-171	-350	-351	2	-64	-119	-133	322	-239	-1,227
25	Sulawesi Selatan	0	-299	-105	-391	-861	-1,007	122	-184	-319	-333	985	-722	-3,114
26	Sulawesi Barat	0	-43	-6	-75	-171	-188	12	-32	-66	-65	201	-153	-586
27	Sulawesi Tenggara	0	-36	8	-89	-197	-285	84	-12	-69	-108	387	-174	-491
28	Maluku	0	-53	-1	-67	-167	-183	14	-21	-54	-70	630	-102	-74
29	Maluku Utara	0	-31	-5	-57	-149	-158	16	-26	-50	-58	199	-94	-413
30	Bali	0	-100	-65	-213	-527	-495	2	-96	-170	-138	420	-439	-1,821
31	Nusa Tenggara Barat	0	-58	-2	-143	-346	-462	109	-47	-89	-139	1,605	-357	71
32	Nusa Tenggara Timur	0	-111	-1	-166	-446	-537	108	-80	-135	-201	1,466	-372	-475
33	Papua	0	-58	-17	-104	-237	-248	6	-36	-91	-88	374	-159	-658
34	Papua Barat	0	-3	3	-24	-63	-92	21	-7	-26	-26	111	-66	-172
	Indonesia	0	-6,434	-2,383	-11,788	-26,148	-29,556	3,085	-4,986	-8,935	-9,206	13,568	-25,466	-108,249

Catatan: Kepsek: kepala sekolah, Pend Ag: pendidikan agama, PPKN: pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bhs Ind: bahasa Indonesia, Sej Ind: sejarah Indonesia, Bhs Inggris: bahasa Inggris, Seni Bud: seni budaya, Penjasokes: pendidikan jasmani dan kesehatan, Prg Keahlian: program keahlian, dan BP/BK: bimbingan penyuluhan/bimbingan karier.

Bila dilihat per provinsi, 32 provinsi masih kekurangan guru SMK. Kekurangan guru SMK terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 29.504 dan terkecil pada di

Kalimantan Utara sebesar 39. Sebaliknya, dua provinsi telah kelebihan guru SMK, yaitu Aceh sebesar 341 orang dan Nusa Tenggara Barat sebesar 71.

Tabel 4.19
Rasio Siswa dan Guru menurut Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Siswa	Kebutuhan	KS+G	R-S/G berdasarkan		
			KS+G	Yang Ada	Kebutuhan	Yang Ada	Artinya
1	DKI Jakarta	202,790	17,228	10,391	11.77	19.52	KEKURANGAN
2	Jawa Barat	903,343	73,382	43,878	12.31	20.59	KEKURANGAN
3	Banten	222,772	18,001	9,884	12.38	22.54	KEKURANGAN
4	Jawa Tengah	706,775	57,949	42,871	12.20	16.49	KEKURANGAN
5	DI Yogyakarta	81,297	7,858	6,836	10.35	11.89	KEKURANGAN
6	Jawa Timur	661,227	56,103	40,514	11.79	16.32	KEKURANGAN
7	Aceh	46,275	5,103	5,444	9.07	8.50	KELEBIHAN
8	Sumatera Utara	274,334	24,221	17,637	11.33	15.55	KEKURANGAN
9	Sumatera Barat	76,131	7,461	6,776	10.20	11.24	KEKURANGAN
10	Riau	80,469	7,950	6,140	10.12	13.11	KEKURANGAN
11	Kepulauan Riau	25,194	2,645	1,627	9.53	15.48	KEKURANGAN
12	Jambi	42,646	4,225	3,401	10.09	12.54	KEKURANGAN
13	Sumatera Selatan	93,648	7,969	6,276	11.75	14.92	KEKURANGAN
14	Bangka Belitung	21,307	1,851	1,385	11.51	15.38	KEKURANGAN
15	Bengkulu	24,589	2,570	2,236	9.57	11.00	KEKURANGAN
16	Lampung	118,664	10,615	7,971	11.18	14.89	KEKURANGAN
17	Kalimantan Barat	52,320	4,660	3,357	11.23	15.59	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	27,618	2,956	2,460	9.34	11.23	KEKURANGAN
19	Kalimantan Selatan	49,611	4,274	3,210	11.61	15.46	KEKURANGAN
20	Kalimantan Timur	68,775	6,490	4,413	10.60	15.58	KEKURANGAN
21	Kalimantan Utara	7,640	706	667	10.82	11.45	KEKURANGAN
22	Sulawesi Utara	46,607	5,304	3,381	8.79	13.78	KEKURANGAN
23	Gorontalo	18,471	1,891	1,368	9.77	13.50	KEKURANGAN
24	Sulawesi Tengah	37,733	4,255	3,028	8.87	12.46	KEKURANGAN
25	Sulawesi Selatan	121,575	12,476	9,362	9.74	12.99	KEKURANGAN
26	Sulawesi Barat	23,424	2,420	1,834	9.68	12.77	KEKURANGAN
27	Sulawesi Tenggara	28,666	3,456	2,965	8.29	9.67	KEKURANGAN
28	Maluku	16,279	2,192	2,118	7.43	7.69	KEKURANGAN
29	Maluku Utara	14,735	1,981	1,568	7.44	9.40	KEKURANGAN
30	Bali	83,255	6,844	5,023	12.16	16.57	KEKURANGAN
31	Nusa Tenggara Barat	60,804	5,963	6,034	10.20	10.08	KELEBIHAN
32	Nusa Tenggara Timur	60,537	6,392	5,917	9.47	10.23	KEKURANGAN
33	Papua	25,036	3,010	2,352	8.32	10.64	KEKURANGAN
34	Papua Barat	10,440	1,201	1,029	8.69	10.15	KEKURANGAN
	Indonesia	4,334,987	381,602	273,353	11.36	15.86	KEKURANGAN

Berdasarkan Tabel 4.19 disajikan R-S/G SMK menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional, masih kekurangan guru SMK dengan nilai R-S/G kebutuhan sebesar 11,36 lebih kecil daripada yang ada sebesar 15,86. Dengan demikian, terdapat kekurangan di 32 provinsi dan kelebihan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, dengan melihat R-S/G sudah dapat diketahui secara cepat kelebihan/kekurangan kepala sekolah dan guru. Hasil ini sesuai dengan perhitungan kebutuhan dan kelebihan/kekurangan kepala sekolah dan guru SMK.

6. Dikdasmen

Tabel 4.20 menunjukkan rangkuman dikdasmen yang terdiri dari sekolah, kelas, kebutuhan kepala sekolah dan guru, serta kepala sekolah dan guru yang ada. Jumlah sekolah dikdasmen sebesar 211.869, sehingga dibutuhkan kepala sekolah sebesar 211.869. Jumlah kelas 1.771.289 ditambah dengan kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK maka diperoleh kebutuhan kepala sekolah dan guru dikdasmen sebesar 3.220.146. Kepala sekolah dikdasmen yang ada sudah sesuai dengan sekolah yang ada, sedangkan guru dikdasmen yang ada sebesar 2.861.290 sehingga jumlahnya menjadi 3.073.159.

Tabel 4.20

Jumlah Sekolah, Kelas, Kebutuhan Kepala Sekolah dan Guru serta Kepala Sekolah dan Guru Yang Ada Tiap Provinsi, Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Sekolah	Kelas	Kebutuhan KS & Guru			KS & Guru yang Ada		
				Kepsek	Guru	Jumlah	Kepsek	Guru	Jumlah
1	DKI Jakarta	4,854	53,442	4,854	91,788	96,642	4,854	79,720	84,574
2	Jawa Barat	28,901	266,600	28,901	449,742	478,643	28,901	385,689	414,590
3	Banten	7,053	68,019	7,053	113,444	120,497	7,053	98,788	105,841
4	Jawa Tengah	24,846	206,410	24,846	355,602	380,448	24,846	332,771	357,617
5	DI Yogyakarta	2,727	24,544	2,727	42,274	45,001	2,727	42,175	44,902
6	Jawa Timur	27,409	222,068	27,409	381,601	409,010	27,409	369,897	397,306
7	Aceh	5,165	39,737	5,165	69,523	74,688	5,165	89,932	95,097
8	Sumatera Utara	13,938	114,733	13,938	195,871	209,809	13,938	188,891	202,829
9	Sumatera Barat	5,525	47,399	5,525	80,111	85,636	5,525	81,665	87,190
10	Riau	5,378	50,474	5,378	82,408	87,786	5,378	84,971	90,349
11	Kepulauan Riau	1,424	14,021	1,424	22,783	24,207	1,424	21,481	22,905
12	Jambi	3,439	27,425	3,439	45,695	49,134	3,439	46,324	49,763
13	Sumatera Selatan	6,738	59,857	6,738	99,922	106,660	6,738	102,420	109,158
14	Bangka Belitung	1,125	9,995	1,125	16,541	17,666	1,125	14,735	15,860
15	Bengkulu	1,996	16,739	1,996	28,158	30,154	1,996	28,386	30,382
16	Lampung	6,813	56,692	6,813	94,903	101,716	6,813	94,947	101,760
17	Kalimantan Barat	6,139	44,100	6,139	73,407	79,546	6,139	63,238	69,377
18	Kalimantan Tengah	3,761	24,838	3,761	41,657	45,418	3,761	39,872	43,633
19	Kalimantan Selatan	3,810	29,127	3,810	48,174	51,984	3,810	47,711	51,521
20	Kalimantan Timur	2,869	27,692	2,869	45,593	48,462	2,869	43,278	46,147
21	Kalimantan Utara	688	5,735	688	9,440	10,128	688	9,583	10,271
22	Sulawesi Utara	3,310	23,618	3,310	41,228	44,538	3,310	35,017	38,327
23	Gorontalo	1,361	10,162	1,361	17,366	18,727	1,361	15,628	16,989
24	Sulawesi Tengah	4,022	28,292	4,022	47,946	51,968	4,022	44,894	48,916
25	Sulawesi Selatan	9,001	73,558	9,001	126,262	135,263	9,001	124,975	133,976
26	Sulawesi Barat	1,851	13,213	1,851	22,063	23,914	1,851	21,256	23,107
27	Sulawesi Tenggara	3,460	26,681	3,460	45,843	49,303	3,460	44,312	47,772
28	Maluku	2,688	19,034	2,688	33,521	36,209	2,688	32,543	35,231
29	Maluku Utara	2,012	12,861	2,012	22,439	24,451	2,012	19,761	21,773
30	Bali	3,176	28,718	3,176	50,402	53,578	3,176	48,561	51,737
31	Nusa Tenggara Barat	4,560	35,189	4,560	60,122	64,682	4,560	71,422	75,982
32	Nusa Tenggara Timur	7,225	57,436	7,225	96,956	104,181	7,225	93,927	101,152
33	Papua	3,202	22,986	3,202	38,701	41,903	3,202	29,159	32,361
34	Papua Barat	1,403	9,894	1,403	16,791	18,194	1,403	13,361	14,764
	Indonesia	211,869	1,771,289	211,869	3,008,277	3,220,146	211,869	2,861,290	3,073,159

Tabel 4.21

Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru serta Rasio Siswa per Guru Berdasarkan Kebutuhan dan Yang Ada Tiap Provinsi, Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Kekurangan/Kelebihan KS+G			Siswa	Kebutuhan KS+G	KS+G		Rasio S/G		
		Kepsek	Guru	Jumlah			Yang Ada		Kebut	Yg Ada	Arti
1	DKI Jakarta	0	-12,068	-12,068	1,555,969	96,642	84,574		16.10	18.40	KEKURANGAN
2	Jawa Barat	0	-64,053	-64,053	7,852,058	478,643	414,590		16.40	18.94	KEKURANGAN
3	Banten	0	-14,656	-14,656	2,026,386	120,497	105,841		16.82	19.15	KEKURANGAN
4	Jawa Tengah	0	-22,831	-22,831	5,217,090	380,448	357,617		13.71	14.59	KEKURANGAN
5	DI Yogyakarta	0	-99	-99	559,355	45,001	44,902		12.43	12.46	KEKURANGAN
6	Jawa Timur	0	-11,704	-11,704	5,340,867	409,010	397,306		13.06	13.44	KEKURANGAN
7	Aceh	0	20,409	20,409	863,434	74,688	95,097		11.56	9.08	KELEBIHAN
8	Sumatera Utara	0	-6,980	-6,980	3,049,506	209,809	202,829		14.53	15.03	KEKURANGAN
9	Sumatera Barat	0	1,554	1,554	1,087,605	85,636	87,190		12.70	12.47	KELEBIHAN
10	Riau	0	2,563	2,563	1,274,057	87,786	90,349		14.51	14.10	KELEBIHAN
11	Kepulauan Riau	0	-1,302	-1,302	361,779	24,207	22,905		14.95	15.79	KEKURANGAN
12	Jambi	0	629	629	629,907	49,134	49,763		12.82	12.66	KELEBIHAN
13	Sumatera Selatan	0	2,498	2,498	1,576,133	106,660	109,158		14.78	14.44	KELEBIHAN
14	Bangka Belitung	0	-1,806	-1,806	260,841	17,666	15,860		14.77	16.45	KEKURANGAN
15	Bengkulu	0	228	228	378,311	30,154	30,382		12.55	12.45	KELEBIHAN
16	Lampung	0	44	44	1,419,299	101,716	101,760		13.95	13.95	KELEBIHAN
17	Kalimantan Barat	0	-10,169	-10,169	997,635	79,546	69,377		12.54	14.38	KEKURANGAN
18	Kalimantan Tengah	0	-1,785	-1,785	476,749	45,418	43,633		10.50	10.93	KEKURANGAN
19	Kalimantan Selatan	0	-463	-463	614,413	51,984	51,521		11.82	11.93	KEKURANGAN
20	Kalimantan Timur	0	-2,315	-2,315	699,377	48,462	46,147		14.43	15.16	KEKURANGAN
21	Kalimantan Utara	0	143	143	130,236	10,128	10,271		12.86	12.68	KELEBIHAN
22	Sulawesi Utara	0	-6,211	-6,211	476,997	44,538	38,327		10.71	12.45	KEKURANGAN
23	Gorontalo	0	-1,738	-1,738	227,668	18,727	16,989		12.16	13.40	KEKURANGAN
24	Sulawesi Tengah	0	-3,052	-3,052	595,266	51,968	48,916		11.45	12.17	KEKURANGAN
25	Sulawesi Selatan	0	-1,287	-1,287	1,708,142	135,263	133,976		12.63	12.75	KEKURANGAN
26	Sulawesi Barat	0	-807	-807	278,968	23,914	23,107		11.67	12.07	KEKURANGAN
27	Sulawesi Tenggara	0	-1,531	-1,531	575,713	49,303	47,772		11.68	12.05	KEKURANGAN
28	Maluku	0	-978	-978	406,540	36,209	35,231		11.23	11.54	KEKURANGAN
29	Maluku Utara	0	-2,678	-2,678	268,298	24,451	21,773		10.97	12.32	KEKURANGAN
30	Bali	0	-1,841	-1,841	768,171	53,578	51,737		14.34	14.85	KEKURANGAN
31	Nusa Tenggara Barat	0	11,300	11,300	857,111	64,682	75,982		13.25	11.28	KELEBIHAN
32	Nusa Tenggara Timur	0	-3,029	-3,029	1,351,386	104,181	101,152		12.97	13.36	KEKURANGAN
33	Papua	0	-9,542	-9,542	594,023	41,903	32,361		14.18	18.36	KEKURANGAN
34	Papua Barat	0	-3,430	-3,430	207,519	18,194	14,764		11.41	14.06	KEKURANGAN
	Indonesia	0	-146,987	-146,987	44,686,809	3,220,146	3,073,159		13.88	14.54	KEKURANGAN

Berdasarkan kebutuhan dan kepala sekolah dan guru dikdasmen yang ada pada Tabel 4.21 maka masih terjadi kekurangan guru dikdasmen sebesar 146.987. Bila dilihat setiap provinsi maka terjadi kelebihan guru di 9 provinsi dan kekurangan di 25 provinsi. Kelebihan guru dikdasmen terbesar terjadi di Aceh sebesar 20.409 dan terkecil di Lampung sebesar 44. Sebaliknya, kekurangan guru dikdasmen terbesar terjadi di Jawa Barat sebesar 64.053 dan terkecil di DI Yogyakarta sebesar 99.

Masih pada Tabel 4.21, dengan menggunakan siswa maka diperoleh R-S/G dikdasmen menurut kebutuhan dan yang ada. Secara nasional terjadi kekurangan guru dikdasmen karena R-S/G kebutuhan 13,38 lebih kecil daripada yang ada sebesar 14,54. Selain itu, juga diketahui kelebihan dan kekurangan guru dikdasmen namun tidak diketahui kuantitasnya. Bila diperlukan jumlahnya maka digunakan perhitungan kebutuhan, kekurangan/kelebihan guru dikdasmen.

B. Indikator Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan penjelasan pada metodologi maka analisis berdasarkan indikator SDM dirinci menurut penjumlahan kepala sekolah dan guru (KSG), kepala sekolah (KS), dan guru (G) yang terdiri dari SD, SLB, SMP, SMA, SMK, dan Dikdasmen. Berdasarkan data KSG yang dirinci menurut ijazah dapat dihitung %KSG layak, menurut jenis kelamin dapat dihitung %KSG perempuan, menurut status kepegawaian dapat dihitung %KSG tetap, menurut status PNS dapat dihitung %KSG PNS, dan menurut kelompok usia dapat dihitung %KSG pensiun.

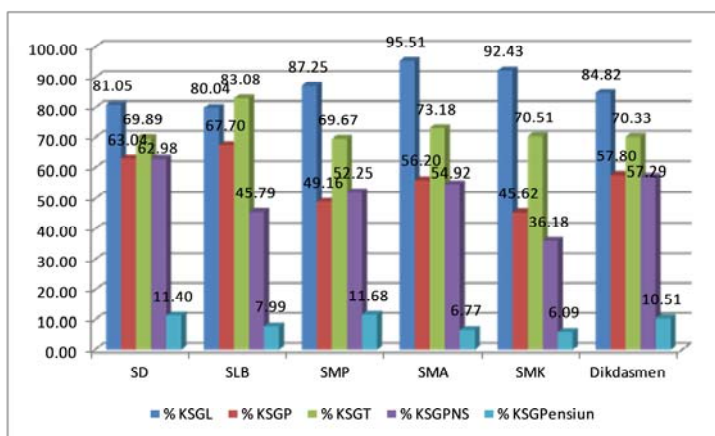
Tabel 4.22
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016

No.	Variabel	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Dikdasmen
1	Kepsek dan Guru	1,795,613	26,859	681,422	295,912	273,353	3,073,159
	a. Layak	1,455,349	21,499	594,554	282,612	252,669	2,606,683
	b. Perempuan	1,132,013	18,183	334,982	166,289	124,714	1,776,181
	c. Tetap	1,254,985	22,314	474,749	216,559	192,749	2,161,356
	d. PNS	1,130,879	12,299	356,069	162,512	98,896	1,760,655
	e. Pensiun	204,730	2,146	79,568	20,019	16,653	323,116
1A	Kepala Sekolah	147,536	1,962	37,023	12,689	12,659	211,869
	a. Layak	131,431	911	34,997	10,566	12,225	190,130
	b. Perempuan	58,803	754	8,342	5,921	2,323	76,143
	c. Tetap	147,536	1,962	37,023	12,689	12,659	211,869
	d. PNS	138,857	1,019	25,298	7,622	5,342	178,138
	e. Pensiun	33,777	106	2,358	738	2,335	39,314
1B	Guru	1,648,077	24,897	644,399	283,223	260,694	2,861,290
	a. Layak	1,323,918	20,588	559,557	272,046	240,444	2,416,553
	b. Perempuan	1,073,210	17,429	326,640	160,368	122,391	1,700,038
	c. Tetap	1,107,449	20,352	437,726	203,870	180,090	1,949,487
	d. PNS	992,022	11,280	330,771	154,890	93,554	1,582,517
	e. Pensiun	170,953	2,040	77,210	19,281	14,318	283,802
2	Indikator KS dan Guru						
	a. Layak	81.05	80.04	87.25	95.51	92.43	84.82
	b. Perempuan	63.04	67.70	49.16	56.20	45.62	57.80
	c. Tetap	69.89	83.08	69.67	73.18	70.51	70.33
	d. PNS	62.98	45.79	52.25	54.92	36.18	57.29
	e. Pensiun	11.40	7.99	11.68	6.77	6.09	10.51
2A	Indikator KS						
	a. Layak	89.08	46.43	94.53	83.27	96.57	89.74
	b. Perempuan	39.86	38.43	22.53	46.66	18.35	35.94
	c. Tetap	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d. PNS	94.12	51.94	68.33	60.07	42.20	84.08
	e. Pensiun	22.89	5.40	6.37	5.82	18.45	18.56
2B	Indikator Guru						
	a. Layak	80.33	82.69	86.83	96.05	92.23	84.46
	b. Perempuan	65.12	70.00	50.69	56.62	46.95	59.42
	c. Tetap	67.20	81.74	67.93	71.98	69.08	68.13
	d. PNS	60.19	45.31	51.33	54.69	35.89	55.31
	e. Pensiun	10.37	8.19	11.98	6.81	5.49	9.92

Berdasarkan Tabel 4.22 diketahui bahwa menurut ijazah, jenis kelamin, status tetap, status kepegawaian, dan usia maka dapat dihitung %KSGL, %KSGP, %KSGT, %KSGPNS, dan %KSGPen. Secara nasional, guru layak dari indikator %KSGL

dikdasmen sebesar 84,82% yang berarti masih terdapat 15,18% kepala sekolah dan guru yang perlu disetarakan. %KSGL terbesar pada SMA sebesar 95,51% dan terkecil pada SLB sebesar 80,04%. Guru perempuan dari indikator %KSGP dikdasmen sebesar 57,80% berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki yang mengajar maupun menjadi kepala sekolah, dengan rincian terbesar pada SLB sebesar 67,70% dan terkecil pada SMK sebesar 45,62%. Guru tetap dari indikator %KSGT dikdasmen sebesar 70,33% yang berarti masih terdapat 29,67% kepala sekolah dan guru yang tidak tetap dengan rincian terbesar pada SLB sebesar 83,08% dan terkecil pada SMP sebesar 69,67%. Selanjutnya, guru PNS dari indikator %KSGPNS dikdasmen sebesar 57,29% yang berarti terdapat 42,71% bukan PNS dengan rincian terbesar pada SD sebesar 62,98% dan terkecil pada SMK sebesar 36,18%. Guru pensiun dari indikator %KSGPen dikdasmen sebesar 10,51% dengan rincian terbesar pada SMP sebesar 11,68% dan terkecil pada SMK sebesar 6,09%.

Grafik 4.3
Indikator Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016



1. SD

Tabel 4.23 menunjukkan jumlah KS dan guru SD dengan indikator SDM berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS dan guru SD sebesar 1.795.613 orang, yang layak sebesar 1.455.349 orang, perempuan sebesar 1.132.013 orang, tetap sebesar 1.254.985 orang, dan PNS sebesar 1.130.879 orang, dan pensiun 204.730 orang.

Berdasarkan Tabel 4.23, secara nasional %KSGL SD sebesar 81,05% dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 89,93% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 46,62%. %KSGP SD sebesar 63,04% menunjukkan belum ada kesetaraan dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 78,72% yang berarti sudah lebih banyak perempuan dan terkecil di Papua sebesar 46,48%. %KSGT SD sebesar 69,89% berarti masih terdapat 30,11% guru dengan status tidak tetap dan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 83,74% dan terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebesar 59,09%. %KSGPNS SD sebesar 62,98% dan terbesar di Provinsi Maluku sebesar 81,33% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 45,61%. %KSPen SD sebesar 11,40% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 15,34% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 4,74%. Disparitas paling besar pada KS dan guru layak SD sebesar 43,32% dan paling kecil pada KS dan guru SD pensiun sebesar 10,61%.

Tabel 4.23
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	42,071	35,794	29,603	30,670	19,187	5,984	85.08	70.36	72.90	45.61	14.22
2	Jawa Barat	243,563	218,563	148,264	165,182	144,575	27,900	89.74	60.87	67.82	59.36	11.45
3	Banten	63,478	54,667	39,190	42,539	34,930	5,393	86.12	61.74	67.01	55.03	8.50
4	Jawa Tengah	209,876	188,751	124,237	149,026	138,104	31,234	89.93	59.20	71.01	65.80	14.88
5	DI Yogyakarta	22,649	19,814	14,446	17,567	14,359	3,475	87.48	63.78	77.56	63.40	15.34
6	Jawa Timur	234,198	210,602	134,777	163,336	144,388	35,405	89.92	57.55	69.74	61.65	15.12
7	Aceh	52,409	38,197	37,770	32,921	32,132	5,049	72.88	72.07	62.82	61.31	9.63
8	Sumatera Utara	119,654	85,753	88,289	87,878	73,823	14,755	71.67	73.79	73.44	61.70	12.33
9	Sumatera Barat	49,361	42,968	37,744	36,340	34,521	4,233	87.05	76.47	73.62	69.94	8.58
10	Riau	54,297	43,543	37,803	35,343	30,244	3,316	80.19	69.62	65.09	55.70	6.11
11	Kepulauan Riau	13,643	11,322	9,065	9,280	6,635	646	82.99	66.44	68.02	48.63	4.74
12	Jambi	30,232	21,880	19,132	21,904	20,784	3,444	72.37	63.28	72.45	68.75	11.39
13	Sumatera Selatan	64,366	48,518	44,542	43,396	41,249	6,034	75.38	69.20	67.42	64.09	9.37
14	Bangka Belitung	9,700	7,488	6,323	8,123	7,786	1,035	77.20	65.19	83.74	80.27	10.67
15	Bengkulu	17,019	13,407	10,535	12,762	12,105	1,974	78.78	61.90	74.99	71.13	11.60
16	Lampung	60,841	46,109	40,055	42,893	40,206	7,136	75.79	65.84	70.50	66.08	11.73
17	Kalimantan Barat	44,273	30,539	23,812	33,028	31,622	5,327	68.98	53.78	74.60	71.43	12.03
18	Kalimantan Tengah	27,432	20,759	16,612	22,015	20,462	1,950	75.67	60.56	80.25	74.59	7.11
19	Kalimantan Selatan	33,704	28,119	19,980	25,515	24,402	3,719	83.43	59.28	75.70	72.40	11.03
20	Kalimantan Timur	26,895	21,300	16,967	19,574	17,298	1,871	79.20	63.09	72.78	64.32	6.96
21	Kalimantan Utara	6,108	4,049	3,334	4,380	4,141	457	66.29	54.58	71.71	67.80	7.48
22	Sulawesi Utara	21,355	14,616	16,811	17,092	14,873	2,307	68.44	78.72	80.04	69.65	10.80
23	Gorontalo	9,666	7,959	7,276	6,528	6,434	685	82.34	75.27	67.54	66.56	7.09
24	Sulawesi Tengah	30,741	19,480	19,237	22,104	21,567	2,376	63.37	62.58	71.90	70.16	7.73
25	Sulawesi Selatan	78,847	66,329	54,778	51,091	49,135	6,776	84.12	69.47	64.80	62.32	8.59
26	Sulawesi Barat	14,586	9,498	8,772	8,782	8,686	976	65.12	60.14	60.21	59.55	6.69
27	Sulawesi Tenggara	26,670	19,784	16,717	17,144	16,868	2,255	74.18	62.68	64.28	63.25	8.46
28	Maluku	19,097	10,696	12,900	16,119	15,531	1,762	56.01	67.55	84.41	81.33	9.23
29	Maluku Utara	11,837	5,518	7,391	9,256	8,905	793	46.62	62.44	78.20	75.23	6.70
30	Bali	28,840	25,896	15,809	21,982	20,570	4,066	89.79	54.82	76.22	71.32	14.10
31	Nusa Tenggara Barat	43,467	34,673	22,829	25,683	24,415	5,319	79.77	52.52	59.09	56.17	12.24
32	Nusa Tenggara Timur	58,162	34,836	33,956	36,661	34,390	5,343	59.89	58.38	63.03	59.13	9.19
33	Papua	18,386	8,733	8,546	13,016	11,184	1,180	47.50	46.48	70.79	60.83	6.42
34	Papua Barat	8,190	5,189	4,511	5,855	5,368	555	63.36	55.08	71.49	65.54	6.78
	Indonesia	1,795,613	1,455,349	1,132,013	1,254,985	1,130,879	204,730	81.05	63.04	69.89	62.98	11.40

Catatan: KSG adalah kepala sekolah dan guru, KSL adalah KSG layak mengajar yang berijazah S1 atau Diploma 4 dan lebih tinggi, KSGP adalah KSG perempuan, KSGT adalah KSG tetap, KSGSPNS adalah KSG berstatus PNS, dan KSGPen adalah KSG yang pensiun.

Tabel 4.23A menunjukkan jumlah KS SD dengan indikator SDM berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS SD sebesar 147.536 orang, yang layak sebesar 131.431 orang, perempuan sebesar 58.803 orang, tetap sebesar 147.536 orang, dan PNS sebesar 138.857 orang, dan pensiun 33.777 orang.

Tabel 4.23A
Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	2,648	2,482	1,633	2,648	1,864	582	93.73	61.67	100.00	70.39	21.98
2	Jawa Barat	19,848	19,363	8,122	19,848	18,528	5,235	97.56	40.92	100.00	93.35	26.38
3	Banten	4,522	4,232	1,818	4,522	4,039	1,265	93.59	40.20	100.00	89.32	27.97
4	Jawa Tengah	19,087	18,639	7,381	19,087	18,289	4,578	97.65	38.67	100.00	95.82	23.98
5	DI Yogyakarta	1,840	1,792	828	1,840	1,650	448	97.39	45.00	100.00	89.67	24.35
6	Jawa Timur	19,362	18,952	6,844	19,362	17,961	5,970	97.88	35.35	100.00	92.76	30.83
7	Aceh	3,400	2,951	1,392	3,400	3,351	766	86.79	40.94	100.00	98.56	22.53
8	Sumatera Utara	9,528	7,312	5,317	9,528	8,442	2,475	76.74	55.80	100.00	88.60	25.98
9	Sumatera Barat	4,120	3,886	2,388	4,120	4,023	659	94.32	57.96	100.00	97.65	16.00
10	Riau	3,583	3,115	1,228	3,583	3,223	562	86.94	34.27	100.00	89.95	15.69
11	Kepulauan Riau	889	799	398	889	702	124	89.88	44.77	100.00	78.97	13.95
12	Jambi	2,433	1,976	896	2,433	2,351	434	81.22	36.83	100.00	96.63	17.84
13	Sumatera Selatan	4,629	4,107	2,398	4,629	4,388	564	88.72	51.80	100.00	94.79	12.18
14	Bangka Belitung	799	712	367	799	761	105	89.11	45.93	100.00	95.24	13.14
15	Bengkulu	1,355	1,201	440	1,355	1,311	219	88.63	32.47	100.00	96.75	16.16
16	Lampung	4,629	4,144	2,189	4,629	4,395	882	89.52	47.29	100.00	94.94	19.05
17	Kalimantan Barat	4,341	3,463	916	4,341	4,175	734	79.77	21.10	100.00	96.18	16.91
18	Kalimantan Tengah	2,600	2,278	865	2,600	2,464	235	87.62	33.27	100.00	94.77	9.04
19	Kalimantan Selatan	2,900	2,697	846	2,900	2,818	641	93.00	29.17	100.00	97.17	22.10
20	Kalimantan Timur	1,834	1,598	592	1,834	1,680	245	87.13	32.28	100.00	91.60	13.36
21	Kalimantan Utara	452	333	121	452	423	96	73.67	26.77	100.00	93.58	21.24
22	Sulawesi Utara	2,209	1,769	1,510	2,209	2,123	521	80.08	68.36	100.00	96.11	23.59
23	Gorontalo	927	834	540	927	919	144	89.97	58.25	100.00	99.14	15.53
24	Sulawesi Tengah	2,849	2,078	1,013	2,849	2,817	566	72.94	35.56	100.00	98.88	19.87
25	Sulawesi Selatan	6,357	5,975	2,976	6,357	6,223	1,262	93.99	46.81	100.00	97.89	19.85
26	Sulawesi Barat	1,311	1,123	420	1,311	1,300	194	85.66	32.04	100.00	99.16	14.80
27	Sulawesi Tenggara	2,287	1,843	676	2,287	2,262	450	80.59	29.56	100.00	98.91	19.68
28	Maluku	1,729	1,170	740	1,729	1,714	416	67.67	42.80	100.00	99.13	24.06
29	Maluku Utara	1,274	695	424	1,274	1,249	207	54.55	33.28	100.00	98.04	16.25
30	Bali	2,439	2,371	772	2,439	2,354	684	97.21	31.65	100.00	96.51	28.04
31	Nusa Tenggara Barat	3,143	2,905	621	3,143	3,013	964	92.43	19.76	100.00	95.86	30.67
32	Nusa Tenggara Timur	4,951	2,812	1,453	4,951	4,911	1,164	56.80	29.35	100.00	99.19	23.51
33	Papua	2,284	1,171	410	2,284	2,179	256	51.27	17.95	100.00	95.40	11.21
34	Papua Barat	977	653	269	977	955	130	66.84	27.53	100.00	97.75	13.31
	Indonesia	147,536	131,431	58,803	147,536	138,857	33,777	89.08	39.86	100.00	94.12	22.89

Catatan: KS adalah kepala sekolah, KSL adalah KS layak, KSP adalah KS perempuan, KST adalah KS tetap, dan KSPen adalah KS pensiun

Berdasarkan Tabel 4.23A, secara nasional %KSL SD sebesar 89,08% dan terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 97,88% dan terkecil di Papua sebesar 51,27%. %KSP SD sebesar 39,86% menunjukkan belum ada kesetaraan menjadi KS dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 68,36% dan terkecil di Papua sebesar 17,95%. %KST SD sebesar 100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS SD sebesar 94,12% dan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 99,19% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 70,39%. %KSPen SD sebesar 22,89% dan terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 30,83% dan terkecil di Kalimantan Tengah sebesar 9,04%.

Tabel 4.23B menunjukkan jumlah guru dengan indikator SDM berdasarkan 5 indikator. Secara nasional guru SD sebesar 1.648.077 orang, yang layak sebesar 1.323.918 orang, perempuan sebesar 1.073.210 orang, tetap sebesar 1.107.449 orang, dan PNS sebesar 992.022 orang, dan pensiun 170.953 orang.

Tabel 4.23B
Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	39,423	33,312	27,970	28,022	17,323	5,402	84.50	70.95	71.08	43.94	13.70
2	Jawa Barat	223,715	199,200	140,142	145,334	126,047	22,665	89.04	62.64	64.96	56.34	10.13
3	Banten	58,956	50,435	37,372	38,017	30,891	4,128	85.55	63.39	64.48	52.40	7.00
4	Jawa Tengah	190,789	170,112	116,856	129,939	119,815	26,656	89.16	61.25	68.11	62.80	13.97
5	DI Yogyakarta	20,809	18,022	13,618	15,727	12,709	3,027	86.61	65.44	75.58	61.07	14.55
6	Jawa Timur	214,836	191,650	127,933	143,974	126,427	29,435	89.21	59.55	67.02	58.85	13.70
7	Aceh	49,009	35,246	36,378	29,521	28,781	4,283	71.92	74.23	60.24	58.73	8.74
8	Sumatera Utara	110,126	78,441	82,972	78,350	65,381	12,280	71.23	75.34	71.15	59.37	11.15
9	Sumatera Barat	45,241	39,082	35,356	32,220	30,498	3,574	86.39	78.15	71.22	67.41	7.90
10	Riau	50,714	40,428	36,575	31,760	27,021	2,754	79.72	72.12	62.63	53.28	5.43
11	Kepulauan Riau	12,754	10,523	8,667	8,391	5,933	522	82.51	67.96	65.79	46.52	4.09
12	Jambi	27,799	19,904	18,236	19,471	18,433	3,010	71.60	65.60	70.04	66.31	10.83
13	Sumatera Selatan	59,737	44,411	42,144	38,767	36,861	5,470	74.34	70.55	64.90	61.71	9.16
14	Bangka Belitung	8,901	6,776	5,956	7,324	7,025	930	76.13	66.91	82.28	78.92	10.45
15	Bengkulu	15,664	12,206	10,095	11,407	10,794	1,755	77.92	64.45	72.82	68.91	11.20
16	Lampung	56,212	41,965	37,866	38,264	35,811	6,254	74.65	67.36	68.07	63.71	11.13
17	Kalimantan Barat	39,932	27,076	22,896	28,687	27,447	4,593	67.81	57.34	71.84	68.73	11.50
18	Kalimantan Tengah	24,832	18,481	15,747	19,415	17,998	1,715	74.42	63.41	78.19	72.48	6.91
19	Kalimantan Selatan	30,804	25,422	19,134	22,615	21,584	3,078	82.53	62.12	73.42	70.07	9.99
20	Kalimantan Timur	25,061	19,702	16,375	17,740	15,618	1,626	78.62	65.34	70.79	62.32	6.49
21	Kalimantan Utara	5,656	3,716	3,213	3,928	3,718	361	65.70	56.81	69.45	65.74	6.38
22	Sulawesi Utara	19,146	12,847	15,301	14,883	12,750	1,786	67.10	79.92	77.73	66.59	9.33
23	Gorontalo	8,739	7,125	6,736	5,601	5,515	541	81.53	77.08	64.09	63.11	6.19
24	Sulawesi Tengah	27,892	17,402	18,224	19,255	18,750	1,810	62.39	65.34	69.03	67.22	6.49
25	Sulawesi Selatan	72,490	60,354	51,802	44,734	42,912	5,514	83.26	71.46	61.71	59.20	7.61
26	Sulawesi Barat	13,275	8,375	8,352	7,471	7,386	782	63.09	62.92	56.28	55.64	5.89
27	Sulawesi Tenggara	24,383	17,941	16,041	14,857	14,606	1,805	73.58	65.79	60.93	59.90	7.40
28	Maluku	17,368	9,526	12,160	14,390	13,817	1,346	54.85	70.01	82.85	79.55	7.75
29	Maluku Utara	10,563	4,823	6,967	7,982	7,656	586	45.66	65.96	75.57	72.48	5.55
30	Bali	26,401	23,525	15,037	19,543	18,216	3,382	89.11	56.96	74.02	69.00	12.81
31	Nusa Tenggara Barat	40,324	31,768	22,208	22,540	21,402	4,355	78.78	55.07	55.90	53.08	10.80
32	Nusa Tenggara Timur	53,211	32,024	32,503	31,710	29,479	4,179	60.18	61.08	59.59	55.40	7.85
33	Papua	16,102	7,562	8,136	10,732	9,005	924	46.96	50.53	66.65	55.92	5.74
34	Papua Barat	7,213	4,536	4,242	4,878	4,413	425	62.89	58.81	67.63	61.18	5.89
	Indonesia	1,648,077	1,323,918	1,073,210	1,107,449	992,022	170,953	80.33	65.12	67.20	60.19	10.37

Catatan: GL adalah guru layak, GP adalah guru perempuan, GT adalah guru tetap, dan Gpen adalah guru pensiun

Berdasarkan Tabel 4.23B, secara nasional, %GL SD sebesar 80,33% dengan terbesar terjadi di Jawa Timur sebesar 89,21% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 45,66%. %GP SD sebesar 65,12% berarti sudah lebih banyak perempuan yang menjadi guru, dengan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 79,92% dan terkecil di Papua sebesar 50,53%. %GT SD sebesar 67,20% dengan terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 82,85% dan terkecil terjadi di Sulawesi Barat sebesar 56,28%. %GPNS SD sebesar 60,19% dengan rincian terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 79,55% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 43,94%. %Gpen SD sebesar 10,37% dengan rincian terbesar terjadi di Provinsi Yogyakarta sebesar 14,55% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 4,09%.

2. SLB

Tabel 4.24 menunjukkan jumlah KS dan guru serta indikator SDM SLB berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS dan guru SLB sebesar 26.859 orang, yang layak sebesar 21.499 orang, perempuan sebesar 18.183 orang, tetap sebesar 22.314 orang, PNS sebesar 12.299 orang, dan pensiun sebesar 2.146 orang.

Tabel 4.24
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSGSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSGSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	1,265	1,030	870	1,143	599	187	81.42	68.77	90.36	47.35	14.78
2	Jawa Barat	4,874	4,186	3,127	4,445	2,061	296	85.88	64.16	91.20	42.29	6.07
3	Banten	1,099	814	760	981	301	21	74.07	69.15	89.26	27.39	1.91
4	Jawa Tengah	3,007	2,509	1,934	2,537	1,593	486	83.44	64.32	84.37	52.98	16.16
5	DI Yogyakarta	1,420	1,265	928	1,386	856	281	89.08	65.35	97.61	60.28	19.79
6	Jawa Timur	3,955	3,282	2,661	3,541	1,683	274	82.98	67.28	89.53	42.55	6.93
7	Aceh	688	503	495	402	253	43	73.11	71.95	58.43	36.77	6.25
8	Sumatera Utara	700	533	534	542	364	43	76.14	76.29	77.43	52.00	6.14
9	Sumatera Barat	1,414	1,098	1,109	1,257	576	35	77.65	78.43	88.90	40.74	2.48
10	Riau	516	386	372	373	168	15	74.81	72.09	72.29	32.56	2.91
11	Kepulauan Riau	191	152	151	145	39	4	79.58	79.06	75.92	20.42	2.09
12	Jambi	294	241	198	157	142	14	81.97	67.35	53.40	48.30	4.76
13	Sumatera Selatan	492	399	348	356	215	44	81.10	70.73	72.36	43.70	8.94
14	Bangka Belitung	157	87	110	107	104	11	55.41	70.06	68.15	66.24	7.01
15	Bengkulu	271	199	186	171	137	32	73.43	68.63	63.10	50.55	11.81
16	Lampung	372	243	244	265	170	17	65.32	65.59	71.24	45.70	4.57
17	Kalimantan Barat	206	146	133	147	96	17	70.87	64.56	71.36	46.60	8.25
18	Kalimantan Tengah	248	215	170	161	143	25	86.69	68.55	64.92	57.66	10.08
19	Kalimantan Selatan	514	421	348	376	250	33	81.91	67.70	73.15	48.64	6.42
20	Kalimantan Timur	379	301	261	280	143	15	79.42	68.87	73.88	37.73	3.96
21	Kalimantan Utara	50	29	34	26	26	0	58.00	68.00	52.00	52.00	0.00
22	Sulawesi Utara	265	203	193	221	125	16	76.60	72.83	83.40	47.17	6.04
23	Gorontalo	184	153	138	87	87	4	83.15	75.00	47.28	47.28	2.17
24	Sulawesi Tengah	234	154	161	155	138	15	65.81	68.80	66.24	58.97	6.41
25	Sulawesi Selatan	1,187	880	858	1,004	657	56	74.14	72.28	84.58	55.35	4.72
26	Sulawesi Barat	227	136	151	110	77	3	59.91	66.52	48.46	33.92	1.32
27	Sulawesi Tenggara	563	356	379	448	178	15	63.23	67.32	79.57	31.62	2.66
28	Maluku	159	97	126	102	95	8	61.01	79.25	64.15	59.75	5.03
29	Maluku Utara	198	132	148	132	127	9	66.67	74.75	66.67	64.14	4.55
30	Bali	406	369	231	342	321	72	90.89	56.90	84.24	79.06	17.73
31	Nusa Tenggara Barat	634	486	375	505	220	32	76.66	59.15	79.65	34.70	5.05
32	Nusa Tenggara Timur	554	395	364	308	267	13	71.30	65.70	55.60	48.19	2.35
33	Papua	104	74	61	80	75	7	71.15	58.65	76.92	72.12	6.73
34	Papua Barat	32	25	25	22	13	3	78.13	78.13	68.75	40.63	9.38
	Indonesia	26,859	21,499	18,183	22,314	12,299	2,146	80.04	67.70	83.08	45.79	7.99

Berdasarkan Tabel 4.24, secara nasional %KSGSL SLB sebesar 80,04% yang berarti masih terdapat 19,96% KS dan guru SLB belum layak atau perlu disetarakan, %KSGSL terbesar di Provinsi Bali sebesar 90,89% dan terkecil di Bangka Belitung sebesar 55,41%. %KSGP SLB sebesar 67,70% yang berarti KS dan guru perempuan masih lebih banyak dan terbesar di Provinsi Maluku sebesar 79,25% dan terkecil di Bali sebesar 56,90%. %KSGT SLB sebesar 83,08% dan terbesar di DI Yogyakarta sebesar 97,61% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 52,00%. %KSGPNS SLB sebesar 45,79% dan terbesar di Provinsi Bali sebesar 79,06% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 20,42%. %KSGPen SLB sebesar 7,99% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta

sebesar 19,79% dan terkecil di Banten sebesar 1,91%, sedangkan Kalimantan Utara tidak memiliki KS dan guru yang akan pensiun. Perbedaan antara nilai yang terbesar dan terkecil dari 5 indikator tersebut menunjukkan disparitas antarprovinsi. Disparitas paling besar pada KS dan guru PNS SLB sebesar 58,65% dan paling kecil pada KS dan guru SLB pensiun sebesar 19,79%.

Tabel 4.24A menunjukkan jumlah KS dan indikator SDM SLB berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS SLB sebesar 1.962 orang, yang layak sebesar 911 orang, perempuan sebesar 754 orang, tetap sebesar 1.962 orang, PNS sebesar 1.019 orang, dan pensiun 106 orang.

Tabel 4.24A
Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	87	35	28	87	42	9	40.23	32.18	100.00	48.28	10.34
2	Jawa Barat	353	144	128	353	150	14	40.79	36.26	100.00	42.49	3.97
3	Banten	78	35	23	78	19	1	44.87	29.49	100.00	24.36	1.28
4	Jawa Tengah	167	79	67	167	98	21	47.31	40.12	100.00	58.68	12.57
5	DI Yogyakarta	76	32	28	76	39	11	42.11	36.84	100.00	51.32	14.47
6	Jawa Timur	401	165	135	401	192	22	41.15	33.67	100.00	47.88	5.49
7	Aceh	52	29	23	52	31	3	55.77	44.23	100.00	59.62	5.77
8	Sumatera Utara	46	27	22	46	31	2	58.70	47.83	100.00	67.39	4.35
9	Sumatera Barat	135	49	34	135	55	2	36.30	25.19	100.00	40.74	1.48
10	Riau	38	22	15	38	15	2	57.89	39.47	100.00	39.47	5.26
11	Kepulauan Riau	12	5	4	12	4	0	41.67	33.33	100.00	33.33	0.00
12	Jambi	14	10	8	14	13	0	71.43	57.14	100.00	92.86	0.00
13	Sumatera Selatan	28	15	12	28	18	2	53.57	42.86	100.00	64.29	7.14
14	Bangka Belitung	9	4	5	9	8	0	44.44	55.56	100.00	88.89	0.00
15	Bengkulu	15	9	9	15	13	2	60.00	60.00	100.00	86.67	13.33
16	Lampung	20	10	9	20	13	1	50.00	45.00	100.00	65.00	5.00
17	Kalimantan Barat	18	9	9	18	14	1	50.00	50.00	100.00	77.78	5.56
18	Kalimantan Tengah	20	16	12	20	18	1	80.00	60.00	100.00	90.00	5.00
19	Kalimantan Selatan	31	18	16	31	19	2	58.06	51.61	100.00	61.29	6.45
20	Kalimantan Timur	29	15	10	29	11	0	51.72	34.48	100.00	37.93	0.00
21	Kalimantan Utara	4	2	3	4	4	0	50.00	75.00	100.00	100.00	0.00
22	Sulawesi Utara	22	10	6	22	12	1	45.45	27.27	100.00	54.55	4.55
23	Gorontalo	8	6	6	8	8	0	75.00	75.00	100.00	100.00	0.00
24	Sulawesi Tengah	18	10	10	18	15	1	55.56	55.56	100.00	83.33	5.56
25	Sulawesi Selatan	79	42	33	79	44	2	53.16	41.77	100.00	55.70	2.53
26	Sulawesi Barat	21	10	10	21	13	0	47.62	47.62	100.00	61.90	0.00
27	Sulawesi Tenggara	53	26	20	53	24	2	49.06	37.74	100.00	45.28	3.77
28	Maluku	12	8	8	12	11	0	66.67	66.67	100.00	91.67	0.00
29	Maluku Utara	13	7	8	13	13	0	53.85	61.54	100.00	100.00	0.00
30	Bali	16	12	9	16	14	1	75.00	56.25	100.00	87.50	6.25
31	Nusa Tenggara Barat	39	21	19	39	18	2	53.85	48.72	100.00	46.15	5.13
32	Nusa Tenggara Timur	34	21	18	34	28	0	61.76	52.94	100.00	82.35	0.00
33	Papua	10	6	5	10	9	0	60.00	50.00	100.00	90.00	0.00
34	Papua Barat	4	2	2	4	3	1	50.00	50.00	100.00	75.00	25.00
	Indonesia	1,962	911	754	1,962	1,019	106	46.43	38.43	100.00	51.94	5.40

Berdasarkan Tabel 4.24A, secara nasional %KSL SLB sebesar 46,43% yang berarti masih terdapat 53,57% KS SLB belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 80,00% dan terkecil di Sumatera Barat sebesar 36,30%. %KSP SLB sebesar 38,43% menunjukkan belum ada kesetaraan menjadi KS di SLB dan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dan Gorontalo masing-masing sebesar 75,00% dan terkecil di Sumatera Barat sebesar 25,19%. %KST SLB sebesar

100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS SLB sebesar 51,94% dan terbesar di Provinsi Jambi sebesar 92,86% dan terkecil di Banten sebesar 24,36%, sedangkan Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara semua KS adalah PNS. %KSPen SLB sebesar 5,40% dan terbesar di Provinsi Papua Barat sebesar 25,00% dan terkecil di Banten sebesar 1,28%, sedangkan 11 provinsi tidak memiliki KS yang akan pensiun, berarti banyak KS yang usianya masih muda.

Tabel 4.24B menunjukkan jumlah guru dan indikator SDM SLB berdasarkan 5 indikator. Secara nasional guru SLB sebesar 24.897 orang, yang layak sebesar 20.588 orang, perempuan sebesar 17.429 orang, tetap sebesar 20.352 orang, PNS sebesar 11.280 orang, dan pensiun 2.040 orang.

Tabel 4.24B
Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	1,178	995	842	1,056	557	178	84.47	71.48	89.64	47.28	15.11
2	Jawa Barat	4,521	4,042	2,999	4,092	1,911	282	89.40	66.33	90.51	42.27	6.24
3	Banten	1,021	779	737	903	282	20	76.30	72.18	88.44	27.62	1.96
4	Jawa Tengah	2,840	2,430	1,867	2,370	1,495	465	85.56	65.74	83.45	52.64	16.37
5	DI Yogyakarta	1,344	1,233	900	1,310	817	270	91.74	66.96	97.47	60.79	20.09
6	Jawa Timur	3,554	3,117	2,526	3,140	1,491	252	87.70	71.07	88.35	41.95	7.09
7	Aceh	636	474	472	350	222	40	74.53	74.21	55.03	34.91	6.29
8	Sumatera Utara	654	506	512	496	333	41	77.37	78.29	75.84	50.92	6.27
9	Sumatera Barat	1,279	1,049	1,075	1,122	521	33	82.02	84.05	87.72	40.73	2.58
10	Riau	478	364	357	335	153	13	76.15	74.69	70.08	32.01	2.72
11	Kepulauan Riau	179	147	147	133	35	4	82.12	82.12	74.30	19.55	2.23
12	Jambi	280	231	190	143	129	14	82.50	67.86	51.07	46.07	5.00
13	Sumatera Selatan	464	384	336	328	197	42	82.76	72.41	70.69	42.46	9.05
14	Bangka Belitung	148	83	105	98	96	11	56.08	70.95	66.22	64.86	7.43
15	Bengkulu	256	190	177	156	124	30	74.22	69.14	60.94	48.44	11.72
16	Lampung	352	233	235	245	157	16	66.19	66.76	69.60	44.60	4.55
17	Kalimantan Barat	188	137	124	129	82	16	72.87	65.96	68.62	43.62	8.51
18	Kalimantan Tengah	228	199	158	141	125	24	87.28	69.30	61.84	54.82	10.53
19	Kalimantan Selatan	483	403	332	345	231	31	83.44	68.74	71.43	47.83	6.42
20	Kalimantan Timur	350	286	251	251	132	15	81.71	71.71	71.71	37.71	4.29
21	Kalimantan Utara	46	27	31	22	22	0	58.70	67.39	47.83	47.83	0.00
22	Sulawesi Utara	243	193	187	199	113	15	79.42	76.95	81.89	46.50	6.17
23	Gorontalo	176	147	132	79	79	4	83.52	75.00	44.89	44.89	2.27
24	Sulawesi Tengah	216	144	151	137	123	14	66.67	69.91	63.43	56.94	6.48
25	Sulawesi Selatan	1,108	838	825	925	613	54	75.63	74.46	83.48	55.32	4.87
26	Sulawesi Barat	206	126	141	89	64	3	61.17	68.45	43.20	31.07	1.46
27	Sulawesi Tenggara	510	330	359	395	154	13	64.71	70.39	77.45	30.20	2.55
28	Maluku	147	89	118	90	84	8	60.54	80.27	61.22	57.14	5.44
29	Maluku Utara	185	125	140	119	114	9	67.57	75.68	64.32	61.62	4.86
30	Bali	390	357	222	326	307	71	91.54	56.92	83.59	78.72	18.21
31	Nusa Tenggara Barat	595	465	356	466	202	30	78.15	59.83	78.32	33.95	5.04
32	Nusa Tenggara Timur	520	374	346	274	239	13	71.92	66.54	52.69	45.96	2.50
33	Papua	94	68	56	70	66	7	72.34	59.57	74.47	70.21	7.45
34	Papua Barat	28	23	23	18	10	2	82.14	82.14	64.29	35.71	7.14
	Indonesia	24,897	20,588	17,429	20,352	11,280	2,040	82.69	70.00	81.74	45.31	8.19

Berdasarkan Tabel 4.24B, secara nasional %GL SLB sebesar 82,69% yang berarti masih terdapat 17,31% guru SLB belum layak mengajar atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,74% dan terkecil di Bangka Belitung sebesar 56,08%. %GP SLB sebesar 70,00% berarti guru perempuan sudah lebih banyak daripada guru laki-laki dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar

84,05% menunjukkan dominasi guru perempuan dan terkecil di Bali sebesar 56,92%. %GT SLB sebesar 81,74% dan terbesar di DI Yogyakarta sebesar 97,47% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 47,83%. %GPNS SLB sebesar 45,31% dan terbesar di Provinsi Papua sebesar 70,21% dan terkecil di Banten sebesar 27,62%. %GPen SLB sebesar 8,19% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 20,09% dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 1,46%, sedangkan Kalimantan Utara tidak memiliki guru yang akan pensiun.

3. SMP

Tabel 4.25 menunjukkan jumlah KS dan guru SMP serta indikator SDM SMP berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS dan guru SMP sebesar 681.422 orang, yang layak sebesar 594.554 orang, perempuan sebesar 334.982 orang, tetap sebesar 474.749 orang, PNS sebesar 356.069 orang, dan pensiun 79.568 orang.

Tabel 4.25
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	20,164	17,490	10,117	15,196	8,023	4,048	86.74	50.17	75.36	39.79	20.08
2	Jawa Barat	89,673	78,795	44,148	62,424	37,489	8,236	87.87	49.23	69.61	41.81	9.18
3	Banten	22,054	18,888	10,950	15,405	7,989	1,210	85.64	49.65	69.85	36.22	5.49
4	Jawa Tengah	76,445	70,054	37,160	59,461	46,222	9,912	91.64	48.61	77.78	60.46	12.97
5	DI Yogyakarta	9,681	8,499	4,525	7,759	6,275	2,173	87.79	46.74	80.15	64.82	22.45
6	Jawa Timur	85,815	78,320	41,389	71,033	45,615	11,167	91.27	48.23	82.77	53.16	13.01
7	Aceh	22,926	19,724	11,917	13,667	12,762	3,075	86.03	51.98	59.61	55.67	13.41
8	Sumatera Utara	44,160	37,740	21,529	32,013	22,007	6,753	85.46	48.75	72.49	49.83	15.29
9	Sumatera Barat	18,640	16,048	9,498	13,453	12,586	4,665	86.09	50.95	72.17	67.52	25.03
10	Riau	19,491	16,662	9,909	11,669	9,054	2,195	85.49	50.84	59.87	46.45	11.26
11	Kepulauan Riau	5,123	4,443	2,609	3,198	2,309	358	86.73	50.93	62.42	45.07	6.99
12	Jambi	10,704	9,391	5,274	6,533	5,968	1,146	87.73	49.27	61.03	55.75	10.71
13	Sumatera Selatan	24,747	21,340	12,534	13,588	11,393	2,512	86.23	50.65	54.91	46.04	10.15
14	Bangka Belitung	3,258	2,802	1,631	2,179	1,996	200	86.00	50.06	66.88	61.26	6.14
15	Bengkulu	7,351	6,468	3,550	4,570	4,324	586	87.99	48.29	62.17	58.82	7.97
16	Lampung	22,648	18,776	11,226	16,640	11,623	2,612	82.90	49.57	73.47	51.32	11.53
17	Kalimantan Barat	15,202	12,407	7,216	9,074	7,587	1,141	81.61	47.47	59.69	49.91	7.51
18	Kalimantan Tengah	9,332	8,317	4,504	6,688	5,928	642	89.12	48.26	71.67	63.52	6.88
19	Kalimantan Selatan	9,932	9,054	4,793	7,288	6,843	1,244	91.16	48.26	73.38	68.90	12.53
20	Kalimantan Timur	10,251	9,107	5,079	6,774	5,277	796	88.84	49.55	66.08	51.48	7.77
21	Kalimantan Utara	2,382	2,078	1,096	1,506	1,414	73	87.24	46.01	63.22	59.36	3.06
22	Sulawesi Utara	9,652	7,632	4,874	7,337	6,511	2,306	79.07	50.50	76.02	67.46	23.89
23	Gorontalo	4,277	3,768	2,224	2,965	2,948	772	88.10	52.00	69.32	68.93	18.05
24	Sulawesi Tengah	10,789	9,526	5,294	6,814	6,438	943	88.29	49.07	63.16	59.67	8.74
25	Sulawesi Selatan	30,487	27,354	15,130	20,641	18,187	3,801	89.72	49.63	67.70	59.65	12.47
26	Sulawesi Barat	4,819	3,965	2,343	2,597	2,397	293	82.28	48.62	53.89	49.74	6.08
27	Sulawesi Tenggara	11,231	10,069	5,483	7,229	6,962	553	89.65	48.82	64.37	61.99	4.92
28	Maluku	8,599	6,001	4,248	5,606	5,265	1,295	69.79	49.40	65.19	61.23	15.06
29	Maluku Utara	5,427	4,364	2,680	3,176	2,897	195	80.41	49.38	58.52	53.38	3.59
30	Bali	12,230	10,707	5,940	8,330	7,150	1,876	87.55	48.57	68.11	58.46	15.34
31	Nusa Tenggara Barat	17,771	15,523	8,675	9,892	7,513	795	87.35	48.82	55.66	42.28	4.47
32	Nusa Tenggara Timur	24,899	19,993	12,084	12,748	10,614	1,424	80.30	48.53	51.20	42.63	5.72
33	Papua	7,712	6,108	3,622	4,845	4,233	364	79.20	46.97	62.82	54.89	4.72
34	Papua Barat	3,550	3,141	1,731	2,451	2,270	207	88.48	48.76	69.04	63.94	5.83
	Indonesia	681,422	594,554	334,982	474,749	356,069	79,568	87.25	49.16	69.67	52.25	11.68

Berdasarkan Tabel 4.25, secara nasional %KSGL SMP sebesar 87,25% yang berarti masih terdapat 12,75% KS dan guru SMP yang belum layak mengajar atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,64% dan terkecil di Maluku sebesar 69,79%. %KSGP SMP sebesar 49,16% menunjukkan perempuan sedikit lebih kecil daripada laki-laki dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 52,00% menunjukkan perempuan sedikit lebih besar daripada laki-laki dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 46,01%. %KSGT SMP sebesar 69,67% dan terbesar di Jawa Timur sebesar 82,77% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 51,20%. %KSGPNS sebesar 52,25% dan terbesar di Kalimantan Selatan sebesar 68,90% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 42,28%. %GKSPen SMP sebesar 11,68% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 22,45% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 3,06%. Disparitas paling besar pada KS dan guru PNS SMP sebesar 32,70% dan paling kecil pada KS dan guru SMP perempuan sebesar 5,99%.

Tabel 4.25A
Data dan Indikator SDM Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	1,066	1,034	348	1,066	339	136	97.00	32.65	100.00	31.80	12.76
2	Jawa Barat	4,744	4,678	1,068	4,744	2,378	244	98.61	22.51	100.00	50.13	5.14
3	Banten	1,334	1,305	305	1,334	671	60	97.83	22.86	100.00	50.30	4.50
4	Jawa Tengah	3,221	3,092	679	3,221	2,110	217	96.00	21.08	100.00	65.51	6.74
5	DI Yogyakarta	433	423	152	433	301	50	97.69	35.10	100.00	69.52	11.55
6	Jawa Timur	4,396	4,314	884	4,396	2,072	236	98.13	20.11	100.00	47.13	5.37
7	Aceh	1,037	964	231	1,037	967	86	92.96	22.28	100.00	93.25	8.29
8	Sumatera Utara	2,420	2,254	635	2,420	1,396	164	93.14	26.24	100.00	57.69	6.78
9	Sumatera Barat	770	755	178	770	694	65	98.05	23.12	100.00	90.13	8.44
10	Riau	1,082	1,030	310	1,082	852	55	95.19	28.65	100.00	78.74	5.08
11	Kepulauan Riau	321	300	115	321	235	7	93.46	35.83	100.00	73.21	2.18
12	Jambi	627	608	113	627	553	38	96.97	18.02	100.00	88.20	6.06
13	Sumatera Selatan	1,247	1,185	334	1,247	914	66	95.03	26.78	100.00	73.30	5.29
14	Bangka Belitung	198	180	65	198	163	12	90.91	32.83	100.00	82.32	6.06
15	Bengkulu	412	399	89	412	378	23	96.84	21.60	100.00	91.75	5.58
16	Lampung	1,292	1,205	327	1,292	766	75	93.27	25.31	100.00	59.29	5.80
17	Kalimantan Barat	1,222	1,094	231	1,222	968	68	89.53	18.90	100.00	79.21	5.56
18	Kalimantan Tengah	783	743	193	783	691	33	94.89	24.65	100.00	88.25	4.21
19	Kalimantan Selatan	578	559	96	578	525	40	96.71	16.61	100.00	90.83	6.92
20	Kalimantan Timur	589	567	94	589	434	26	96.26	15.96	100.00	73.68	4.41
21	Kalimantan Utara	152	152	21	152	144	7	100.00	13.82	100.00	94.74	4.61
22	Sulawesi Utara	698	641	375	698	548	64	91.83	53.72	100.00	78.51	9.17
23	Gorontalo	318	301	125	318	317	17	94.65	39.31	100.00	99.69	5.35
24	Sulawesi Tengah	799	767	139	799	716	37	95.99	17.40	100.00	89.61	4.63
25	Sulawesi Selatan	1,599	1,562	317	1,599	1,352	109	97.69	19.82	100.00	84.55	6.82
26	Sulawesi Barat	331	316	54	331	305	10	95.47	16.31	100.00	92.15	3.02
27	Sulawesi Tenggara	712	693	91	712	665	37	97.33	12.78	100.00	93.40	5.20
28	Maluku	594	440	145	594	533	69	74.07	24.41	100.00	89.73	11.62
29	Maluku Utara	444	410	99	444	377	20	92.34	22.30	100.00	84.91	4.50
30	Bali	396	383	47	396	291	47	96.72	11.87	100.00	73.48	11.87
31	Nusa Tenggara Barat	831	808	66	831	622	60	97.23	7.94	100.00	74.85	7.22
32	Nusa Tenggara Timur	1,523	1,132	241	1,523	1,296	148	74.33	15.82	100.00	85.10	9.72
33	Papua	587	471	115	587	487	19	80.24	19.59	100.00	82.96	3.24
34	Papua Barat	267	232	60	267	238	13	86.89	22.47	100.00	89.14	4.87
	Indonesia	37,023	34,997	8,342	37,023	25,298	2,358	94.53	22.53	100.00	68.33	6.37

Tabel 4.25A menunjukkan jumlah KS dan indikator SDM SMP berdasarkan 5 indikator. Secara nasional, KS SMP sebesar 37.023 orang, yang layak sebesar 34.997

orang, perempuan sebesar 8.342 orang, tetap sebesar 37.023 orang, PNS sebesar 25.298 orang, dan pensiun sebesar 2.358 orang.

Berdasarkan Tabel 4.25A, secara nasional %KSL SMP sebesar 94,53% dan terbesar di Provinsi Jawa Barat sebesar 98,61% dan terkecil di Maluku sebesar 74,07%, sedangkan Kalimantan Utara KS SMP semuanya layak. %KSP SMP sebesar 22,53% menunjukkan belum ada kesetaraan menjadi KS dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 53,72% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 7,94%. %KST SMP sebesar 100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS SMP sebesar 68,33% dan terbesar di Gorontalo sebesar 99,69% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 31,80%. %KSPen SMP sebesar 6,37% dan terbesar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 12,76% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 2,18%.

Tabel 4.25B
Data dan Indikator SDM Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	19,098	16,456	9,769	14,130	7,684	3,912	86.17	51.15	73.99	40.23	20.48
2	Jawa Barat	84,929	74,117	43,080	57,680	35,111	7,992	87.27	50.72	67.92	41.34	9.41
3	Banten	20,720	17,583	10,645	14,071	7,318	1,150	84.86	51.38	67.91	35.32	5.55
4	Jawa Tengah	73,224	66,962	36,481	56,240	44,112	9,695	91.45	49.82	76.81	60.24	13.24
5	DI Yogyakarta	9,248	8,076	4,373	7,326	5,974	2,123	87.33	47.29	79.22	64.60	22.96
6	Jawa Timur	81,419	74,006	40,505	66,637	43,543	10,931	90.90	49.75	81.84	53.48	13.43
7	Aceh	21,889	18,760	11,686	12,630	11,795	2,989	85.71	53.39	57.70	53.89	13.66
8	Sumatera Utara	41,740	35,486	20,894	29,593	20,611	6,589	85.02	50.06	70.90	49.38	15.79
9	Sumatera Barat	17,870	15,293	9,320	12,683	11,892	4,600	85.58	52.15	70.97	66.55	25.74
10	Riau	18,409	15,632	9,599	10,587	8,202	2,140	84.91	52.14	57.51	44.55	11.62
11	Kepulauan Riau	4,802	4,143	2,494	2,877	2,074	351	86.28	51.94	59.91	43.19	7.31
12	Jambi	10,077	8,783	5,161	5,906	5,415	1,108	87.16	51.22	58.61	53.74	11.00
13	Sumatera Selatan	23,500	20,155	12,200	12,341	10,479	2,446	85.77	51.91	52.51	44.59	10.41
14	Bangka Belitung	3,060	2,622	1,566	1,981	1,833	188	85.69	51.18	64.74	59.90	6.14
15	Bengkulu	6,939	6,069	3,461	4,158	3,946	563	87.46	49.88	59.92	56.87	8.11
16	Lampung	21,356	17,571	10,899	15,348	10,857	2,537	82.28	51.03	71.87	50.84	11.88
17	Kalimantan Barat	13,980	11,313	6,985	7,852	6,619	1,073	80.92	49.96	56.17	47.35	7.68
18	Kalimantan Tengah	8,549	7,574	4,311	5,905	5,237	609	88.60	50.43	69.07	61.26	7.12
19	Kalimantan Selatan	9,354	8,495	4,697	6,710	6,318	1,204	90.82	50.21	71.73	67.54	12.87
20	Kalimantan Timur	9,662	8,540	4,985	6,185	4,843	770	88.39	51.59	64.01	50.12	7.97
21	Kalimantan Utara	2,230	1,926	1,075	1,354	1,270	66	86.37	48.21	60.72	56.95	2.96
22	Sulawesi Utara	8,954	6,991	4,499	6,639	5,963	2,242	78.08	50.25	74.15	66.60	25.04
23	Gorontalo	3,959	3,467	2,099	2,647	2,631	755	87.57	53.02	66.86	66.46	19.07
24	Sulawesi Tengah	9,990	8,759	5,155	6,015	5,722	906	87.68	51.60	60.21	57.28	9.07
25	Sulawesi Selatan	28,888	25,792	14,813	19,042	16,835	3,692	89.28	51.28	65.92	58.28	12.78
26	Sulawesi Barat	4,488	3,649	2,289	2,266	2,092	283	81.31	51.00	50.49	46.61	6.31
27	Sulawesi Tenggara	10,519	9,376	5,392	6,517	6,297	516	89.13	51.26	61.95	59.86	4.91
28	Maluku	8,005	5,561	4,103	5,012	4,732	1,226	69.47	51.26	62.61	59.11	15.32
29	Maluku Utara	4,983	3,954	2,581	2,732	2,520	175	79.35	51.80	54.83	50.57	3.51
30	Bali	11,834	10,324	5,893	7,934	6,859	1,829	87.24	49.80	67.04	57.96	15.46
31	Nusa Tenggara Barat	16,940	14,715	8,609	9,061	6,891	735	86.87	50.82	53.49	40.68	4.34
32	Nusa Tenggara Timur	23,376	18,861	11,843	11,225	9,318	1,276	80.69	50.66	48.02	39.86	5.46
33	Papua	7,125	5,637	3,507	4,258	3,746	345	79.12	49.22	59.76	52.58	4.84
34	Papua Barat	3,283	2,909	1,671	2,184	2,032	194	88.61	50.90	66.52	61.89	5.91
	Indonesia	644,399	559,557	326,640	437,726	330,771	77,210	86.83	50.69	67.93	51.33	11.98

Tabel 4.25B menunjukkan jumlah guru dan indikator SDM SMP berdasarkan 5 indikator. Secara nasional guru SMP sebesar 644.399 orang, yang layak sebesar 559.557 orang, perempuan sebesar 326.640 orang, tetap sebesar 437.726 orang, PNS sebesar 330.771 orang, dan pensiun 77.210 orang.

Berdasarkan Tabel 4.25B, secara nasional %GL SMP sebesar 86,83% dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,45% dan terkecil di Maluku sebesar 69,47%. %GP SMP sebesar 50,69% menunjukkan guru perempuan sedikit lebih banyak daripada guru laki-laki dan terbesar di Provinsi Aceh sebesar 53,39% menunjukkan guru perempuan juga lebih banyak daripada guru laki-laki dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 48,21%. %GT SMP sebesar 67,93% dan terbesar di Jawa Timur sebesar 81,84% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 48,02%. %GPNS SMP sebesar 51,33% dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 66,60% dan terkecil di Banten sebesar 35,32%. %GPen SMP sebesar 11,98% dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,04% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 2,96%.

4. SMA

Tabel 4.26 menunjukkan jumlah KS dan guru SMA serta indikator SDM SMA berdasarkan 5 indikator. Secara nasional, KS dan guru SMA sebesar 295.912 orang, yang layak sebesar 282.612 orang, perempuan sebesar 166.289 orang, tetap sebesar 216.559 orang, PNS sebesar 162.512 orang, dan pensiun 20.019 orang.

Berdasarkan Tabel 4.26, secara nasional %KSGL SMA sebesar 95,51% yang berarti masih terdapat 4,49% KS dan guru yang belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 97,86% dan terkecil di Maluku sebesar 92,35%. %KSGP SMA sebesar 56,20% menunjukan perempuan lebih besar daripada laki-laki dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 71,63% dan terkecil di Bali sebesar 43,57%. %KSGT SMA sebesar 73,18% dan terbesar di Sulawesi Utara sebesar 82,28% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 57,31%. %KSGPNS sebesar 54,92%, terbesar di Gorontalo sebesar 73,76% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 39,13%. %GKSPen SMA sebesar 6,77%, terbesar di Provinsi Bali sebesar 15,18% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 1,50%. Disparitas paling besar pada KS dan guru PNS SMA sebesar 34,63% dan paling kecil pada KS dan guru SMA layak sebesar 5,50%.

Tabel 4.26A menunjukkan jumlah KS dan indikator SDM SMA berdasarkan 5 indikator. Secara nasional kepala sekolah SMA sebesar 12.689 orang, yang layak sebesar 10.566 orang, perempuan sebesar 5.921 orang, tetap sebesar 12.689 orang, PNS sebesar 7.622 orang, dan pensiun sebesar 738 orang.

Berdasarkan Tabel 4.26A, secara nasional %KSL SMA sebesar 83,27% yang berarti masih terdapat 16,73% KS SMA yang belum layak atau perlu disetarakan, terbesar di Provinsi Papua Barat sebesar 90,09% dan terkecil di Bangka Belitung sebesar 70,77%. %KSP SMA sebesar 46,66% menunjukkan belum ada kesetaraan menjadi KS dan terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 54,55% dan terkecil di Gorontalo sebesar 17,54%. %KST SMA sebesar 100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS sebesar 60,07%, terbesar di Gorontalo sebesar 87,72% dan terkecil di Banten sebesar 39,03%. %KSPen SMA sebesar 5,82% dan terbesar di Provinsi Bali sebesar 12,74% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 1,72%.

Tabel 4.26
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	10,683	10,251	6,018	7,858	4,180	1,591	95.96	56.33	73.56	39.13	14.89
2	Jawa Barat	32,602	31,090	17,199	24,848	16,093	2,720	95.36	52.75	76.22	49.36	8.34
3	Banten	9,326	8,896	4,787	6,974	3,833	323	95.39	51.33	74.78	41.10	3.46
4	Jawa Tengah	25,418	24,402	13,109	20,064	14,539	2,319	96.00	51.57	78.94	57.20	9.12
5	DI Yogyakarta	4,316	4,123	2,310	3,419	2,713	626	95.53	53.52	79.22	62.86	14.50
6	Jawa Timur	32,824	31,521	16,727	26,615	16,303	2,736	96.03	50.96	81.08	49.67	8.34
7	Aceh	13,630	13,092	9,040	9,112	8,472	802	96.05	66.32	66.85	62.16	5.88
8	Sumatera Utara	20,678	19,403	12,664	16,336	10,668	1,363	93.83	61.24	79.00	51.59	6.59
9	Sumatera Barat	10,999	10,602	7,879	8,047	7,326	1,009	96.39	71.63	73.16	66.61	9.17
10	Riau	9,905	9,423	6,548	6,208	4,989	355	95.13	66.11	62.68	50.37	3.58
11	Kepulauan Riau	2,321	2,214	1,416	1,645	1,372	44	95.39	61.01	70.87	59.11	1.90
12	Jambi	5,132	4,961	3,086	3,652	3,174	196	96.67	60.13	71.16	61.85	3.82
13	Sumatera Selatan	13,277	12,728	8,452	7,965	6,320	421	95.87	63.66	59.99	47.60	3.17
14	Bangka Belitung	1,360	1,261	758	941	777	30	92.72	55.74	69.19	57.13	2.21
15	Bengkulu	3,505	3,407	2,108	2,626	2,459	91	97.20	60.14	74.92	70.16	2.60
16	Lampung	9,928	9,381	5,792	7,526	5,355	553	94.49	58.34	75.81	53.94	5.57
17	Kalimantan Barat	6,339	5,926	3,336	4,171	3,254	176	93.48	52.63	65.80	51.33	2.78
18	Kalimantan Tengah	4,161	3,987	2,416	3,260	3,053	146	95.82	58.06	78.35	73.37	3.51
19	Kalimantan Selatan	4,161	4,031	2,385	3,154	2,875	252	96.88	57.32	75.80	69.09	6.06
20	Kalimantan Timur	4,209	4,016	2,299	3,017	2,440	156	95.41	54.62	71.68	57.97	3.71
21	Kalimantan Utara	1,064	998	558	730	649	16	93.80	52.44	68.61	61.00	1.50
22	Sulawesi Utara	3,674	3,425	2,255	3,023	2,704	389	93.22	61.38	82.28	73.60	10.59
23	Gorontalo	1,494	1,462	957	1,126	1,102	78	97.86	64.06	75.37	73.76	5.22
24	Sulawesi Tengah	4,124	3,910	2,201	2,925	2,771	155	94.81	53.37	70.93	67.19	3.76
25	Sulawesi Selatan	14,093	13,634	8,114	10,411	8,901	1,230	96.74	57.57	73.87	63.16	8.73
26	Sulawesi Barat	1,641	1,572	823	1,047	989	64	95.80	50.15	63.80	60.27	3.90
27	Sulawesi Tenggara	6,343	6,140	3,223	4,373	4,075	150	96.80	50.81	68.94	64.24	2.36
28	Maluku	5,258	4,856	3,328	3,727	3,548	212	92.35	63.29	70.88	67.48	4.03
29	Maluku Utara	2,743	2,570	1,431	1,787	1,716	49	93.69	52.17	65.15	62.56	1.79
30	Bali	5,238	5,058	2,282	4,010	3,361	795	96.56	43.57	76.56	64.17	15.18
31	Nusa Tenggara Barat	8,076	7,807	3,842	5,003	3,494	271	96.67	47.57	61.95	43.26	3.36
32	Nusa Tenggara Timur	11,620	10,979	5,732	6,660	5,015	554	94.48	49.33	57.31	43.16	4.77
33	Papua	3,807	3,621	2,100	2,833	2,628	102	95.11	55.16	74.42	69.03	2.68
34	Papua Barat	1,963	1,865	1,114	1,466	1,364	45	95.01	56.75	74.68	69.49	2.29
	Indonesia	295,912	282,612	166,289	216,559	162,512	20,019	95.51	56.20	73.18	54.92	6.77

Tabel 4.26A
Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	467	379	246	467	214	45	81.16	52.68	100.00	45.82	9.64
2	Jawa Barat	1,441	1,168	791	1,441	680	100	81.05	54.89	100.00	47.19	6.94
3	Banten	497	418	263	497	194	15	84.10	52.92	100.00	39.03	3.02
4	Jawa Tengah	847	655	447	847	479	71	77.33	52.77	100.00	56.55	8.38
5	DI Yogyakarta	160	120	83	160	99	20	75.00	51.88	100.00	61.88	12.50
6	Jawa Timur	1,441	1,196	786	1,441	637	92	83.00	54.55	100.00	44.21	6.38
7	Aceh	487	419	136	487	387	26	86.04	27.93	100.00	79.47	5.34
8	Sumatera Utara	1,020	867	546	1,020	481	61	85.00	53.53	100.00	47.16	5.98
9	Sumatera Barat	301	261	102	301	222	24	86.71	33.89	100.00	73.75	7.97
10	Riau	413	349	164	413	292	15	84.50	39.71	100.00	70.70	3.63
11	Kepulauan Riau	114	90	43	114	81	3	78.95	37.72	100.00	71.05	2.63
12	Jambi	210	178	74	210	147	9	84.76	35.24	100.00	70.00	4.29
13	Sumatera Selatan	570	469	272	570	345	22	82.28	47.72	100.00	60.53	3.86
14	Bangka Belitung	65	46	27	65	45	4	70.77	41.54	100.00	69.23	6.15
15	Bengkulu	129	109	36	129	101	4	84.50	27.91	100.00	78.29	3.10
16	Lampung	462	378	238	462	255	25	81.82	51.52	100.00	55.19	5.41
17	Kalimantan Barat	378	316	172	378	240	14	83.60	45.50	100.00	63.49	3.70
18	Kalimantan Tengah	230	201	74	230	182	8	87.39	32.17	100.00	79.13	3.48
19	Kalimantan Selatan	183	158	62	183	138	10	86.34	33.88	100.00	75.41	5.46
20	Kalimantan Timur	210	169	86	210	139	8	80.48	40.95	100.00	66.19	3.81
21	Kalimantan Utara	55	45	20	55	39	0	81.82	36.36	100.00	70.91	0.00
22	Sulawesi Utara	209	182	103	209	148	23	87.08	49.28	100.00	70.81	11.00
23	Gorontalo	57	51	10	57	50	3	89.47	17.54	100.00	87.72	5.26
24	Sulawesi Tengah	189	157	53	189	155	5	83.07	28.04	100.00	82.01	2.65
25	Sulawesi Selatan	552	480	248	552	360	49	86.96	44.93	100.00	65.22	8.88
26	Sulawesi Barat	76	61	18	76	63	4	80.26	23.68	100.00	82.89	5.26
27	Sulawesi Tenggara	270	242	71	270	220	7	89.63	26.30	100.00	81.48	2.59
28	Maluku	250	206	96	250	204	11	82.40	38.40	100.00	81.60	4.40
29	Maluku Utara	174	148	71	174	136	3	85.06	40.80	100.00	78.16	1.72
30	Bali	157	124	79	157	95	20	78.98	50.32	100.00	60.51	12.74
31	Nusa Tenggara Barat	286	240	139	286	162	9	83.92	48.60	100.00	56.64	3.15
32	Nusa Tenggara Timur	472	399	216	472	371	20	84.53	45.76	100.00	78.60	4.24
33	Papua	206	185	97	206	169	6	89.81	47.09	100.00	82.04	2.91
34	Papua Barat	111	100	52	111	92	2	90.09	46.85	100.00	82.88	1.80
	Indonesia	12,689	10,566	5,921	12,689	7,622	738	83.27	46.66	100.00	60.07	5.82

Tabel 4.26B menunjukkan jumlah guru dan indikator SDM SMA berdasarkan 5 indikator. Secara nasional guru SMA sebesar 283.223 orang, yang layak sebesar 272.046 orang, perempuan sebesar 160.368 orang, tetap sebesar 203.870 orang, PNS sebesar 154.890 orang, dan pensiun 19.281 orang.

Berdasarkan Tabel 4.26B, secara nasional %GL SMA sebesar 96,05% yang berarti masih terdapat 3,95% guru SMA yang belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 98,19% dan terkecil di Maluku sebesar 92,85%. %GP SMA sebesar 56,62% menunjukkan perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan terbesar di Provinsi Aceh sebesar 67,75% dan terkecil di Bali sebesar 43,36%. %GT SMA sebesar 71,98% dan terbesar di Sulawesi Utara sebesar 81,21% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 55,51%. %GPNS SMA sebesar 54,69%, terbesar di Sulawesi Utara sebesar 73,77% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 38,82%. %GPen SMA sebesar 6,81%, terbesar di Provinsi Bali sebesar 15,25% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 1,59%.

Tabel 4.26B
Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	10,216	9,872	5,772	7,391	3,966	1,546	96.63	56.50	72.35	38.82	15.13
2	Jawa Barat	31,161	29,922	16,408	23,407	15,413	2,620	96.02	52.66	75.12	49.46	8.41
3	Banten	8,829	8,478	4,524	6,477	3,639	308	96.02	51.24	73.36	41.22	3.49
4	Jawa Tengah	24,571	23,747	12,662	19,217	14,060	2,248	96.65	51.53	78.21	57.22	9.15
5	DI Yogyakarta	4,156	4,003	2,227	3,259	2,614	606	96.32	53.59	78.42	62.90	14.58
6	Jawa Timur	31,383	30,325	15,941	25,174	15,666	2,644	96.63	50.80	80.22	49.92	8.42
7	Aceh	13,143	12,673	8,904	8,625	8,085	776	96.42	67.75	65.62	61.52	5.90
8	Sumatera Utara	19,658	18,536	12,118	15,316	10,187	1,302	94.29	61.64	77.91	51.82	6.62
9	Sumatera Barat	10,698	10,341	7,777	7,746	7,104	985	96.66	72.70	72.41	66.40	9.21
10	Riau	9,492	9,074	6,384	5,795	4,697	340	95.60	67.26	61.05	49.48	3.58
11	Kepulauan Riau	2,207	2,124	1,373	1,531	1,291	41	96.24	62.21	69.37	58.50	1.86
12	Jambi	4,922	4,783	3,012	3,442	3,027	187	97.18	61.19	69.93	61.50	3.80
13	Sumatera Selatan	12,707	12,259	8,180	7,395	5,975	399	96.47	64.37	58.20	47.02	3.14
14	Bangka Belitung	1,295	1,215	731	876	732	26	93.82	56.45	67.64	56.53	2.01
15	Bengkulu	3,376	3,298	2,072	2,497	2,358	87	97.69	61.37	73.96	69.85	2.58
16	Lampung	9,466	9,003	5,554	7,064	5,100	528	95.11	58.67	74.62	53.88	5.58
17	Kalimantan Barat	5,961	5,610	3,164	3,793	3,014	162	94.11	53.08	63.63	50.56	2.72
18	Kalimantan Tengah	3,931	3,786	2,342	3,030	2,871	138	96.31	59.58	77.08	73.03	3.51
19	Kalimantan Selatan	3,978	3,873	2,323	2,971	2,737	242	97.36	58.40	74.69	68.80	6.08
20	Kalimantan Timur	3,999	3,847	2,213	2,807	2,301	148	96.20	55.34	70.19	57.54	3.70
21	Kalimantan Utara	1,009	953	538	675	610	16	94.45	53.32	66.90	60.46	1.59
22	Sulawesi Utara	3,465	3,243	2,152	2,814	2,556	366	93.59	62.11	81.21	73.77	10.56
23	Gorontalo	1,437	1,411	947	1,069	1,052	75	98.19	65.90	74.39	73.21	5.22
24	Sulawesi Tengah	3,935	3,753	2,148	2,736	2,616	150	95.37	54.59	69.53	66.48	3.81
25	Sulawesi Selatan	13,541	13,154	7,866	9,859	8,541	1,181	97.14	58.09	72.81	63.08	8.72
26	Sulawesi Barat	1,565	1,511	805	971	926	60	96.55	51.44	62.04	59.17	3.83
27	Sulawesi Tenggara	6,073	5,898	3,152	4,103	3,855	143	97.12	51.90	67.56	63.48	2.35
28	Maluku	5,008	4,650	3,232	3,477	3,344	201	92.85	64.54	69.43	66.77	4.01
29	Maluku Utara	2,569	2,422	1,360	1,613	1,580	46	94.28	52.94	62.79	61.50	1.79
30	Bali	5,081	4,934	2,203	3,853	3,266	775	97.11	43.36	75.83	64.28	15.25
31	Nusa Tenggara Barat	7,790	7,567	3,703	4,717	3,332	262	97.14	47.54	60.55	42.77	3.36
32	Nusa Tenggara Timur	11,148	10,580	5,516	6,188	4,644	534	94.90	49.48	55.51	41.66	4.79
33	Papua	3,601	3,436	2,003	2,627	2,459	96	95.42	55.62	72.95	68.29	2.67
34	Papua Barat	1,852	1,765	1,062	1,355	1,272	43	95.30	57.34	73.16	68.68	2.32
	Indonesia	283,223	272,046	160,368	203,870	154,890	19,281	96.05	56.62	71.98	54.69	6.81

5. SMK

Tabel 4.27 menunjukkan jumlah KS dan guru SMK serta indikator SDM SMK berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS dan guru SMK sebesar 273.353 orang, yang layak sebesar 252.669 orang, perempuan sebesar 124.714 orang, tetap sebesar 192.749 orang, PNS sebesar 98.896 orang, dan pensiun sebesar 16.653 orang.

Berdasarkan Tabel 4.27, secara nasional %KSGL SMK sebesar 92,43% yang berarti masih terdapat 7,57% KS dan guru SMK belum layak atau perlu disetarakan, terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,31% dan terkecil di Maluku sebesar 88,29%. %KSGP SMK sebesar 45,62% berarti belum setara antara KS dan guru perempuan dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 58,41% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 37,59%. %KSgt SMK sebesar 70,51% dan terbesar di Kalimantan Utara sebesar 77,66% dan terkecil di Sumatera Selatan sebesar 53,12%. %KSGPNS SMK sebesar 36,18% dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 68,57% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 19,89%. %KSGPen SMK sebesar 6,09% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12,40% dan terkecil di Kalimantan Utara

sebesar 1,05%. Disparitas paling besar pada KS dan guru PNS SMK sebesar 48,68% dan paling kecil pada KS dan guru SMK layak sebesar 7,02%.

Tabel 4.27
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	10,391	9,849	5,043	7,101	2,067	1,193	94.78	48.53	68.34	19.89	11.48
2	Jawa Barat	43,878	39,524	17,991	30,516	9,283	2,489	90.08	41.00	69.55	21.16	5.67
3	Banten	9,884	9,144	4,156	6,970	2,065	453	92.51	42.05	70.52	20.89	4.58
4	Jawa Tengah	42,871	40,151	17,861	31,057	13,930	2,842	93.66	41.66	72.44	32.49	6.63
5	DI Yogyakarta	6,836	6,411	3,281	5,111	3,368	848	93.78	48.00	74.77	49.27	12.40
6	Jawa Timur	40,514	38,268	17,734	31,416	13,990	2,462	94.46	43.77	77.54	34.53	6.08
7	Aceh	5,444	4,940	2,997	3,473	3,081	235	90.74	55.05	63.80	56.59	4.32
8	Sumatera Utara	17,637	16,127	9,004	13,562	6,214	936	91.44	51.05	76.90	35.23	5.31
9	Sumatera Barat	6,776	6,458	3,958	4,845	4,034	501	95.31	58.41	71.50	59.53	7.39
10	Riau	6,140	5,669	3,362	3,500	2,046	188	92.33	54.76	57.00	33.32	3.06
11	Kepulauan Riau	1,627	1,470	826	1,100	506	60	90.35	50.77	67.61	31.10	3.69
12	Jambi	3,401	3,190	1,663	2,100	1,591	113	93.80	48.90	61.75	46.78	3.32
13	Sumatera Selatan	6,276	5,758	3,326	3,334	2,310	373	91.75	53.00	53.12	36.81	5.94
14	Bangka Belitung	1,385	1,245	608	912	794	49	89.89	43.90	65.85	57.33	3.54
15	Bengkulu	2,236	2,090	1,167	1,540	1,271	102	93.47	52.19	68.87	56.84	4.56
16	Lampung	7,971	7,088	3,672	5,790	2,367	374	88.92	46.07	72.64	29.70	4.69
17	Kalimantan Barat	3,357	3,018	1,445	2,171	1,583	125	89.90	43.04	64.67	47.16	3.72
18	Kalimantan Tengah	2,460	2,329	1,326	1,842	1,622	93	94.67	53.90	74.88	65.93	3.78
19	Kalimantan Selatan	3,210	3,019	1,667	2,139	1,712	206	94.05	51.93	66.64	53.33	6.42
20	Kalimantan Timur	4,413	4,034	2,042	2,805	1,602	184	91.41	46.27	63.56	36.30	4.17
21	Kalimantan Utara	667	632	292	518	452	7	94.75	43.78	77.66	67.77	1.05
22	Sulawesi Utara	3,381	3,162	1,833	2,506	2,048	314	93.52	54.21	74.12	60.57	9.29
23	Gorontalo	1,368	1,261	796	979	938	71	92.18	58.19	71.56	68.57	5.19
24	Sulawesi Tengah	3,028	2,780	1,518	2,098	1,688	129	91.81	50.13	69.29	55.75	4.26
25	Sulawesi Selatan	9,362	8,775	4,507	6,718	4,809	833	93.73	48.14	71.76	51.37	8.90
26	Sulawesi Barat	1,834	1,664	817	1,103	790	65	90.73	44.55	60.14	43.08	3.54
27	Sulawesi Tenggara	2,965	2,744	1,459	2,096	1,643	78	92.55	49.21	70.69	55.41	2.63
28	Maluku	2,118	1,870	1,139	1,432	1,274	152	88.29	53.78	67.61	60.15	7.18
29	Maluku Utara	1,568	1,409	686	937	821	35	89.86	43.75	59.76	52.36	2.23
30	Bali	5,023	4,622	2,070	3,049	2,070	574	92.02	41.21	60.70	41.21	11.43
31	Nusa Tenggara Barat	6,034	5,605	2,268	4,011	2,169	173	92.89	37.59	66.47	35.95	2.87
32	Nusa Tenggara Timur	5,917	5,252	2,468	3,700	2,653	316	88.76	41.71	62.53	44.84	5.34
33	Papua	2,352	2,155	1,179	1,618	1,478	47	91.62	50.13	68.79	62.84	2.00
34	Papua Barat	1,029	956	553	700	627	33	92.91	53.74	68.03	60.93	3.21
	Indonesia	273,353	252,669	124,714	192,749	98,896	16,653	92.43	45.62	70.51	36.18	6.09

Tabel 4.27A menunjukkan jumlah kepala sekolah dan indikator SDM SMK berdasarkan 5 indikator. Secara nasional kepala sekolah SMK sebesar 12.659 orang, yang layak sebesar 12.225 orang, perempuan sebesar 2.323 orang, tetap sebesar 12.659 orang, PNS sebesar 5.342 orang, dan pensiun sebesar 2.335 orang.

Berdasarkan Tabel 4.27A, secara nasional %KSL SMK sebesar 96,57% yang berarti masih terdapat 3,43% guru SMK yang belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 99,50% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 88,98%. %KSP SMK sebesar 18,35% menunjukkan belum ada kesetaraan menjadi KS di SMK dan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 37,50% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 7,66%. %KST SMK sebesar 100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS SMK sebesar 42,20% dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 98,04% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar

17,24%. %KSPen SMK sebesar 18,45% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 37,16% dan terkecil di Papua sebesar 5,22%.

Tabel 4.27A
Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	586	576	177	586	101	121	98.29	30.20	100.00	17.24	20.65
2	Jawa Barat	2,515	2,432	473	2,515	627	439	96.70	18.81	100.00	24.93	17.46
3	Banten	622	607	120	622	149	96	97.59	19.29	100.00	23.95	15.43
4	Jawa Tengah	1,524	1,468	233	1,524	565	326	96.33	15.29	100.00	37.07	21.39
5	DI Yogyakarta	218	209	52	218	120	81	95.87	23.85	100.00	55.05	37.16
6	Jawa Timur	1,809	1,769	267	1,809	560	350	97.79	14.76	100.00	30.96	19.35
7	Aceh	189	183	36	189	162	30	96.83	19.05	100.00	85.71	15.87
8	Sumatera Utara	924	881	194	924	361	141	95.35	21.00	100.00	39.07	15.26
9	Sumatera Barat	199	198	43	199	159	41	99.50	21.61	100.00	79.90	20.60
10	Riau	262	256	57	262	149	23	97.71	21.76	100.00	56.87	8.78
11	Kepulauan Riau	88	83	33	88	36	15	94.32	37.50	100.00	40.91	17.05
12	Jambi	155	149	23	155	111	17	96.13	14.84	100.00	71.61	10.97
13	Sumatera Selatan	264	256	58	264	128	44	96.97	21.97	100.00	48.48	16.67
14	Bangka Belitung	54	49	6	54	37	6	90.74	11.11	100.00	68.52	11.11
15	Bengkulu	85	83	17	85	63	15	97.65	20.00	100.00	74.12	17.65
16	Lampung	410	392	73	410	138	52	95.61	17.80	100.00	33.66	12.68
17	Kalimantan Barat	180	176	34	180	104	16	97.78	18.89	100.00	57.78	8.89
18	Kalimantan Tengah	128	125	31	128	112	13	97.66	24.22	100.00	87.50	10.16
19	Kalimantan Selatan	118	116	22	118	79	24	98.31	18.64	100.00	66.95	20.34
20	Kalimantan Timur	207	203	29	207	100	44	98.07	14.01	100.00	48.31	21.26
21	Kalimantan Utara	25	24	3	25	16	0	96.00	12.00	100.00	64.00	0.00
22	Sulawesi Utara	172	165	56	172	130	43	95.93	32.56	100.00	75.58	25.00
23	Gorontalo	51	51	9	51	50	10	100.00	17.65	100.00	98.04	19.61
24	Sulawesi Tengah	167	161	42	167	141	30	96.41	25.15	100.00	84.43	17.96
25	Sulawesi Selatan	414	397	62	414	269	125	95.89	14.98	100.00	64.98	30.19
26	Sulawesi Barat	112	106	20	112	79	19	94.64	17.86	100.00	70.54	16.96
27	Sulawesi Tenggara	138	132	15	138	104	15	95.65	10.87	100.00	75.36	10.87
28	Maluku	103	94	18	103	88	27	91.26	17.48	100.00	85.44	26.21
29	Maluku Utara	107	107	13	107	104	8	100.00	12.15	100.00	97.20	7.48
30	Bali	168	159	14	168	81	60	94.64	8.33	100.00	48.21	35.71
31	Nusa Tenggara Barat	261	249	20	261	114	27	95.40	7.66	100.00	43.68	10.34
32	Nusa Tenggara Timur	245	218	39	245	165	65	88.98	15.92	100.00	67.35	26.53
33	Papua	115	107	24	115	102	6	93.04	20.87	100.00	88.70	5.22
34	Papua Barat	44	44	10	44	38	6	100.00	22.73	100.00	86.36	13.64
	Indonesia	12,659	12,225	2,323	12,659	5,342	2,335	96.57	18.35	100.00	42.20	18.45

Tabel 4.27B menunjukkan jumlah guru dan indikator SDM SMK berdasarkan 5 indikator. Secara nasional guru SMK sebesar 260.694 orang, yang layak sebesar 240.444 orang, perempuan sebesar 122.391 orang, tetap sebesar 180.090 orang, dan PNS sebesar 93.554 orang, dan pensiun sebesar 14.318 orang.

Berdasarkan Tabel 4.27B, secara nasional %GL SMK sebesar 92,23% yang berarti masih terdapat 7,77% guru SMK belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,18% dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 88,75%. %GP SMK sebesar 46,95% berarti guru yang mengajar di SMK belum setara dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 59,76% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 38,94%. %GT SMK sebesar 69,08% dan terbesar di Kalimantan Utara sebesar 76,79% dan terkecil di Sumatera Selatan sebesar 51,06%. %GPNS SMK sebesar 35,89% dan terbesar di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 67,91% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 20,05%. %GPen SMK sebesar 5,49% dan

terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,59% dan terkecil di Kalimantan Utara sebesar 1,09%.

Tabel 4.27B
Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	9,805	9,273	4,866	6,515	1,966	1,072	94.57	49.63	66.45	20.05	10.93
2	Jawa Barat	41,363	37,092	17,518	28,001	8,656	2,050	89.67	42.35	67.70	20.93	4.96
3	Banten	9,262	8,537	4,036	6,348	1,916	357	92.17	43.58	68.54	20.69	3.85
4	Jawa Tengah	41,347	38,683	17,628	29,533	13,365	2,516	93.56	42.63	71.43	32.32	6.09
5	DI Yogyakarta	6,618	6,202	3,229	4,893	3,248	767	93.71	48.79	73.93	49.08	11.59
6	Jawa Timur	38,705	36,499	17,467	29,607	13,430	2,112	94.30	45.13	76.49	34.70	5.46
7	Aceh	5,255	4,757	2,961	3,284	2,919	205	90.52	56.35	62.49	55.55	3.90
8	Sumatera Utara	16,713	15,246	8,810	12,638	5,853	795	91.22	52.71	75.62	35.02	4.76
9	Sumatera Barat	6,577	6,260	3,915	4,646	3,875	460	95.18	59.53	70.64	58.92	6.99
10	Riau	5,878	5,413	3,305	3,238	1,897	165	92.09	56.23	55.09	32.27	2.81
11	Kepulauan Riau	1,539	1,387	793	1,012	470	45	90.12	51.53	65.76	30.54	2.92
12	Jambi	3,246	3,041	1,640	1,945	1,480	96	93.68	50.52	59.92	45.59	2.96
13	Sumatera Selatan	6,012	5,502	3,268	3,070	2,182	329	91.52	54.36	51.06	36.29	5.47
14	Bangka Belitung	1,331	1,196	602	858	757	43	89.86	45.23	64.46	56.87	3.23
15	Bengkulu	2,151	2,007	1,150	1,455	1,208	87	93.31	53.46	67.64	56.16	4.04
16	Lampung	7,561	6,696	3,599	5,380	2,229	322	88.56	47.60	71.15	29.48	4.26
17	Kalimantan Barat	3,177	2,842	1,411	1,991	1,479	109	89.46	44.41	62.67	46.55	3.43
18	Kalimantan Tengah	2,332	2,204	1,295	1,714	1,510	80	94.51	55.53	73.50	64.75	3.43
19	Kalimantan Selatan	3,092	2,903	1,645	2,021	1,633	182	93.89	53.20	65.36	52.81	5.89
20	Kalimantan Timur	4,206	3,831	2,013	2,598	1,502	140	91.08	47.86	61.77	35.71	3.33
21	Kalimantan Utara	642	608	289	493	436	7	94.70	45.02	76.79	67.91	1.09
22	Sulawesi Utara	3,209	2,997	1,777	2,334	1,918	271	93.39	55.38	72.73	59.77	8.44
23	Gorontalo	1,317	1,210	787	928	888	61	91.88	59.76	70.46	67.43	4.63
24	Sulawesi Tengah	2,861	2,619	1,476	1,931	1,547	99	91.54	51.59	67.49	54.07	3.46
25	Sulawesi Selatan	8,948	8,378	4,445	6,304	4,540	708	93.63	49.68	70.45	50.74	7.91
26	Sulawesi Barat	1,722	1,558	797	991	711	46	90.48	46.28	57.55	41.29	2.67
27	Sulawesi Tenggara	2,827	2,612	1,444	1,958	1,539	63	92.39	51.08	69.26	54.44	2.23
28	Maluku	2,015	1,776	1,121	1,329	1,186	125	88.14	55.63	65.96	58.86	6.20
29	Maluku Utara	1,461	1,302	673	830	717	27	89.12	46.06	56.81	49.08	1.85
30	Bali	4,855	4,463	2,056	2,881	1,989	514	91.93	42.35	59.34	40.97	10.59
31	Nusa Tenggara Barat	5,773	5,356	2,248	3,750	2,055	146	92.78	38.94	64.96	35.60	2.53
32	Nusa Tenggara Timur	5,672	5,034	2,429	3,455	2,488	251	88.75	42.82	60.91	43.86	4.43
33	Papua	2,237	2,048	1,155	1,503	1,376	41	91.55	51.63	67.19	61.51	1.83
34	Papua Barat	985	912	543	656	589	27	92.59	55.13	66.60	59.80	2.74
	Indonesia	260,694	240,444	122,391	180,090	93,554	14,318	92.23	46.95	69.08	35.89	5.49

6. Dikdasmen

Tabel 4.28 menunjukkan jumlah KS dan guru dikdasmen serta indikator SDM dikdasmen berdasarkan 5 indikator. Secara nasional KS dan guru dikdasmen sebesar 3.073.159 orang, yang layak sebesar 2.606.683 orang, perempuan sebesar 1.776.181 orang, tetap sebesar 2.161.356 orang, PNS sebesar 1.760.655 orang, dan pensiun sebesar 323.116 orang.

Berdasarkan Tabel 4.28, secara nasional %KSGL dikdasmen sebesar 84,82% yang berarti masih terdapat 15,18% KS dan guru dikdasmen yang belum layak atau perlu disetarakan, terbesar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,12% dan terkecil di Papua sebesar 63,94%. %KSGP Dikdasmen sebesar 57,80% yang berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki yang mengajar di dikdasmen dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,03% dan terkecil di Papua sebesar 47,92%. %KSGT

Dikdasmen sebesar 70,33% berarti masih terdapat 29,67% KS dan guru dikdasmen dengan status kepegawaian tidak tetap dan terbesar di Sulawesi Utara sebesar 78,74% dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 59,03%. %KSGPNS Dikdasmen sebesar 57,29% berarti hanya 57,29% yang status kepegawaiannya sebagai PNS, terbesar di Provinsi Maluku sebesar 72,98% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 40,27%. %KSGPen Dikdasmen sebesar 10,51% dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 16,49% dan terkecil di Kepulauan Riau sebesar 4,85%. Perbedaan antara indikator yang terbesar dan terkecil menunjukkan disparitas antarprovinsi. Disparitas paling besar pada KS dan guru PNS Dikdasmen sebesar 32,72% dan paling kecil pada KS dan guru pensiun Dikdasmen sebesar 11,63%.

Tabel 4.28
Data dan Indikator Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KSG	KSL	KSGP	KSGT	KSGPNS	KSGPen	%KSL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen
1	DKI Jakarta	84,574	74,414	51,651	61,968	34,056	13,003	87.99	61.07	73.27	40.27	15.37
2	Jawa Barat	414,590	372,158	230,729	287,415	209,501	41,641	89.77	55.65	69.33	50.53	10.04
3	Banten	105,841	92,409	59,843	72,869	49,118	7,400	87.31	56.54	68.85	46.41	6.99
4	Jawa Tengah	357,617	325,867	194,301	262,145	214,388	46,793	91.12	54.33	73.30	59.95	13.08
5	DI Yogyakarta	44,902	40,112	25,490	35,242	27,571	7,403	89.33	56.77	78.49	61.40	16.49
6	Jawa Timur	397,306	361,993	213,288	295,941	221,979	52,044	91.11	53.68	74.49	55.87	13.10
7	Aceh	95,097	76,456	62,219	59,575	56,700	9,204	80.40	65.43	62.65	59.62	9.68
8	Sumatera Utara	202,829	159,556	132,020	150,331	113,076	23,850	78.67	65.09	74.12	55.75	11.76
9	Sumatera Barat	87,190	77,174	60,188	63,942	59,043	10,443	88.51	69.03	73.34	67.72	11.98
10	Riau	90,349	75,683	57,994	57,093	46,501	6,069	83.77	64.19	63.19	51.47	6.72
11	Kepulauan Riau	22,905	19,601	14,067	15,368	10,861	1,112	85.58	61.41	67.09	47.42	4.85
12	Jambi	49,763	39,663	29,353	34,346	31,659	4,913	79.70	58.99	69.02	63.62	9.87
13	Sumatera Selatan	109,158	88,743	69,202	68,639	61,487	9,384	81.30	63.40	62.88	56.33	8.60
14	Bangka Belitung	15,860	12,883	9,430	12,262	11,457	1,325	81.23	59.46	77.31	72.24	8.35
15	Bengkulu	30,382	25,571	17,546	21,669	20,296	2,785	84.16	57.75	71.32	66.80	9.17
16	Lampung	101,760	81,597	60,989	73,114	59,721	10,692	80.19	59.93	71.85	58.69	10.51
17	Kalimantan Barat	69,377	52,036	35,942	48,591	44,142	6,786	75.00	51.81	70.04	63.63	9.78
18	Kalimantan Tengah	43,633	35,607	25,028	33,966	31,208	2,856	81.61	57.36	77.84	71.52	6.55
19	Kalimantan Selatan	51,521	44,644	29,173	38,472	36,082	5,454	86.65	56.62	74.67	70.03	10.59
20	Kalimantan Timur	46,147	38,758	26,648	32,450	26,760	3,022	83.99	57.75	70.32	57.99	6.55
21	Kalimantan Utara	10,271	7,786	5,314	7,160	6,682	553	75.81	51.74	69.71	65.06	5.38
22	Sulawesi Utara	38,327	29,038	25,966	30,179	26,261	5,332	75.76	67.75	78.74	68.52	13.91
23	Gorontalo	16,989	14,603	11,391	11,685	11,509	1,610	85.96	67.05	68.78	67.74	9.48
24	Sulawesi Tengah	48,916	35,850	28,411	34,096	32,602	3,618	73.29	58.08	69.70	66.65	7.40
25	Sulawesi Selatan	133,976	116,972	83,387	89,865	81,689	12,696	87.31	62.24	67.08	60.97	9.48
26	Sulawesi Barat	23,107	16,835	12,906	13,639	12,939	1,401	72.86	55.85	59.03	56.00	6.06
27	Sulawesi Tenggara	47,772	39,093	27,261	31,290	29,726	3,051	81.83	57.06	65.50	62.22	6.39
28	Maluku	35,231	23,520	21,741	26,986	25,713	3,429	66.76	61.71	76.60	72.98	9.73
29	Maluku Utara	21,773	13,993	12,336	15,288	14,466	1,081	64.27	56.66	70.22	66.44	4.96
30	Bali	51,737	46,652	26,332	37,713	33,472	7,383	90.17	50.90	72.89	64.70	14.27
31	Nusa Tenggara Barat	75,982	64,094	37,989	45,094	37,811	6,590	84.35	50.00	59.35	49.76	8.67
32	Nusa Tenggara Timur	101,152	71,455	54,604	60,077	52,939	7,650	70.64	53.98	59.39	52.34	7.56
33	Papua	32,361	20,691	15,508	22,392	19,598	1,700	63.94	47.92	69.19	60.56	5.25
34	Papua Barat	14,764	11,176	7,934	10,494	9,642	843	75.70	53.74	71.08	65.31	5.71
	Indonesia	3,073,159	2,606,683	1,776,181	2,161,356	1,760,655	323,116	84.82	57.80	70.33	57.29	10.51

Tabel 4.28A menunjukkan jumlah KS dan indikator SDM dikdasmen yang merupakan rangkuman dari SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK berdasarkan 5 indikator. Secara nasional kepala sekolah dikdasmen sebesar 211.869 orang, yang layak sebesar 190.130 orang, perempuan sebesar 76.143 orang, tetap sebesar 211.869 orang, PNS sebesar 178.138 orang, dan pensiun sebesar 39.314 orang.

Berdasarkan Tabel 4.28A, secara nasional %KSL Dikdasmen sebesar 89,74% yang berarti masih terdapat 10,26% KS dikdasmen yang belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,33% dan terkecil di Papua sebesar 60,59%. %KSP Dikdasmen sebesar 35,94% menunjukkan belum ada kesetaraan ketika menjadi KS dikdasmen dan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 61,93% dan terkecil di Nusa Tenggara Barat sebesar 18,97%. %KST Dikdasmen sebesar 100% karena sebagai KS harus memiliki status tetap. %KSPNS Dikdasmen sebesar 84,08% berarti status kepegawaian KS yang PNS hanya 84,08% dan terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 98,75% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 52,74%. %KSPen Dikdasmen sebesar 18,56% dan terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 24,34% dan terkecil di Papua sebesar 8,96%.

Tabel 4.28A
Data dan Indikator Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		KS	KSL	KSP	KST	KSPNS	KSPen	%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen
1	DKI Jakarta	4,854	4,506	2,432	4,854	2,560	893	92.83	50.10	100.00	52.74	18.40
2	Jawa Barat	28,901	27,785	10,582	28,901	22,363	6,032	96.14	36.61	100.00	77.38	20.87
3	Banten	7,053	6,597	2,529	7,053	5,072	1,437	93.53	35.86	100.00	71.91	20.37
4	Jawa Tengah	24,846	23,933	8,807	24,846	21,541	5,213	96.33	35.45	100.00	86.70	20.98
5	DI Yogyakarta	2,727	2,576	1,143	2,727	2,209	610	94.46	41.91	100.00	81.00	22.37
6	Jawa Timur	27,409	26,396	8,916	27,409	21,422	6,670	96.30	32.53	100.00	78.16	24.34
7	Aceh	5,165	4,546	1,818	5,165	4,898	911	88.02	35.20	100.00	94.83	17.64
8	Sumatera Utara	13,938	11,341	6,714	13,938	10,711	2,843	81.37	48.17	100.00	76.85	20.40
9	Sumatera Barat	5,525	5,149	2,745	5,525	5,153	791	93.19	49.68	100.00	93.27	14.32
10	Riau	5,378	4,772	1,774	5,378	4,531	657	88.73	32.99	100.00	84.25	12.22
11	Kepulauan Riau	1,424	1,277	593	1,424	1,058	149	89.68	41.64	100.00	74.30	10.46
12	Jambi	3,439	2,921	1,114	3,439	3,175	498	84.94	32.39	100.00	92.32	14.48
13	Sumatera Selatan	6,738	6,032	3,074	6,738	5,793	698	89.52	45.62	100.00	85.98	10.36
14	Bangka Belitung	1,125	991	470	1,125	1,014	127	88.09	41.78	100.00	90.13	11.29
15	Bengkulu	1,996	1,801	591	1,996	1,866	263	90.23	29.61	100.00	93.49	13.18
16	Lampung	6,813	6,129	2,836	6,813	5,567	1,035	89.96	41.63	100.00	81.71	15.19
17	Kalimantan Barat	6,139	5,058	1,362	6,139	5,501	833	82.39	22.19	100.00	89.61	13.57
18	Kalimantan Tengah	3,761	3,363	1,175	3,761	3,467	290	89.42	31.24	100.00	92.18	7.71
19	Kalimantan Selatan	3,810	3,548	1,042	3,810	3,579	717	93.12	27.35	100.00	93.94	18.82
20	Kalimantan Timur	2,869	2,552	811	2,869	2,364	323	88.95	28.27	100.00	82.40	11.26
21	Kalimantan Utara	688	556	168	688	626	103	80.81	24.42	100.00	90.99	14.97
22	Sulawesi Utara	3,310	2,767	2,050	3,310	2,961	652	83.60	61.93	100.00	89.46	19.70
23	Gorontalo	1,361	1,243	690	1,361	1,344	174	91.33	50.70	100.00	98.75	12.78
24	Sulawesi Tengah	4,022	3,173	1,257	4,022	3,844	639	78.89	31.25	100.00	95.57	15.89
25	Sulawesi Selatan	9,001	8,456	3,636	9,001	8,248	1,547	93.95	40.40	100.00	91.63	17.19
26	Sulawesi Barat	1,851	1,616	522	1,851	1,760	227	87.30	28.20	100.00	95.08	12.26
27	Sulawesi Tenggara	3,460	2,936	873	3,460	3,275	511	84.86	25.23	100.00	94.65	14.77
28	Maluku	2,688	1,918	1,007	2,688	2,550	523	71.35	37.46	100.00	94.87	19.46
29	Maluku Utara	2,012	1,367	615	2,012	1,879	238	67.94	30.57	100.00	93.39	11.83
30	Bali	3,176	3,049	921	3,176	2,835	812	96.00	29.00	100.00	89.26	25.57
31	Nusa Tenggara Barat	4,560	4,223	865	4,560	3,929	1,062	92.61	18.97	100.00	86.16	23.29
32	Nusa Tenggara Timur	7,225	4,582	1,967	7,225	6,771	1,397	63.42	27.22	100.00	93.72	19.34
33	Papua	3,202	1,940	651	3,202	2,946	287	60.59	20.33	100.00	92.00	8.96
34	Papua Barat	1,403	1,031	393	1,403	1,326	152	73.49	28.01	100.00	94.51	10.83
	Indonesia	211,869	190,130	76,143	211,869	178,138	39,314	89.74	35.94	100.00	84.08	18.56

Tabel 4.28B menunjukkan jumlah guru dan indikator SDM dikdasmen berdasarkan 5 indikator. Secara nasional, guru dikdasmen sebesar 2.861.290 orang, yang layak sebesar 2.416.553 orang, perempuan sebesar 1.700.038 orang, tetap sebesar 1.949.487 orang, PNS sebesar 1.582.517 orang, dan pensiun 283.802 orang.

Berdasarkan Tabel 4.28B, secara nasional %GL Dikdasmen sebesar 84,46% berarti masih terdapat 15,54% guru dikdasmen belum layak atau perlu disetarakan dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 90,73% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 63,89%. %GP Dikdasmen sebesar 59,42% berarti guru perempuan dikdasmen sudah lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki dan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,34% dan terkecil di Papua sebesar 50,95%. %GT Dikdasmen sebesar 68,13% yang berarti masih terdapat 31,87% guru dengan status tidak tetap dan terbesar di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 77,10% dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 55,46%. %GPNS Dikdasmen sebesar 55,31% yang berarti guru dikdasmen dengan status kepegawaian PNS hanya 55,31% dan terbesar di Provinsi Maluku sebesar 71,18% dan terkecil di DKI Jakarta sebesar 39,51%. %GPen Dikdasmen sebesar 9,92% dan terbesar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15,19% dan terkecil di Maluku Utara sebesar 4,27%.

Tabel 4.28B
Data dan Indikator Guru Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator SDM				
		Guru	GL	GP	GT	GPNS	GPen	%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen
1	DKI Jakarta	79,720	69,908	49,219	57,114	31,496	12,110	87.69	61.74	71.64	39.51	15.19
2	Jawa Barat	385,689	344,373	220,147	258,514	187,138	35,609	89.29	57.08	67.03	48.52	9.23
3	Banten	98,788	85,812	57,314	65,816	44,046	5,963	86.86	58.02	66.62	44.59	6.04
4	Jawa Tengah	332,771	301,934	185,494	237,299	192,847	41,580	90.73	55.74	71.31	57.95	12.50
5	DI Yogyakarta	42,175	37,536	24,347	32,515	25,362	6,793	89.00	57.73	77.10	60.14	16.11
6	Jawa Timur	369,897	335,597	204,372	268,532	200,557	45,374	90.73	55.25	72.60	54.22	12.27
7	Aceh	89,932	71,910	60,401	54,410	51,802	8,293	79.96	67.16	60.50	57.60	9.22
8	Sumatera Utara	188,891	148,215	125,306	136,393	102,365	21,007	78.47	66.34	72.21	54.19	11.12
9	Sumatera Barat	81,665	72,025	57,443	58,417	53,890	9,652	88.20	70.34	71.53	65.99	11.82
10	Riau	84,971	70,911	56,220	51,715	41,970	5,412	83.45	66.16	60.86	49.39	6.37
11	Kepulauan Riau	21,481	18,324	13,474	13,944	9,803	963	85.30	62.73	64.91	45.64	4.48
12	Jambi	46,324	36,742	28,239	30,907	28,484	4,415	79.32	60.96	66.72	61.49	9.53
13	Sumatera Selatan	102,420	82,711	66,128	61,901	55,694	8,686	80.76	64.57	60.44	54.38	8.48
14	Bangka Belitung	14,735	11,892	8,960	11,137	10,443	1,198	80.71	60.81	75.58	70.87	8.13
15	Bengkulu	28,386	23,770	16,955	19,673	18,430	2,522	83.74	59.73	69.31	64.93	8.88
16	Lampung	94,947	75,468	58,153	66,301	54,154	9,657	79.48	61.25	69.83	57.04	10.17
17	Kalimantan Barat	63,238	46,978	34,580	42,452	38,641	5,953	74.29	54.68	67.13	61.10	9.41
18	Kalimantan Tengah	39,872	32,244	23,853	30,205	27,741	2,566	80.87	59.82	75.75	69.58	6.44
19	Kalimantan Selatan	47,711	41,096	28,131	34,662	32,503	4,737	86.14	58.96	72.65	68.12	9.93
20	Kalimantan Timur	43,278	36,206	25,837	29,581	24,396	2,699	83.66	59.70	68.35	56.37	6.24
21	Kalimantan Utara	9,583	7,230	5,146	6,472	6,056	450	75.45	53.70	67.54	63.20	4.70
22	Sulawesi Utara	35,017	26,271	23,916	26,869	23,300	4,680	75.02	68.30	76.73	66.54	13.36
23	Gorontalo	15,628	13,360	10,701	10,324	10,165	1,436	85.49	68.47	66.06	65.04	9.19
24	Sulawesi Tengah	44,894	32,677	27,154	30,074	28,758	2,979	72.79	60.48	66.99	64.06	6.64
25	Sulawesi Selatan	124,975	108,516	79,751	80,864	73,441	11,149	86.83	63.81	64.70	58.76	8.92
26	Sulawesi Barat	21,256	15,219	12,384	11,788	11,179	1,174	71.60	58.26	55.46	52.59	5.52
27	Sulawesi Tenggara	44,312	36,157	26,388	27,830	26,451	2,540	81.60	59.55	62.80	59.69	5.73
28	Maluku	32,543	21,602	20,734	24,298	23,163	2,906	66.38	63.71	74.66	71.18	8.93
29	Maluku Utara	19,761	12,626	11,721	13,276	12,587	843	63.89	59.31	67.18	63.70	4.27
30	Bali	48,561	43,603	25,411	34,537	30,637	6,571	89.79	52.33	71.12	63.09	13.53
31	Nusa Tenggara Barat	71,422	59,871	37,124	40,534	33,882	5,528	83.83	51.98	56.75	47.44	7.74
32	Nusa Tenggara Timur	93,927	66,873	52,637	52,852	46,168	6,253	71.20	56.04	56.27	49.15	6.66
33	Papua	29,159	18,751	14,857	19,190	16,652	1,413	64.31	50.95	65.81	57.11	4.85
34	Papua Barat	13,361	10,145	7,541	9,091	8,316	691	75.93	56.44	68.04	62.24	5.17
	Indonesia	2,861,290	2,416,553	1,700,038	1,949,487	1,582,517	283,802	84.46	59.42	68.13	55.31	9.92

C. Kinerja Berdasarkan Sumber Daya Manusia

Kinerja SDM seperti halnya analisis SDM juga dirinci menurut penjumlahan KS dan guru (KSG), kepala sekolah (KS), dan guru (G) yang terdiri dari SD, SLB, SMA, SMA, SMK, dan dikdasmen. Kinerja SDM juga menggunakan lima jenis indikator pendidikan, yaitu %KSG, %KSGP, %KSGT, %KSGPNS, dan %KSGPen. Hanya %KSGP dan %KSGPen yang mengalami konversi menggunakan standar pada Tabel 3.5. Rata-rata dari kelima nilai indikator merupakan kinerja SDM dan jenis kinerjanya seperti disajikan pada Tabel 3.6.

Sesuai dengan perhitungan kinerja yang dijelaskan pada metodologi maka pada Tabel 4.29 dapat dilihat kinerja menurut jenjang pendidikan dan indikator SDM. Berdasarkan perhitungan tersebut maka untuk KS dan guru SD memiliki kinerja sebesar 76,37 termasuk kurang, namun bila hanya KS SD kinerjanya sebesar 88,00 termasuk madya, sedangkan guru SD kinerjanya sebesar 74,83 termasuk kurang. Untuk KS dan guru SLB sebesar 74,96 termasuk kurang, demikian juga KS SLB sebesar 73,97 termasuk kurang, dan guru SLB sebesar 74,59 termasuk kurang. Untuk KS dan guru SMP sebesar 79,16 termasuk kurang, KS SMP sebesar 80,31 termasuk pratama, dan guru SMP sebesar 78,55 termasuk kurang.

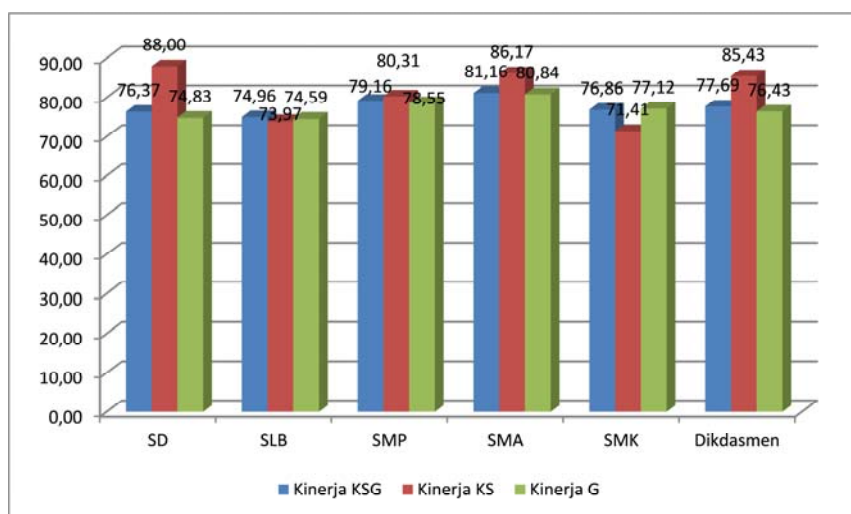
Tabel 4.29
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru menurut Indikator dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016

No.	Variabel	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Dikdasmen	Jenis
A.	KS dan Guru							
1	%KSG	81.05	80.04	87.25	95.51	92.43	84.82	PRATAMA
2	%KSGP	79.31	73.86	98.32	88.98	91.25	86.51	MADYA
3	%KSGT	69.89	83.08	69.67	73.18	70.51	70.33	KURANG
4	%KSGPNS	62.98	45.79	52.25	54.92	36.18	57.29	KURANG
5	%KSGPen	88.60	92.01	88.32	93.23	93.91	89.49	MADYA
	Kinerja	76.37	74.96	79.16	81.16	76.86	77.69	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	KURANG	
B.	Kepala Sekolah							
1	%KSL	89.08	46.43	94.53	83.27	96.57	89.74	MADYA
2	%KSP	79.71	76.86	45.06	93.32	36.70	71.88	KURANG
3	%KST	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
4	%KSPNS	94.12	51.94	68.33	60.07	42.20	84.08	PRATAMA
5	%KSGPen	77.11	94.60	93.63	94.18	81.55	81.44	PRATAMA
	Kinerja	88.00	73.97	80.31	86.17	71.41	85.43	MADYA
	Jenis	MADYA	KURANG	PRATAMA	MADYA	KURANG	MADYA	
C.	Guru							
1	%GL	80.33	82.69	86.83	96.05	92.23	84.46	PRATAMA
2	%GP	76.78	71.42	98.64	88.30	93.90	84.15	PRATAMA
3	%GT	67.20	81.74	67.93	71.98	69.08	68.13	KURANG
4	%GPNS	60.19	45.31	51.33	54.69	35.89	55.31	KURANG
5	%GPen	89.63	91.81	88.02	93.19	94.51	90.08	UTAMA
	Kinerja	74.83	74.59	78.55	80.84	77.12	76.43	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	KURANG	

Untuk KS dan guru SMA sebesar 81,16 termasuk pratama, sedangkan KS SMA sebesar 86,17 termasuk madya, dan guru SMA sebesar 80,84 termasuk pratama.

Untuk KS dan guru SMK sebesar 76,86 termasuk kurang, demikian juga KS SMK sebesar 71,41 termasuk kurang, dan guru SMK sebesar 77,12 termasuk kurang. Dengan demikian untuk KS dan guru dikdasmen sebesar 77,69 termasuk kurang, KS dikdasmen sebesar 85,47 termasuk madya, dan guru dikdasmen sebesar 76,43 termasuk kurang. Dengan demikian, kinerja KS di semua jenjang kecuali SLB dan SMK lebih baik daripada kinerja guru. Kinerja KS SD termasuk madya dan guru SD termasuk kurang, kinerja KS SMP termasuk pratama dan guru SMP termasuk kurang, kinerja KS SMA termasuk madya dan guru SMA termasuk pratama

Grafik 4.4
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016



1. SD

Berdasarkan Tabel 4.30, secara nasional kinerja KS dan guru SD sebesar 76,37 termasuk kategori kurang akibat %KSGT, %KSGPNS, dan %KSGP dalam kondisi kurang. Kinerja KS dan guru SD terbesar di Provinsi Bali sebesar 82,89 termasuk kategori pratama dan terkecil di Aceh sebesar 71,35 termasuk kategori kurang. Walaupun secara nasional kinerja SDM SD termasuk kategori kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat empat provinsi, yaitu Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan termasuk pratama, sisanya 30 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 70 akibat rendahnya nilai %KSGT terjadi di 13 provinsi dan rendahnya nilai %KSGPNS terjadi di 25 provinsi. Perbedaan antara nilai KS dan guru SD tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS dan guru sebesar 11,54 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

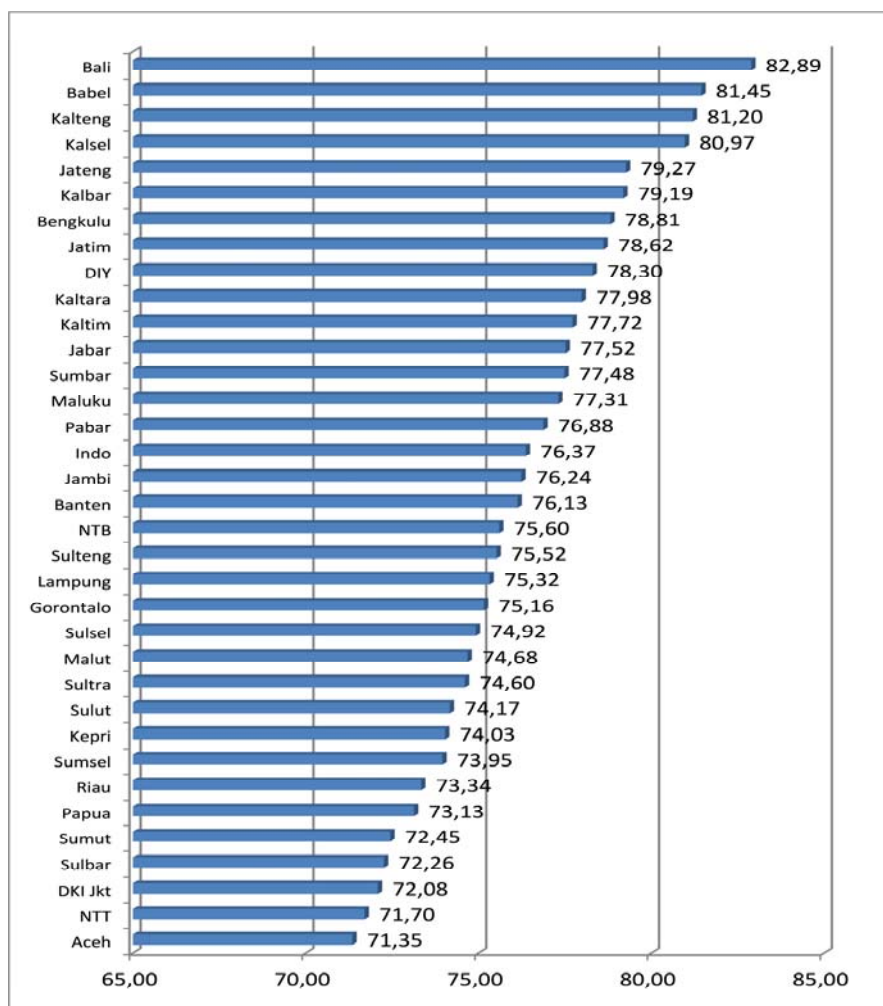
Kinerja KS dan guru SD disajikan pada Grafik 4.5 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Bali sebesar 82,89 sampai yang terendah, yaitu Aceh sebesar

71,35. Lima kinerja tertinggi adalah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Lima kinerja terendah adalah Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara.

Tabel 4.30
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	85.08	71.06	72.90	45.61	85.78	72.08	KURANG
2	Jawa Barat	89.74	82.14	67.82	59.36	88.55	77.52	KURANG
3	Banten	86.12	80.99	67.01	55.03	91.50	76.13	KURANG
4	Jawa Tengah	89.93	84.47	71.01	65.80	85.12	79.27	KURANG
5	DI Yogyakarta	87.48	78.39	77.56	63.40	84.66	78.30	KURANG
6	Jawa Timur	89.92	86.88	69.74	61.65	84.88	78.62	KURANG
7	Aceh	72.88	69.38	62.82	61.31	90.37	71.35	KURANG
8	Sumatera Utara	71.67	67.76	73.44	61.70	87.67	72.45	KURANG
9	Sumatera Barat	87.05	65.39	73.62	69.94	91.42	77.48	KURANG
10	Riau	80.19	71.82	65.09	55.70	93.89	73.34	KURANG
11	Kepulauan Riau	82.99	75.25	68.02	48.63	95.26	74.03	KURANG
12	Jambi	72.37	79.01	72.45	68.75	88.61	76.24	KURANG
13	Sumatera Selatan	75.38	72.25	67.42	64.09	90.63	73.95	KURANG
14	Bangka Belitung	77.20	76.70	83.74	80.27	89.33	81.45	PRATAMA
15	Bengkulu	78.78	80.77	74.99	71.13	88.40	78.81	KURANG
16	Lampung	75.79	75.95	70.50	66.08	88.27	75.32	KURANG
17	Kalimantan Barat	68.98	92.96	74.60	71.43	87.97	79.19	KURANG
18	Kalimantan Tengah	75.67	82.57	80.25	74.59	92.89	81.20	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	83.43	84.34	75.70	72.40	88.97	80.97	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	79.20	79.26	72.78	64.32	93.04	77.72	KURANG
21	Kalimantan Utara	66.29	91.60	71.71	67.80	92.52	77.98	KURANG
22	Sulawesi Utara	68.44	63.51	80.04	69.65	89.20	74.17	KURANG
23	Gorontalo	82.34	66.42	67.54	66.56	92.91	75.16	KURANG
24	Sulawesi Tengah	63.37	79.90	71.90	70.16	92.27	75.52	KURANG
25	Sulawesi Selatan	84.12	71.97	64.80	62.32	91.41	74.92	KURANG
26	Sulawesi Barat	65.12	83.14	60.21	59.55	93.31	72.26	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	74.18	79.77	64.28	63.25	91.54	74.60	KURANG
28	Maluku	56.01	74.02	84.41	81.33	90.77	77.31	KURANG
29	Maluku Utara	46.62	80.08	78.20	75.23	93.30	74.68	KURANG
30	Bali	89.79	91.21	76.22	71.32	85.90	82.89	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	79.77	95.20	59.09	56.17	87.76	75.60	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	59.89	85.64	63.03	59.13	90.81	71.70	KURANG
33	Papua	47.50	92.96	70.79	60.83	93.58	73.13	KURANG
34	Papua Barat	63.36	90.78	71.49	65.54	93.22	76.88	KURANG
	Indonesia	81.05	79.31	69.89	62.98	88.60	76.37	KURANG

Grafik 4.5
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.30A, secara nasional kinerja KS SD sebesar 88,00 termasuk kategori madya, karena %KST sebesar 100, %KSPNS sebesar 94,12 dan %KSL sebesar 89,08. Kinerja KS SD terbesar di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 93,57 termasuk kategori utama dan terkecil di Papua sebesar 74,27% termasuk kategori kurang. Walaupun secara nasional termasuk madya, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 7 provinsi termasuk utama, 11 provinsi termasuk madya, 6 provinsi termasuk pratama, dan 4 provinsi termasuk kurang, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 80 akibat rendahnya nilai %KSP terjadi di 20 provinsi dan rendahnya nilai %KSPen terjadi di 15 provinsi. Perbedaan

antara nilai KS SD tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 19,30 yang cukup besar karena lebih dari 10%

Tabel 4.30A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	93.73	81.08	100.00	70.39	78.02	84.64	PRATAMA
2	Jawa Barat	97.56	81.84	100.00	93.35	73.62	89.27	MADYA
3	Banten	93.59	80.41	100.00	89.32	72.03	87.07	MADYA
4	Jawa Tengah	97.65	77.34	100.00	95.82	76.02	89.37	MADYA
5	DI Yogyakarta	97.39	90.00	100.00	89.67	75.65	90.54	UTAMA
6	Jawa Timur	97.88	70.70	100.00	92.76	69.17	86.10	MADYA
7	Aceh	86.79	81.88	100.00	98.56	77.47	88.94	MADYA
8	Sumatera Utara	76.74	89.60	100.00	88.60	74.02	85.79	MADYA
9	Sumatera Barat	94.32	86.26	100.00	97.65	84.00	92.45	UTAMA
10	Riau	86.94	68.55	100.00	89.95	84.31	85.95	MADYA
11	Kepulauan Riau	89.88	89.54	100.00	78.97	86.05	88.89	MADYA
12	Jambi	81.22	73.65	100.00	96.63	82.16	86.73	MADYA
13	Sumatera Selatan	88.72	96.52	100.00	94.79	87.82	93.57	UTAMA
14	Bangka Belitung	89.11	91.86	100.00	95.24	86.86	92.62	UTAMA
15	Bengkulu	88.63	64.94	100.00	96.75	83.84	86.83	MADYA
16	Lampung	89.52	94.58	100.00	94.94	80.95	92.00	UTAMA
17	Kalimantan Barat	79.77	42.20	100.00	96.18	83.09	80.25	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	87.62	66.54	100.00	94.77	90.96	87.98	MADYA
19	Kalimantan Selatan	93.00	58.34	100.00	97.17	77.90	85.28	MADYA
20	Kalimantan Timur	87.13	64.56	100.00	91.60	86.64	85.99	MADYA
21	Kalimantan Utara	73.67	53.54	100.00	93.58	78.76	79.91	KURANG
22	Sulawesi Utara	80.08	73.15	100.00	96.11	76.41	85.15	MADYA
23	Gorontalo	89.97	85.83	100.00	99.14	84.47	91.88	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	72.94	71.11	100.00	98.88	80.13	84.61	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	93.99	93.63	100.00	97.89	80.15	93.13	UTAMA
26	Sulawesi Barat	85.66	64.07	100.00	99.16	85.20	86.82	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	80.59	59.12	100.00	98.91	80.32	83.79	PRATAMA
28	Maluku	67.67	85.60	100.00	99.13	75.94	85.67	MADYA
29	Maluku Utara	54.55	66.56	100.00	98.04	83.75	80.58	PRATAMA
30	Bali	97.21	63.30	100.00	96.51	71.96	85.80	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	92.43	39.52	100.00	95.86	69.33	79.43	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	56.80	58.70	100.00	99.19	76.49	78.23	KURANG
33	Papua	51.27	35.90	100.00	95.40	88.79	74.27	KURANG
34	Papua Barat	66.84	55.07	100.00	97.75	86.69	81.27	PRATAMA
	Indonesia	89.08	79.71	100.00	94.12	77.11	88.00	MADYA

Berdasarkan Tabel 4.30B, secara nasional kinerja guru SD sebesar 74,83 termasuk kategori kurang dan terbesar di Provinsi Bali sebesar 81,42 termasuk kategori pratama dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 69,72 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk kurang maka 32 provinsi juga termasuk kurang dan 2 provinsi termasuk pratama, yaitu Bangka Belitung dan Bali. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 70 akibat rendahnya %GT di 19 provinsi dan %GPNS di 29 provinsi. Perbedaan antara nilai guru SD tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru antarprovinsi sebesar 11,70 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.30B
Kinerja Guru Tiap Provinsi
Sekolah Dasar, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	84.50	70.47	71.08	43.94	86.30	71.26	KURANG
2	Jawa Barat	89.04	79.82	64.96	56.34	89.87	76.01	KURANG
3	Banten	85.55	78.88	64.48	52.40	93.00	74.86	KURANG
4	Jawa Tengah	89.16	81.63	68.11	62.80	86.03	77.55	KURANG
5	DI Yogyakarta	86.61	76.40	75.58	61.07	85.45	77.02	KURANG
6	Jawa Timur	89.21	83.96	67.02	58.85	86.30	77.07	KURANG
7	Aceh	71.92	67.36	60.24	58.73	91.26	69.90	KURANG
8	Sumatera Utara	71.23	66.36	71.15	59.37	88.85	71.39	KURANG
9	Sumatera Barat	86.39	63.98	71.22	67.41	92.10	76.22	KURANG
10	Riau	79.72	69.33	62.63	53.28	94.57	71.90	KURANG
11	Kepulauan Riau	82.51	73.58	65.79	46.52	95.91	72.86	KURANG
12	Jambi	71.60	76.22	70.04	66.31	89.17	74.67	KURANG
13	Sumatera Selatan	74.34	70.87	64.90	61.71	90.84	72.53	KURANG
14	Bangka Belitung	76.13	74.72	82.28	78.92	89.55	80.32	PRATAMA
15	Bengkulu	77.92	77.58	72.82	68.91	88.80	77.21	KURANG
16	Lampung	74.65	74.22	68.07	63.71	88.87	73.91	KURANG
17	Kalimantan Barat	67.81	87.20	71.84	68.73	88.50	76.82	KURANG
18	Kalimantan Tengah	74.42	78.85	78.19	72.48	93.09	79.41	KURANG
19	Kalimantan Selatan	82.53	80.50	73.42	70.07	90.01	79.30	KURANG
20	Kalimantan Timur	78.62	76.52	70.79	62.32	93.51	76.35	KURANG
21	Kalimantan Utara	65.70	88.02	69.45	65.74	93.62	76.50	KURANG
22	Sulawesi Utara	67.10	62.56	77.73	66.59	90.67	72.93	KURANG
23	Gorontalo	81.53	64.87	64.09	63.11	93.81	73.48	KURANG
24	Sulawesi Tengah	62.39	76.53	69.03	67.22	93.51	73.74	KURANG
25	Sulawesi Selatan	83.26	69.97	61.71	59.20	92.39	73.31	KURANG
26	Sulawesi Barat	63.09	79.47	56.28	55.64	94.11	69.72	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	73.58	76.00	60.93	59.90	92.60	72.60	KURANG
28	Maluku	54.85	71.41	82.85	79.55	92.25	76.18	KURANG
29	Maluku Utara	45.66	75.81	75.57	72.48	94.45	72.79	KURANG
30	Bali	89.11	87.79	74.02	69.00	87.19	81.42	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	78.78	90.79	55.90	53.08	89.20	73.55	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	60.18	81.86	59.59	55.40	92.15	69.84	KURANG
33	Papua	46.96	98.96	66.65	55.92	94.26	72.55	KURANG
34	Papua Barat	62.89	85.02	67.63	61.18	94.11	74.16	KURANG
	Indonesia	80.33	76.78	67.20	60.19	89.63	74.83	KURANG

2. SLB

Berdasarkan Tabel 4.31, secara nasional kinerja KS dan guru SLB sebesar 74,96 termasuk kategori kurang akibat %KSGP dan %KSGPNS dalam kondisi kurang. Kinerja KS dan guru SLB terbesar di Provinsi Bali sebesar 84,87 termasuk kategori pratama dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 63,23 termasuk kategori kurang. Walaupun secara nasional kinerja SDM SLB termasuk kategori kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat dua provinsi, yaitu DI Yogyakarta dan Bali termasuk pratama, sisanya 32 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSGPNS terjadi di 32 provinsi.

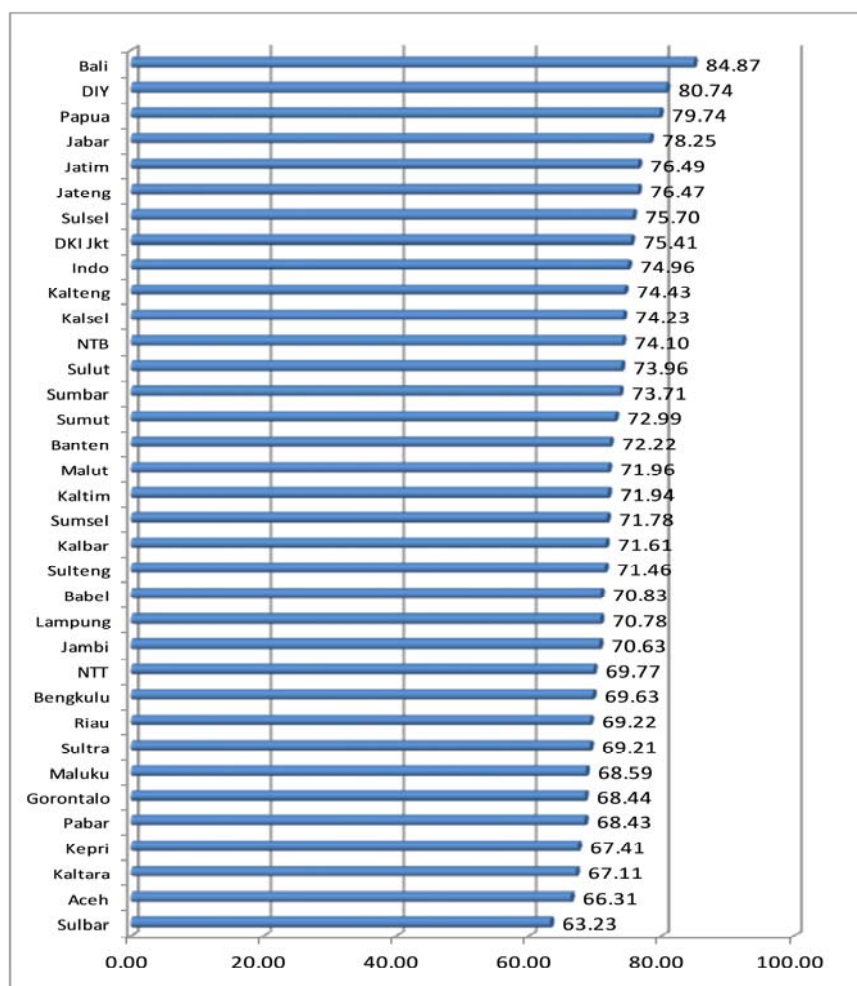
Perbedaan antara nilai KS dan guru SLB tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS dan guru antarprovinsi sebesar 21,64 yang besar karena lebih dari 20%

Tabel 4.31
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	81.42	72.70	90.36	47.35	85.22	75.41	KURANG
2	Jawa Barat	85.88	77.93	91.20	42.29	93.93	78.25	KURANG
3	Banten	74.07	72.30	89.26	27.39	98.09	72.22	KURANG
4	Jawa Tengah	83.44	77.74	84.37	52.98	83.84	76.47	KURANG
5	DI Yogyakarta	89.08	76.51	97.61	60.28	80.21	80.74	PRATAMA
6	Jawa Timur	82.98	74.31	89.53	42.55	93.07	76.49	KURANG
7	Aceh	73.11	69.49	58.43	36.77	93.75	66.31	KURANG
8	Sumatera Utara	76.14	65.54	77.43	52.00	93.86	72.99	KURANG
9	Sumatera Barat	77.65	63.75	88.90	40.74	97.52	73.71	KURANG
10	Riau	74.81	69.35	72.29	32.56	97.09	69.22	KURANG
11	Kepulauan Riau	79.58	63.25	75.92	20.42	97.91	67.41	KURANG
12	Jambi	81.97	74.24	53.40	48.30	95.24	70.63	KURANG
13	Sumatera Selatan	81.10	70.69	72.36	43.70	91.06	71.78	KURANG
14	Bangka Belitung	55.41	71.36	68.15	66.24	92.99	70.83	KURANG
15	Bengkulu	73.43	72.85	63.10	50.55	88.19	69.63	KURANG
16	Lampung	65.32	76.23	71.24	45.70	95.43	70.78	KURANG
17	Kalimantan Barat	70.87	77.44	71.36	46.60	91.75	71.61	KURANG
18	Kalimantan Tengah	86.69	72.94	64.92	57.66	89.92	74.43	KURANG
19	Kalimantan Selatan	81.91	73.85	73.15	48.64	93.58	74.23	KURANG
20	Kalimantan Timur	79.42	72.61	73.88	37.73	96.04	71.94	KURANG
21	Kalimantan Utara	58.00	73.53	52.00	52.00	100.00	67.11	KURANG
22	Sulawesi Utara	76.60	68.65	83.40	47.17	93.96	73.96	KURANG
23	Gorontalo	83.15	66.67	47.28	47.28	97.83	68.44	KURANG
24	Sulawesi Tengah	65.81	72.67	66.24	58.97	93.59	71.46	KURANG
25	Sulawesi Selatan	74.14	69.17	84.58	55.35	95.28	75.70	KURANG
26	Sulawesi Barat	59.91	75.17	48.46	33.92	98.68	63.23	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	63.23	74.27	79.57	31.62	97.34	69.21	KURANG
28	Maluku	61.01	63.10	64.15	59.75	94.97	68.59	KURANG
29	Maluku Utara	66.67	66.89	66.67	64.14	95.45	71.96	KURANG
30	Bali	90.89	87.88	84.24	79.06	82.27	84.87	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	76.66	84.53	79.65	34.70	94.95	74.10	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	71.30	76.10	55.60	48.19	97.65	69.77	KURANG
33	Papua	71.15	85.25	76.92	72.12	93.27	79.74	KURANG
34	Papua Barat	78.13	64.00	68.75	40.63	90.63	68.43	KURANG
	Indonesia	80.04	73.86	83.08	45.79	92.01	74.96	KURANG

Kinerja KS dan guru SLB disajikan pada Grafik 4.6 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Bali sebesar 84,87 sampai yang terendah, yaitu Sulawesi Barat sebesar 63,23. Lima kinerja tertinggi adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tmur. Lima kinerja terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.

Grafik 4.6
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.31A, secara nasional kinerja KS SLB sebesar 73,97 termasuk kategori kurang, walaupun %KST sebesar 100 dan %KSPen sebesar 94,60, namun %KSL sebesar 46,43 dan %KSPNS sebesar 51,94. Kinerja KS SLB terbesar di Provinsi Jambi sebesar 90,36 termasuk kategori utama dan terkecil di Sumatera Barat sebesar 65,19% termasuk kategori kurang. Secara nasional termasuk kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 2 provinsi termasuk utama, 6 provinsi termasuk madya, 10 provinsi termasuk pratama, dan 16 provinsi termasuk kurang dengan nilai kurang 70 akibat rendahnya nilai %KSL terjadi di 31 provinsi dan rendahnya nilai %KSPNS terjadi di 21 provinsi. Perbedaan antara nilai KS SLB tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 25,17 yang besar karena lebih dari 20%.

Tabel 4.31A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	40.23	64.37	100.00	48.28	89.66	68.51	KURANG
2	Jawa Barat	40.79	72.52	100.00	42.49	96.03	70.37	KURANG
3	Banten	44.87	58.97	100.00	24.36	98.72	65.38	KURANG
4	Jawa Tengah	47.31	80.24	100.00	58.68	87.43	74.73	KURANG
5	DI Yogyakarta	42.11	73.68	100.00	51.32	85.53	70.53	KURANG
6	Jawa Timur	41.15	67.33	100.00	47.88	94.51	70.17	KURANG
7	Aceh	55.77	88.46	100.00	59.62	94.23	79.62	KURANG
8	Sumatera Utara	58.70	95.65	100.00	67.39	95.65	83.48	PRATAMA
9	Sumatera Barat	36.30	50.37	100.00	40.74	98.52	65.19	KURANG
10	Riau	57.89	78.95	100.00	39.47	94.74	74.21	KURANG
11	Kepulauan Riau	41.67	66.67	100.00	33.33	100.00	68.33	KURANG
12	Jambi	71.43	87.50	100.00	92.86	100.00	90.36	UTAMA
13	Sumatera Selatan	53.57	85.71	100.00	64.29	92.86	79.29	KURANG
14	Bangka Belitung	44.44	90.00	100.00	88.89	100.00	84.67	PRATAMA
15	Bengkulu	60.00	83.33	100.00	86.67	86.67	83.33	PRATAMA
16	Lampung	50.00	90.00	100.00	65.00	95.00	80.00	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	50.00	100.00	100.00	77.78	94.44	84.44	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	80.00	83.33	100.00	90.00	95.00	89.67	MADYA
19	Kalimantan Selatan	58.06	96.88	100.00	61.29	93.55	81.96	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	51.72	68.97	100.00	37.93	100.00	71.72	KURANG
21	Kalimantan Utara	50.00	66.67	100.00	100.00	100.00	83.33	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	45.45	54.55	100.00	54.55	95.45	70.00	KURANG
23	Gorontalo	75.00	66.67	100.00	100.00	100.00	88.33	MADYA
24	Sulawesi Tengah	55.56	90.00	100.00	83.33	94.44	84.67	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	53.16	83.54	100.00	55.70	97.47	77.97	KURANG
26	Sulawesi Barat	47.62	95.24	100.00	61.90	100.00	80.95	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	49.06	75.47	100.00	45.28	96.23	73.21	KURANG
28	Maluku	66.67	75.00	100.00	91.67	100.00	86.67	MADYA
29	Maluku Utara	53.85	81.25	100.00	100.00	100.00	87.02	MADYA
30	Bali	75.00	88.89	100.00	87.50	93.75	89.03	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	53.85	97.44	100.00	46.15	94.87	78.46	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	61.76	94.44	100.00	82.35	100.00	87.71	MADYA
33	Papua	60.00	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	UTAMA
34	Papua Barat	50.00	100.00	100.00	75.00	75.00	80.00	PRATAMA
	Indonesia	46.43	76.86	100.00	51.94	94.60	73.97	KURANG

Berdasarkan Tabel 4.31B, secara nasional kinerja guru SLB sebesar 74,59 termasuk kategori kurang dan terbesar di Provinsi Bali sebesar 84,70 termasuk kategori pratama dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 61,41 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk kurang maka 32 provinsi juga termasuk kurang dan 2 provinsi termasuk pratama, yaitu DI Yogyakarta dan Bali. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 70 akibat rendahnya %GPNS di 32 provinsi. Perbedaan antara nilai guru SLB tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru antarprovinsi sebesar 23,29 yang besar karena lebih dari 20%.

Tabel 4.31B
Kinerja SM Guru Tiap Provinsi
Sekolah Luar Biasa, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	84.47	69.95	89.64	47.28	84.89	75.25	KURANG
2	Jawa Barat	89.40	75.38	90.51	42.27	93.76	78.26	KURANG
3	Banten	76.30	69.27	88.44	27.62	98.04	71.93	KURANG
4	Jawa Tengah	85.56	76.06	83.45	52.64	83.63	76.27	KURANG
5	DI Yogyakarta	91.74	74.67	97.47	60.79	79.91	80.92	PRATAMA
6	Jawa Timur	87.70	70.35	88.35	41.95	92.91	76.25	KURANG
7	Aceh	74.53	67.37	55.03	34.91	93.71	65.11	KURANG
8	Sumatera Utara	77.37	63.87	75.84	50.92	93.73	72.35	KURANG
9	Sumatera Barat	82.02	59.49	87.72	40.73	97.42	73.48	KURANG
10	Riau	76.15	66.95	70.08	32.01	97.28	68.49	KURANG
11	Kepulauan Riau	82.12	60.88	74.30	19.55	97.77	66.93	KURANG
12	Jambi	82.50	73.68	51.07	46.07	95.00	69.67	KURANG
13	Sumatera Selatan	82.76	69.05	70.69	42.46	90.95	71.18	KURANG
14	Bangka Belitung	56.08	70.48	66.22	64.86	92.57	70.04	KURANG
15	Bengkulu	74.22	72.32	60.94	48.44	88.28	68.84	KURANG
16	Lampung	66.19	74.89	69.60	44.60	95.45	70.15	KURANG
17	Kalimantan Barat	72.87	75.81	68.62	43.62	91.49	70.48	KURANG
18	Kalimantan Tengah	87.28	72.15	61.84	54.82	89.47	73.11	KURANG
19	Kalimantan Selatan	83.44	72.74	71.43	47.83	93.58	73.80	KURANG
20	Kalimantan Timur	81.71	69.72	71.71	37.71	95.71	71.32	KURANG
21	Kalimantan Utara	58.70	74.19	47.83	47.83	100.00	65.71	KURANG
22	Sulawesi Utara	79.42	64.97	81.89	46.50	93.83	73.32	KURANG
23	Gorontalo	83.52	66.67	44.89	44.89	97.73	67.54	KURANG
24	Sulawesi Tengah	66.67	71.52	63.43	56.94	93.52	70.42	KURANG
25	Sulawesi Selatan	75.63	67.15	83.48	55.32	95.13	75.34	KURANG
26	Sulawesi Barat	61.17	73.05	43.20	31.07	98.54	61.41	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	64.71	71.03	77.45	30.20	97.45	68.17	KURANG
28	Maluku	60.54	62.29	61.22	57.14	94.56	67.15	KURANG
29	Maluku Utara	67.57	66.07	64.32	61.62	95.14	70.94	KURANG
30	Bali	91.54	87.84	83.59	78.72	81.79	84.70	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	78.15	83.57	78.32	33.95	94.96	73.79	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	71.92	75.14	52.69	45.96	97.50	68.64	KURANG
33	Papua	72.34	83.93	74.47	70.21	92.55	78.70	KURANG
34	Papua Barat	82.14	60.87	64.29	35.71	92.86	67.17	KURANG
	Indonesia	82.69	71.42	81.74	45.31	91.81	74.59	KURANG

3. SMP

Berdasarkan Tabel 4.32, secara nasional kinerja KS dan guru SMP sebesar 79,16 termasuk kategori kurang akibat %KSGP dan %KSGPNS dalam kondisi kurang. Kinerja KS dan guru SMP terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 83,49 termasuk kategori pratama dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 73,09 termasuk kategori kurang. Walaupun secara nasional kinerja SDM SMP termasuk kategori kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 11 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan termasuk pratama, sisanya 23 provinsi termasuk kurang.

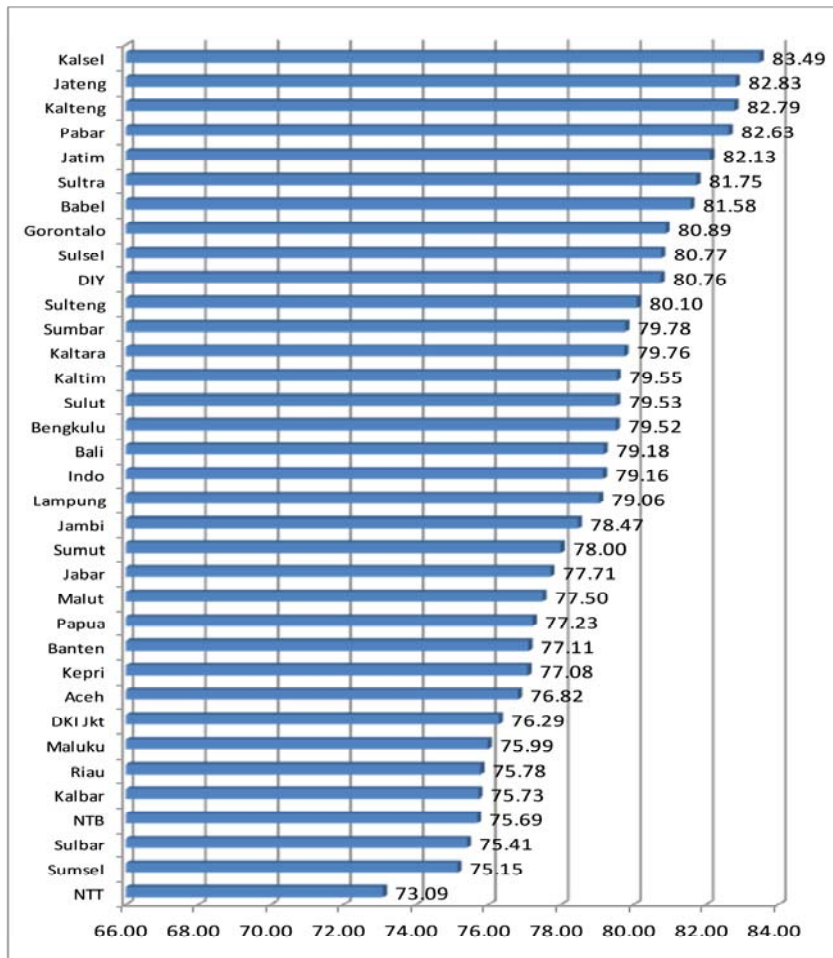
Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSGPNS PNS terjadi di 23 provinsi. Perbedaan antara nilai KS dan guru SMP tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS dan guru SMP antarprovinsi sebesar 10,39 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.32
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	86.74	99.65	75.36	39.79	79.92	76.29	KURANG
2	Jawa Barat	87.87	98.46	69.61	41.81	90.82	77.71	KURANG
3	Banten	85.64	99.30	69.85	36.22	94.51	77.11	KURANG
4	Jawa Tengah	91.64	97.22	77.78	60.46	87.03	82.83	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	87.79	93.48	80.15	64.82	77.55	80.76	PRATAMA
6	Jawa Timur	91.27	96.46	82.77	53.16	86.99	82.13	PRATAMA
7	Aceh	86.03	96.19	59.61	55.67	86.59	76.82	KURANG
8	Sumatera Utara	85.46	97.50	72.49	49.83	84.71	78.00	KURANG
9	Sumatera Barat	86.09	98.13	72.17	67.52	74.97	79.78	KURANG
10	Riau	85.49	98.35	59.87	46.45	88.74	75.78	KURANG
11	Kepulauan Riau	86.73	98.18	62.42	45.07	93.01	77.08	KURANG
12	Jambi	87.73	98.54	61.03	55.75	89.29	78.47	KURANG
13	Sumatera Selatan	86.23	98.72	54.91	46.04	89.85	75.15	KURANG
14	Bangka Belitung	86.00	99.88	66.88	61.26	93.86	81.58	PRATAMA
15	Bengkulu	87.99	96.59	62.17	58.82	92.03	79.52	KURANG
16	Lampung	82.90	99.13	73.47	51.32	88.47	79.06	KURANG
17	Kalimantan Barat	81.61	94.93	59.69	49.91	92.49	75.73	KURANG
18	Kalimantan Tengah	89.12	96.53	71.67	63.52	93.12	82.79	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	91.16	96.52	73.38	68.90	87.47	83.49	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	88.84	99.09	66.08	51.48	92.23	79.55	KURANG
21	Kalimantan Utara	87.24	92.02	63.22	59.36	96.94	79.76	KURANG
22	Sulawesi Utara	79.07	99.02	76.02	67.46	76.11	79.53	KURANG
23	Gorontalo	88.10	96.16	69.32	68.93	81.95	80.89	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	88.29	98.14	63.16	59.67	91.26	80.10	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	89.72	99.26	67.70	59.65	87.53	80.77	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	82.28	97.24	53.89	49.74	93.92	75.41	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	89.65	97.64	64.37	61.99	95.08	81.75	PRATAMA
28	Maluku	69.79	98.80	65.19	61.23	84.94	75.99	KURANG
29	Maluku Utara	80.41	98.77	58.52	53.38	96.41	77.50	KURANG
30	Bali	87.55	97.14	68.11	58.46	84.66	79.18	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	87.35	97.63	55.66	42.28	95.53	75.69	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	80.30	97.06	51.20	42.63	94.28	73.09	KURANG
33	Papua	79.20	93.93	62.82	54.89	95.28	77.23	KURANG
34	Papua Barat	88.48	97.52	69.04	63.94	94.17	82.63	PRATAMA
	Indonesia	87.25	98.32	69.67	52.25	88.32	79.16	KURANG

Kinerja KS dan guru SMP disajikan pada Grafik 4.7 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 83,49 sampai yang terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 73,09. Lima kinerja terbesar adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Jawa Timur. Lima kinerja terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Grafik 4.7
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.32A, secara nasional kinerja KS SMP sebesar 80,31 termasuk kategori pratama, walaupun %KST sebesar 100, %KSL sebesar 94,53, dan %KSPen sebesar 93,63, namun %KSP sebesar 45,06 dan %KSPNS sebesar 68,33. Kinerja KS SMA terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 93,52 termasuk kategori utama dan terkecil di Jawa Timur sebesar 76,02% termasuk kategori kurang. Secara nasional termasuk pratama, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 2 provinsi termasuk utama, yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo, 7 provinsi termasuk madya, 13 provinsi termasuk pratama, dan 12 provinsi termasuk kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSP terjadi di 28 provinsi dan rendahnya nilai %KSPNS terjadi di 6 provinsi. Perbedaan antara nilai KS SMA tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 17,58 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.32A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	97.00	65.29	100.00	31.80	87.24	76.27	KURANG
2	Jawa Barat	98.61	45.03	100.00	50.13	94.86	77.72	KURANG
3	Banten	97.83	45.73	100.00	50.30	95.50	77.87	KURANG
4	Jawa Tengah	96.00	42.16	100.00	65.51	93.26	79.39	KURANG
5	DI Yogyakarta	97.69	70.21	100.00	69.52	88.45	85.17	MADYA
6	Jawa Timur	98.13	40.22	100.00	47.13	94.63	76.02	KURANG
7	Aceh	92.96	44.55	100.00	93.25	91.71	84.49	PRATAMA
8	Sumatera Utara	93.14	52.48	100.00	57.69	93.22	79.31	KURANG
9	Sumatera Barat	98.05	46.23	100.00	90.13	91.56	85.19	MADYA
10	Riau	95.19	57.30	100.00	78.74	94.92	85.23	MADYA
11	Kepulauan Riau	93.46	71.65	100.00	73.21	97.82	87.23	MADYA
12	Jambi	96.97	36.04	100.00	88.20	93.94	83.03	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	95.03	53.57	100.00	73.30	94.71	83.32	PRATAMA
14	Bangka Belitung	90.91	65.66	100.00	82.32	93.94	86.57	MADYA
15	Bengkulu	96.84	43.20	100.00	91.75	94.42	85.24	MADYA
16	Lampung	93.27	50.62	100.00	59.29	94.20	79.47	KURANG
17	Kalimantan Barat	89.53	37.81	100.00	79.21	94.44	80.20	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	94.89	49.30	100.00	88.25	95.79	85.64	MADYA
19	Kalimantan Selatan	96.71	33.22	100.00	90.83	93.08	82.77	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	96.26	31.92	100.00	73.68	95.59	79.49	KURANG
21	Kalimantan Utara	100.00	27.63	100.00	94.74	95.39	83.55	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	91.83	93.07	100.00	78.51	90.83	90.85	UTAMA
23	Gorontalo	94.65	78.62	100.00	99.69	94.65	93.52	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	95.99	34.79	100.00	89.61	95.37	83.15	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	97.69	39.65	100.00	84.55	93.18	83.01	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	95.47	32.63	100.00	92.15	96.98	83.44	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	97.33	25.56	100.00	93.40	94.80	82.22	PRATAMA
28	Maluku	74.07	48.82	100.00	89.73	88.38	80.20	PRATAMA
29	Maluku Utara	92.34	44.59	100.00	84.91	95.50	83.47	PRATAMA
30	Bali	96.72	23.74	100.00	73.48	88.13	76.41	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	97.23	15.88	100.00	74.85	92.78	76.15	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	74.33	31.65	100.00	85.10	90.28	76.27	KURANG
33	Papua	80.24	39.18	100.00	82.96	96.76	79.83	KURANG
34	Papua Barat	86.89	44.94	100.00	89.14	95.13	83.22	PRATAMA
	Indonesia	94.53	45.06	100.00	68.33	93.63	80.31	PRATAMA

Berdasarkan Tabel 4.32B, secara nasional kinerja guru SMP sebesar 78,55 termasuk kategori kurang karena adanya %GPNS SMP termasuk kategori kurang dan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 83,36 termasuk kategori pratama dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 72,36 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk kurang maka 26 provinsi juga termasuk kurang dan 8 provinsi termasuk pratama, yaitu Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 60 akibat rendahnya %GPNS di 27 provinsi. Perbedaan antara nilai guru guru SMA tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru antarprovinsi sebesar 11,00 yang cukup besar karena lebih dari 10%

Tabel 4.32B
Kinerja Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Pertama, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	86.17	97.75	73.99	40.23	79.52	75.53	KURANG
2	Jawa Barat	87.27	98.57	67.92	41.34	90.59	77.14	KURANG
3	Banten	84.86	97.32	67.91	35.32	94.45	75.97	KURANG
4	Jawa Tengah	91.45	99.64	76.81	60.24	86.76	82.98	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	87.33	94.57	79.22	64.60	77.04	80.55	PRATAMA
6	Jawa Timur	90.90	99.50	81.84	53.48	86.57	82.46	PRATAMA
7	Aceh	85.71	93.65	57.70	53.89	86.34	75.46	KURANG
8	Sumatera Utara	85.02	99.89	70.90	49.38	84.21	77.88	KURANG
9	Sumatera Barat	85.58	95.87	70.97	66.55	74.26	78.65	KURANG
10	Riau	84.91	95.89	57.51	44.55	88.38	74.25	KURANG
11	Kepulauan Riau	86.28	96.27	59.91	43.19	92.69	75.67	KURANG
12	Jambi	87.16	97.63	58.61	53.74	89.00	77.23	KURANG
13	Sumatera Selatan	85.77	96.31	52.51	44.59	89.59	73.76	KURANG
14	Bangka Belitung	85.69	97.70	64.74	59.90	93.86	80.38	PRATAMA
15	Bengkulu	87.46	99.76	59.92	56.87	91.89	79.18	KURANG
16	Lampung	82.28	97.97	71.87	50.84	88.12	78.21	KURANG
17	Kalimantan Barat	80.92	99.93	56.17	47.35	92.32	75.34	KURANG
18	Kalimantan Tengah	88.60	99.15	69.07	61.26	92.88	82.19	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	90.82	99.57	71.73	67.54	87.13	83.36	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	88.39	96.91	64.01	50.12	92.03	78.29	KURANG
21	Kalimantan Utara	86.37	96.41	60.72	56.95	97.04	79.50	KURANG
22	Sulawesi Utara	78.08	99.51	74.15	66.60	74.96	78.66	KURANG
23	Gorontalo	87.57	94.31	66.86	66.46	80.93	79.23	KURANG
24	Sulawesi Tengah	87.68	96.90	60.21	57.28	90.93	78.60	KURANG
25	Sulawesi Selatan	89.28	97.51	65.92	58.28	87.22	79.64	KURANG
26	Sulawesi Barat	81.31	98.03	50.49	46.61	93.69	74.03	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	89.13	97.54	61.95	59.86	95.09	80.72	PRATAMA
28	Maluku	69.47	97.55	62.61	59.11	84.68	74.69	KURANG
29	Maluku Utara	79.35	96.53	54.83	50.57	96.49	75.55	KURANG
30	Bali	87.24	99.59	67.04	57.96	84.54	79.28	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	86.87	98.39	53.49	40.68	95.66	75.02	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	80.69	98.69	48.02	39.86	94.54	72.36	KURANG
33	Papua	79.12	98.44	59.76	52.58	95.16	77.01	KURANG
34	Papua Barat	88.61	98.23	66.52	61.89	94.09	81.87	PRATAMA
	Indonesia	86.83	98.64	67.93	51.33	88.02	78.55	KURANG

4. SMA

Berdasarkan Tabel 4.33, secara nasional kinerja KS dan guru SMA sebesar 81,16 termasuk kategori pratama akibat %KSGT dan %KSGPNS dalam kondisi kurang. Kinerja KS dan guru SMA terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 86,03 termasuk kategori madya dan terkecil di Sumatera Selatan sebesar 75,77 termasuk kategori kurang. Walaupun secara nasional kinerja SDM SMA termasuk kategori pratama, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 4 provinsi termasuk madya, yaitu Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Kalimantan Tengah, 22 provinsi termasuk pratama, dan 8 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSGPNS terjadi di 15 provinsi. Perbedaan antara nilai KS dan guru SMA tertinggi dan terendah

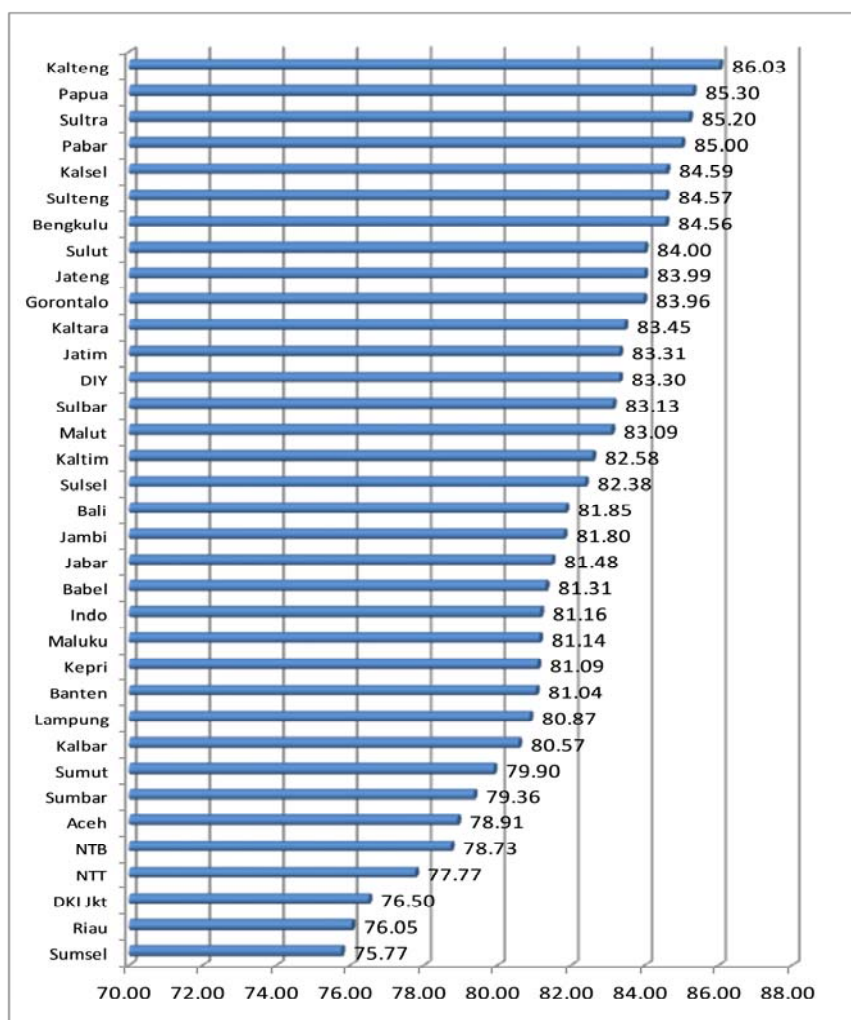
menunjukkan disparitas KS dan guru antarprovinsi sebesar 10,26 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.33
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	95.96	88.76	73.56	39.13	85.11	76.50	KURANG
2	Jawa Barat	95.36	94.78	76.22	49.36	91.66	81.48	PRATAMA
3	Banten	95.39	97.41	74.78	41.10	96.54	81.04	PRATAMA
4	Jawa Tengah	96.00	96.95	78.94	57.20	90.88	83.99	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	95.53	93.42	79.22	62.86	85.50	83.30	PRATAMA
6	Jawa Timur	96.03	98.12	81.08	49.67	91.66	83.31	PRATAMA
7	Aceh	96.05	75.39	66.85	62.16	94.12	78.91	KURANG
8	Sumatera Utara	93.83	81.64	79.00	51.59	93.41	79.90	KURANG
9	Sumatera Barat	96.39	69.80	73.16	66.61	90.83	79.36	KURANG
10	Riau	95.13	75.63	62.68	50.37	96.42	76.05	KURANG
11	Kepulauan Riau	95.39	81.96	70.87	59.11	98.10	81.09	PRATAMA
12	Jambi	96.67	83.15	71.16	61.85	96.18	81.80	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	95.87	78.54	59.99	47.60	96.83	75.77	KURANG
14	Bangka Belitung	92.72	89.71	69.19	57.13	97.79	81.31	PRATAMA
15	Bengkulu	97.20	83.14	74.92	70.16	97.40	84.56	PRATAMA
16	Lampung	94.49	85.70	75.81	53.94	94.43	80.87	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	93.48	95.01	65.80	51.33	97.22	80.57	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	95.82	86.11	78.35	73.37	96.49	86.03	MADYA
19	Kalimantan Selatan	96.88	87.23	75.80	69.09	93.94	84.59	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	95.41	91.54	71.68	57.97	96.29	82.58	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	93.80	95.34	68.61	61.00	98.50	83.45	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	93.22	81.46	82.28	73.60	89.41	84.00	PRATAMA
23	Gorontalo	97.86	78.06	75.37	73.76	94.78	83.96	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	94.81	93.68	70.93	67.19	96.24	84.57	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	96.74	86.84	73.87	63.16	91.27	82.38	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	95.80	99.70	63.80	60.27	96.10	83.13	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	96.80	98.40	68.94	64.24	97.64	85.20	MADYA
28	Maluku	92.35	79.00	70.88	67.48	95.97	81.14	PRATAMA
29	Maluku Utara	93.69	95.84	65.15	62.56	98.21	83.09	PRATAMA
30	Bali	96.56	87.13	76.56	64.17	84.82	81.85	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	96.67	95.15	61.95	43.26	96.64	78.73	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	94.48	98.66	57.31	43.16	95.23	77.77	KURANG
33	Papua	95.11	90.64	74.42	69.03	97.32	85.30	MADYA
34	Papua Barat	95.01	88.11	74.68	69.49	97.71	85.00	MADYA
	Indonesia	95.51	88.98	73.18	54.92	93.23	81.16	PRATAMA

Kinerja KS dan guru SMA disajikan pada Grafik 4.7 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 86,03 sampai yang terendah, yaitu Sumatera Selatan sebesar 75,57. Lima kinerja tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Kalimantan Selatan. Lima kinerja terendah adalah Provinsi Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Grafik 4.8
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.33A, secara nasional kinerja KS SMA sebesar 86,17 termasuk kategori madya, walaupun %KST sebesar 100, %KSL sebesar 83,27, %KSP sebesar 93,32, dan %KSPen sebesar 94,18, namun %KSPNS sebesar 60,07. Kinerja KS SMA terbesar di Provinsi Papua Barat sebesar 92,97 termasuk kategori utama dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar 81,05% termasuk kategori pratama. Secara nasional termasuk madya, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 3 provinsi termasuk utama, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, 12 provinsi termasuk madya, dan 19 provinsi termasuk pratama dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSPNS terjadi di 15 provinsi. Perbedaan antara nilai KS SMA tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 11,92 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.33A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	81.16	94.92	100.00	45.82	90.36	82.45	PRATAMA
2	Jawa Barat	81.05	91.09	100.00	47.19	93.06	82.48	PRATAMA
3	Banten	84.10	94.49	100.00	39.03	96.98	82.92	PRATAMA
4	Jawa Tengah	77.33	94.74	100.00	56.55	91.62	84.05	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	75.00	96.39	100.00	61.88	87.50	84.15	PRATAMA
6	Jawa Timur	83.00	91.67	100.00	44.21	93.62	82.50	PRATAMA
7	Aceh	86.04	55.85	100.00	79.47	94.66	83.20	PRATAMA
8	Sumatera Utara	85.00	93.41	100.00	47.16	94.02	83.92	PRATAMA
9	Sumatera Barat	86.71	67.77	100.00	73.75	92.03	84.05	PRATAMA
10	Riau	84.50	79.42	100.00	70.70	96.37	86.20	MADYA
11	Kepulauan Riau	78.95	75.44	100.00	71.05	97.37	84.56	PRATAMA
12	Jambi	84.76	70.48	100.00	70.00	95.71	84.19	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	82.28	95.44	100.00	60.53	96.14	86.88	MADYA
14	Bangka Belitung	70.77	83.08	100.00	69.23	93.85	83.38	PRATAMA
15	Bengkulu	84.50	55.81	100.00	78.29	96.90	83.10	PRATAMA
16	Lampung	81.82	97.06	100.00	55.19	94.59	85.73	MADYA
17	Kalimantan Barat	83.60	91.01	100.00	63.49	96.30	86.88	MADYA
18	Kalimantan Tengah	87.39	64.35	100.00	79.13	96.52	85.48	MADYA
19	Kalimantan Selatan	86.34	67.76	100.00	75.41	94.54	84.81	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	80.48	81.90	100.00	66.19	96.19	84.95	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	81.82	72.73	100.00	70.91	100.00	85.09	MADYA
22	Sulawesi Utara	87.08	98.56	100.00	70.81	89.00	89.09	MADYA
23	Gorontalo	89.47	35.09	100.00	87.72	94.74	81.40	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	83.07	56.08	100.00	82.01	97.35	83.70	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	86.96	89.86	100.00	65.22	91.12	86.63	MADYA
26	Sulawesi Barat	80.26	47.37	100.00	82.89	94.74	81.05	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	89.63	52.59	100.00	81.48	97.41	84.22	PRATAMA
28	Maluku	82.40	76.80	100.00	81.60	95.60	87.28	MADYA
29	Maluku Utara	85.06	81.61	100.00	78.16	98.28	88.62	MADYA
30	Bali	78.98	99.37	100.00	60.51	87.26	85.22	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	83.92	97.20	100.00	56.64	96.85	86.92	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	84.53	91.53	100.00	78.60	95.76	90.08	UTAMA
33	Papua	89.81	94.17	100.00	82.04	97.09	92.62	UTAMA
34	Papua Barat	90.09	93.69	100.00	82.88	98.20	92.97	UTAMA
	Indonesia	83.27	93.32	100.00	60.07	94.18	86.17	MADYA

Berdasarkan Tabel 4.33B, secara nasional kinerja guru SMA sebesar 80,84 termasuk kategori pratama karena %GPNS sebesar 54,69 walaupun %GL sebesar 96,05, %Gpen sebesar 93,19, %GP sebesar 88,30 dan %GT sebesar 71,98. Kinerja guru SMA terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 85,37 termasuk kategori madya dan terkecil di Sumatera Selatan sebesar 75,24 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk pratama maka 1 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah madya, 24 provinsi ternasuk pratama dan 9 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 60 akibat rendahnya %GPNS di 16 provinsi. Perbedaan antara nilai guru guru SMA tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru antarprovinsi sebesar 10,12 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.33B
Kinerja Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Atas, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	96.63	88.50	72.35	38.82	84.87	76.23	KURANG
2	Jawa Barat	96.02	94.96	75.12	49.46	91.59	81.43	PRATAMA
3	Banten	96.02	97.58	73.36	41.22	96.51	80.94	PRATAMA
4	Jawa Tengah	96.65	97.03	78.21	57.22	90.85	83.99	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	96.32	93.31	78.42	62.90	85.42	83.27	PRATAMA
6	Jawa Timur	96.63	98.43	80.22	49.92	91.58	83.35	PRATAMA
7	Aceh	96.42	73.80	65.62	61.52	94.10	78.29	KURANG
8	Sumatera Utara	94.29	81.11	77.91	51.82	93.38	79.70	KURANG
9	Sumatera Barat	96.66	68.78	72.41	66.40	90.79	79.01	KURANG
10	Riau	95.60	74.34	61.05	49.48	96.42	75.38	KURANG
11	Kepulauan Riau	96.24	80.37	69.37	58.50	98.14	80.52	PRATAMA
12	Jambi	97.18	81.71	69.93	61.50	96.20	81.30	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	96.47	77.67	58.20	47.02	96.86	75.24	KURANG
14	Bangka Belitung	93.82	88.58	67.64	56.53	97.99	80.91	PRATAMA
15	Bengkulu	97.69	81.47	73.96	69.85	97.42	84.08	PRATAMA
16	Lampung	95.11	85.22	74.62	53.88	94.42	80.65	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	94.11	94.20	63.63	50.56	97.28	79.96	KURANG
18	Kalimantan Tengah	96.31	83.92	77.08	73.03	96.49	85.37	MADYA
19	Kalimantan Selatan	97.36	85.62	74.69	68.80	93.92	84.08	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	96.20	90.35	70.19	57.54	96.30	82.12	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	94.45	93.77	66.90	60.46	98.41	82.80	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	93.59	80.51	81.21	73.77	89.44	83.70	PRATAMA
23	Gorontalo	98.19	75.87	74.39	73.21	94.78	83.29	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	95.37	91.60	69.53	66.48	96.19	83.83	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	97.14	86.07	72.81	63.08	91.28	82.08	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	96.55	97.20	62.04	59.17	96.17	82.23	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	97.12	96.34	67.56	63.48	97.65	84.43	PRATAMA
28	Maluku	92.85	77.48	69.43	66.77	95.99	80.50	PRATAMA
29	Maluku Utara	94.28	94.45	62.79	61.50	98.21	82.25	PRATAMA
30	Bali	97.11	86.72	75.83	64.28	84.75	81.74	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	97.14	95.07	60.55	42.77	96.64	78.43	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	94.90	98.96	55.51	41.66	95.21	77.25	KURANG
33	Papua	95.42	89.89	72.95	68.29	97.33	84.78	PRATAMA
34	Papua Barat	95.30	87.19	73.16	68.68	97.68	84.40	PRATAMA
	Indonesia	96.05	88.30	71.98	54.69	93.19	80.84	PRATAMA

5. SMK

Berdasarkan Tabel 4.34, secara nasional kinerja KS dan guru SMK sebesar 76,86 termasuk kategori kurang akibat %KSGPNS sebesar 36,18 dan %KSGT sebesar 70,51 dalam kondisi kurang, walaupun %KSGL sebesar 92,43, %KSGP sebesar 91,25, dan %KSGPen sebesar 93,91. Kinerja KS dan guru SMK terbesar di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 85,34 termasuk kategori madya dan terkecil di Jawa Barat sebesar 71,42 termasuk kategori kurang. Secara nasional kinerja SDM SMK termasuk kategori kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 1 provinsi, yaitu Kalimantan Utara termasuk madya, 13 provinsi termasuk pratama, dan 20 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSGPNS terjadi di 27 provinsi dan %KSGT terjadi di 3

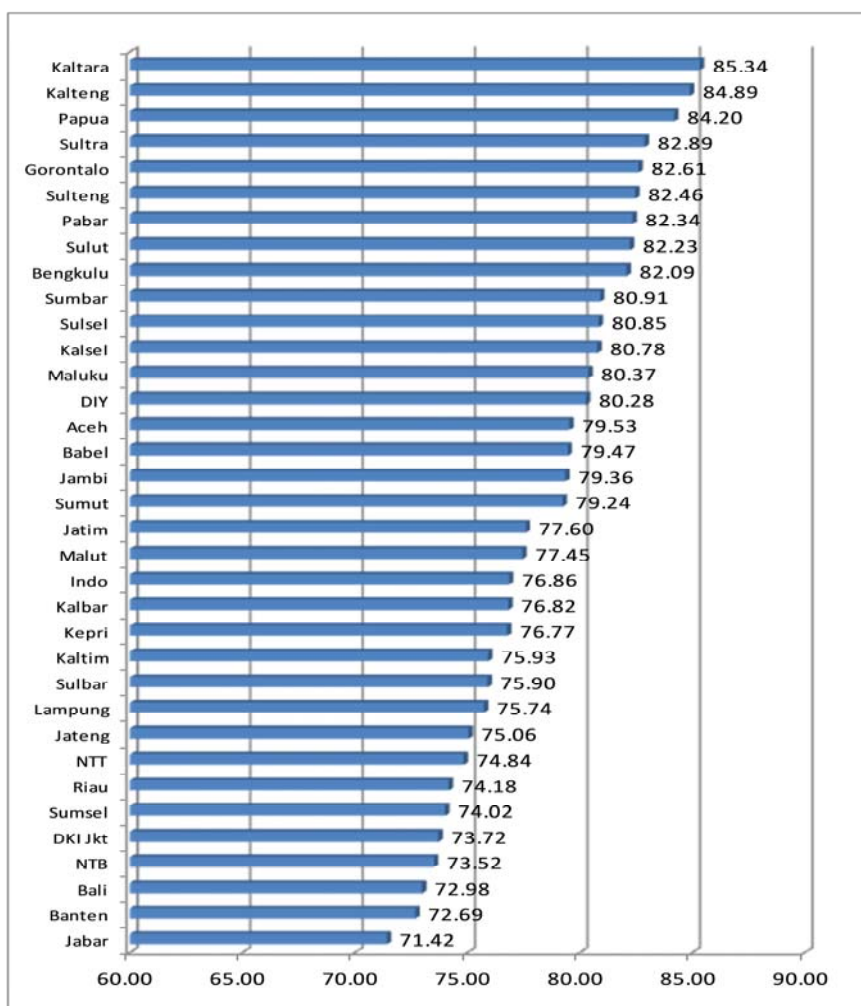
provinsi. Perbedaan antara nilai KS dan guru SMK tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS dan guru SMK antarprovinsi sebesar 13,91 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.34
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	94.78	97.06	68.34	19.89	88.52	73.72	KURANG
2	Jawa Barat	90.08	82.00	69.55	21.16	94.33	71.42	KURANG
3	Banten	92.51	84.10	70.52	20.89	95.42	72.69	KURANG
4	Jawa Tengah	93.66	83.32	72.44	32.49	93.37	75.06	KURANG
5	DI Yogyakarta	93.78	95.99	74.77	49.27	87.60	80.28	PRATAMA
6	Jawa Timur	94.46	87.55	77.54	34.53	93.92	77.60	KURANG
7	Aceh	90.74	90.82	63.80	56.59	95.68	79.53	KURANG
8	Sumatera Utara	91.44	97.94	76.90	35.23	94.69	79.24	KURANG
9	Sumatera Barat	95.31	85.60	71.50	59.53	92.61	80.91	PRATAMA
10	Riau	92.33	91.31	57.00	33.32	96.94	74.18	KURANG
11	Kepulauan Riau	90.35	98.49	67.61	31.10	96.31	76.77	KURANG
12	Jambi	93.80	97.79	61.75	46.78	96.68	79.36	KURANG
13	Sumatera Selatan	91.75	94.35	53.12	36.81	94.06	74.02	KURANG
14	Bangka Belitung	89.89	87.80	65.85	57.33	96.46	79.47	KURANG
15	Bengkulu	93.47	95.80	68.87	56.84	95.44	82.09	PRATAMA
16	Lampung	88.92	92.13	72.64	29.70	95.31	75.74	KURANG
17	Kalimantan Barat	89.90	86.09	64.67	47.16	96.28	76.82	KURANG
18	Kalimantan Tengah	94.67	92.76	74.88	65.93	96.22	84.89	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	94.05	96.28	66.64	53.33	93.58	80.78	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	91.41	92.54	63.56	36.30	95.83	75.93	KURANG
21	Kalimantan Utara	94.75	87.56	77.66	67.77	98.95	85.34	MADYA
22	Sulawesi Utara	93.52	92.23	74.12	60.57	90.71	82.23	PRATAMA
23	Gorontalo	92.18	85.93	71.56	68.57	94.81	82.61	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	91.81	99.74	69.29	55.75	95.74	82.46	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	93.73	96.28	71.76	51.37	91.10	80.85	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	90.73	89.09	60.14	43.08	96.46	75.90	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	92.55	98.41	70.69	55.41	97.37	82.89	PRATAMA
28	Maluku	88.29	92.98	67.61	60.15	92.82	80.37	PRATAMA
29	Maluku Utara	89.86	87.50	59.76	52.36	97.77	77.45	KURANG
30	Bali	92.02	82.42	60.70	41.21	88.57	72.98	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	92.89	75.17	66.47	35.95	97.13	73.52	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	88.76	83.42	62.53	44.84	94.66	74.84	KURANG
33	Papua	91.62	99.75	68.79	62.84	98.00	84.20	PRATAMA
34	Papua Barat	92.91	93.04	68.03	60.93	96.79	82.34	PRATAMA
	Indonesia	92.43	91.25	70.51	36.18	93.91	76.86	KURANG

Kinerja KS dan guru SMK disajikan pada Grafik 4.9 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara sebesar 85,34 sampai yang terendah, yaitu Jawa Barat sebesar 71,42. Lima kinerja tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Lima kinerja terendah adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta.

Grafik 4.9
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.34A, secara nasional kinerja KS SMK sebesar 71,41 termasuk kategori kurang, walaupun %KST sebesar 100, %KSL sebesar 96,57, %KSPen sebesar 81,55, namun %KSP sebesar 36,70 dan %KSPNS sebesar 42,20. Kinerja KS SMK terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 84,69 termasuk kategori pratama dan terkecil di Bali sebesar 64,76% termasuk kategori kurang. Secara nasional KS SMK termasuk kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 9 provinsi termasuk pratama, yaitu Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah, sedangkan 25 provinsi termasuk kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSP di 31 provinsi dan %KSPNS terjadi di 15 provinsi. Perbedaan antara nilai KS SMK tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 19,93 yang besar karena mendekati 20%.

Tabel 4.34A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	98.29	60.41	100.00	17.24	79.35	71.06	KURANG
2	Jawa Barat	96.70	37.61	100.00	24.93	82.54	68.36	KURANG
3	Banten	97.59	38.59	100.00	23.95	84.57	68.94	KURANG
4	Jawa Tengah	96.33	30.58	100.00	37.07	78.61	68.52	KURANG
5	DI Yogyakarta	95.87	47.71	100.00	55.05	62.84	72.29	KURANG
6	Jawa Timur	97.79	29.52	100.00	30.96	80.65	67.78	KURANG
7	Aceh	96.83	38.10	100.00	85.71	84.13	80.95	PRATAMA
8	Sumatera Utara	95.35	41.99	100.00	39.07	84.74	72.23	KURANG
9	Sumatera Barat	99.50	43.22	100.00	79.90	79.40	80.40	PRATAMA
10	Riau	97.71	43.51	100.00	56.87	91.22	77.86	KURANG
11	Kepulauan Riau	94.32	75.00	100.00	40.91	82.95	78.64	KURANG
12	Jambi	96.13	29.68	100.00	71.61	89.03	77.29	KURANG
13	Sumatera Selatan	96.97	43.94	100.00	48.48	83.33	74.55	KURANG
14	Bangka Belitung	90.74	22.22	100.00	68.52	88.89	74.07	KURANG
15	Bengkulu	97.65	40.00	100.00	74.12	82.35	78.82	KURANG
16	Lampung	95.61	35.61	100.00	33.66	87.32	70.44	KURANG
17	Kalimantan Barat	97.78	37.78	100.00	57.78	91.11	76.89	KURANG
18	Kalimantan Tengah	97.66	48.44	100.00	87.50	89.84	84.69	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	98.31	37.29	100.00	66.95	79.66	76.44	KURANG
20	Kalimantan Timur	98.07	28.02	100.00	48.31	78.74	70.63	KURANG
21	Kalimantan Utara	96.00	24.00	100.00	64.00	100.00	76.80	KURANG
22	Sulawesi Utara	95.93	65.12	100.00	75.58	75.00	82.33	PRATAMA
23	Gorontalo	100.00	35.29	100.00	98.04	80.39	82.75	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	96.41	50.30	100.00	84.43	82.04	82.63	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	95.89	29.95	100.00	64.98	69.81	72.13	KURANG
26	Sulawesi Barat	94.64	35.71	100.00	70.54	83.04	76.79	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	95.65	21.74	100.00	75.36	89.13	76.38	KURANG
28	Maluku	91.26	34.95	100.00	85.44	73.79	77.09	KURANG
29	Maluku Utara	100.00	24.30	100.00	97.20	92.52	82.80	PRATAMA
30	Bali	94.64	16.67	100.00	48.21	64.29	64.76	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	95.40	15.33	100.00	43.68	89.66	68.81	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	88.98	31.84	100.00	67.35	73.47	72.33	KURANG
33	Papua	93.04	41.74	100.00	88.70	94.78	83.65	PRATAMA
34	Papua Barat	100.00	45.45	100.00	86.36	86.36	83.64	PRATAMA
	Indonesia	96.57	36.70	100.00	42.20	81.55	71.41	KURANG

Berdasarkan Tabel 4.34B, secara nasional kinerja guru SMK sebesar 77,12 termasuk kategori kurang karena %GPNS sebesar 35,89 walaupun %GL sebesar 92,23, %GP sebesar 93,90, %GPen sebesar 94,51 dan %GT sebesar 69,08. Kinerja guru SMK terbesar di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 85,67 termasuk kategori madya dan terkecil di Jawa Barat sebesar 71,61 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk kurang maka 1 provinsi, yaitu Kalimantan Utara termasuk madya, 12 provinsi termasuk pratama, dan 21 provinsi termasuk kurang. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 60 akibat rendahnya %GPNS di 30 provinsi. Perbedaan antara nilai guru SMK tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru SMK antarprovinsi sebesar 14,06 yang cukup besar karena lebih dari 10%.

Tabel 4.34B
Kinerja Guru Tiap Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	94.57	99.26	66.45	20.05	89.07	73.88	KURANG
2	Jawa Barat	89.67	84.70	67.70	20.93	95.04	71.61	KURANG
3	Banten	92.17	87.15	68.54	20.69	96.15	72.94	KURANG
4	Jawa Tengah	93.56	85.27	71.43	32.32	93.91	75.30	KURANG
5	DI Yogyakarta	93.71	97.58	73.93	49.08	88.41	80.54	PRATAMA
6	Jawa Timur	94.30	90.26	76.49	34.70	94.54	78.06	KURANG
7	Aceh	90.52	88.74	62.49	55.55	96.10	78.68	KURANG
8	Sumatera Utara	91.22	94.85	75.62	35.02	95.24	78.39	KURANG
9	Sumatera Barat	95.18	84.00	70.64	58.92	93.01	80.35	PRATAMA
10	Riau	92.09	88.93	55.09	32.27	97.19	73.11	KURANG
11	Kepulauan Riau	90.12	97.04	65.76	30.54	97.08	76.11	KURANG
12	Jambi	93.68	98.96	59.92	45.59	97.04	79.04	KURANG
13	Sumatera Selatan	91.52	91.98	51.06	36.29	94.53	73.08	KURANG
14	Bangka Belitung	89.86	90.46	64.46	56.87	96.77	79.68	KURANG
15	Bengkulu	93.31	93.52	67.64	56.16	95.96	81.32	PRATAMA
16	Lampung	88.56	95.20	71.15	29.48	95.74	76.03	KURANG
17	Kalimantan Barat	89.46	88.83	62.67	46.55	96.57	76.81	KURANG
18	Kalimantan Tengah	94.51	90.04	73.50	64.75	96.57	83.87	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	93.89	93.98	65.36	52.81	94.11	80.03	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	91.08	95.72	61.77	35.71	96.67	76.19	KURANG
21	Kalimantan Utara	94.70	90.03	76.79	67.91	98.91	85.67	MADYA
22	Sulawesi Utara	93.39	90.29	72.73	59.77	91.56	81.55	PRATAMA
23	Gorontalo	91.88	83.67	70.46	67.43	95.37	81.76	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	91.54	96.92	67.49	54.07	96.54	81.31	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	93.63	99.35	70.45	50.74	92.09	81.25	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	90.48	92.57	57.55	41.29	97.33	75.84	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	92.39	97.89	69.26	54.44	97.77	82.35	PRATAMA
28	Maluku	88.14	89.88	65.96	58.86	93.80	79.32	KURANG
29	Maluku Utara	89.12	92.13	56.81	49.08	98.15	77.06	KURANG
30	Bali	91.93	84.70	59.34	40.97	89.41	73.27	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	92.78	77.88	64.96	35.60	97.47	73.74	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	88.75	85.65	60.91	43.86	95.57	74.95	KURANG
33	Papua	91.55	96.84	67.19	61.51	98.17	83.05	PRATAMA
34	Papua Barat	92.59	90.70	66.60	59.80	97.26	81.39	PRATAMA
	Indonesia	92.23	93.90	69.08	35.89	94.51	77.12	KURANG

6. Dikdasmen

Berdasarkan Tabel 4.35, secara nasional kinerja KS dan guru dikdasmen sebesar 77,69 termasuk kategori kurang akibat %KSGPNS sebesar 57,29 dan %KSGT sebesar 70,33 dalam kondisi kurang, walaupun %KSGL sebesar 84,82, %KSGP sebesar 86,51, dan %KSGPen sebesar 89,49. Kinerja KS dan guru SMK terbesar di Provinsi Bali sebesar 82,35 termasuk kategori pratama dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 73,49 termasuk kategori kurang. Secara nasional kinerja SDM dikdasmen termasuk kategori kurang, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 8 provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bali termasuk pratama. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang 60 akibat rendahnya nilai %KSGPNS terjadi di 19 provinsi. Perbedaan antara nilai KS dan guru SMK tertinggi dan

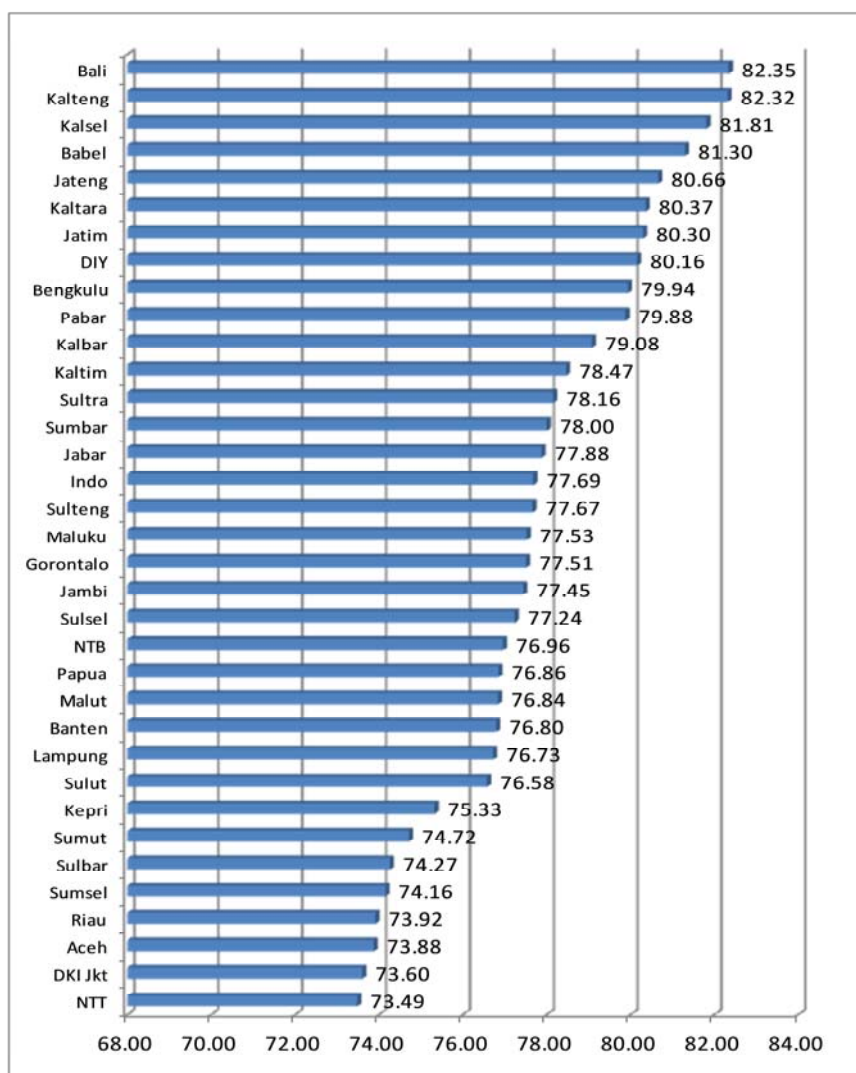
terendah menunjukkan disparitas KS dan guru dikdasmen antarprovinsi sebesar 8,86 yang cukup besar walau kurang dari 10%.

Tabel 4.35
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSGL	%KSGP	%KSGT	%KSGPNS	%KSGPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	87.99	81.87	73.27	40.27	84.63	73.60	KURANG
2	Jawa Barat	89.77	89.84	69.33	50.53	89.96	77.88	KURANG
3	Banten	87.31	88.43	68.85	46.41	93.01	76.80	KURANG
4	Jawa Tengah	91.12	92.03	73.30	59.95	86.92	80.66	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	89.33	88.08	78.49	61.40	83.51	80.16	PRATAMA
6	Jawa Timur	91.11	93.14	74.49	55.87	86.90	80.30	PRATAMA
7	Aceh	80.40	76.42	62.65	59.62	90.32	73.88	KURANG
8	Sumatera Utara	78.67	76.82	74.12	55.75	88.24	74.72	KURANG
9	Sumatera Barat	88.51	72.43	73.34	67.72	88.02	78.00	KURANG
10	Riau	83.77	77.90	63.19	51.47	93.28	73.92	KURANG
11	Kepulauan Riau	85.58	81.41	67.09	47.42	95.15	75.33	KURANG
12	Jambi	79.70	84.77	69.02	63.62	90.13	77.45	KURANG
13	Sumatera Selatan	81.30	78.87	62.88	56.33	91.40	74.16	KURANG
14	Bangka Belitung	81.23	84.09	77.31	72.24	91.65	81.30	PRATAMA
15	Bengkulu	84.16	86.58	71.32	66.80	90.83	79.94	KURANG
16	Lampung	80.19	83.42	71.85	58.69	89.49	76.73	KURANG
17	Kalimantan Barat	75.00	96.51	70.04	63.63	90.22	79.08	KURANG
18	Kalimantan Tengah	81.61	87.17	77.84	71.52	93.45	82.32	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	86.65	88.30	74.67	70.03	89.41	81.81	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	83.99	86.59	70.32	57.99	93.45	78.47	KURANG
21	Kalimantan Utara	75.81	96.64	69.71	65.06	94.62	80.37	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	75.76	73.80	78.74	68.52	86.09	76.58	KURANG
23	Gorontalo	85.96	74.57	68.78	67.74	90.52	77.51	KURANG
24	Sulawesi Tengah	73.29	86.09	69.70	66.65	92.60	77.67	KURANG
25	Sulawesi Selatan	87.31	80.33	67.08	60.97	90.52	77.24	KURANG
26	Sulawesi Barat	72.86	89.52	59.03	56.00	93.94	74.27	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	81.83	87.62	65.50	62.22	93.61	78.16	KURANG
28	Maluku	66.76	81.02	76.60	72.98	90.27	77.53	KURANG
29	Maluku Utara	64.27	88.25	70.22	66.44	95.04	76.84	KURANG
30	Bali	90.17	98.24	72.89	64.70	85.73	82.35	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	84.35	99.99	59.35	49.76	91.33	76.96	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	70.64	92.62	59.39	52.34	92.44	73.49	KURANG
33	Papua	63.94	95.84	69.19	60.56	94.75	76.86	KURANG
34	Papua Barat	75.70	93.04	71.08	65.31	94.29	79.88	KURANG
	Indonesia	84.82	86.51	70.33	57.29	89.49	77.69	KURANG

Kinerja KS dan guru dikdasmen disajikan pada Grafik 4.10 dengan diurutkan dari yang tertinggi, yaitu Provinsi Bali sebesar 82,35 sampai yang terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 73,49. Lima kinerja terbesar adalah Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Lima kinerja terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan.

Grafik 4.10
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016



Berdasarkan Tabel 4.35A, secara nasional kinerja KS dikdasmen sebesar 85,43 termasuk kategori madya, karena %KST sebesar 100, %KSL sebesar 89,74, %KSP sebesar 71,88, % KSPen sebesar 81,44. Kinerja KS dikdasmen terbesar di Provinsi Gorontalo sebesar 95,18 termasuk kategori paripurna dan terkecil di Papua sebesar 76,86% termasuk kategori kurang. Secara nasional KS dikdasmen termasuk madya, namun bila dilihat setiap provinsi, terdapat 1 provinsi termasuk paripurna, yaitu Gorontalo, 3 provinsi termasuk utama, yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, 15 provinsi termasuk madya, 12 provinsi termasuk pratama, dan 3 provinsi termasuk kurang, Perbedaan antara nilai KS dikdasmen tertinggi dan

terendah menunjukkan disparitas KS antarprovinsi sebesar 18,33 yang besar karena mendekati 20%.

Tabel 4.35A
Kinerja Kepala Sekolah Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%KSL	%KSP	%KST	%KSPNS	%KSPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	92.83	99.79	100.00	52.74	81.60	85.39	MADYA
2	Jawa Barat	96.14	73.23	100.00	77.38	79.13	85.17	MADYA
3	Banten	93.53	71.71	100.00	71.91	79.63	83.36	PRATAMA
4	Jawa Tengah	96.33	70.89	100.00	86.70	79.02	86.59	MADYA
5	DI Yogyakarta	94.46	83.83	100.00	81.00	77.63	87.39	MADYA
6	Jawa Timur	96.30	65.06	100.00	78.16	75.66	83.04	PRATAMA
7	Aceh	88.02	70.40	100.00	94.83	82.36	87.12	MADYA
8	Sumatera Utara	81.37	96.34	100.00	76.85	79.60	86.83	MADYA
9	Sumatera Barat	93.19	99.37	100.00	93.27	85.68	94.30	UTAMA
10	Riau	88.73	65.97	100.00	84.25	87.78	85.35	MADYA
11	Kepulauan Riau	89.68	83.29	100.00	74.30	89.54	87.36	MADYA
12	Jambi	84.94	64.79	100.00	92.32	85.52	85.51	MADYA
13	Sumatera Selatan	89.52	91.24	100.00	85.98	89.64	91.28	UTAMA
14	Bangka Belitung	88.09	83.56	100.00	90.13	88.71	90.10	UTAMA
15	Bengkulu	90.23	59.22	100.00	93.49	86.82	85.95	MADYA
16	Lampung	89.96	83.25	100.00	81.71	84.81	87.95	MADYA
17	Kalimantan Barat	82.39	44.37	100.00	89.61	86.43	80.56	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	89.42	62.48	100.00	92.18	92.29	87.27	MADYA
19	Kalimantan Selatan	93.12	54.70	100.00	93.94	81.18	84.59	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	88.95	56.54	100.00	82.40	88.74	83.33	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	80.81	48.84	100.00	90.99	85.03	81.13	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	83.60	80.73	100.00	89.46	80.30	86.82	MADYA
23	Gorontalo	91.33	98.62	100.00	98.75	87.22	95.18	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	78.89	62.51	100.00	95.57	84.11	84.22	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	93.95	80.79	100.00	91.63	82.81	89.84	MADYA
26	Sulawesi Barat	87.30	56.40	100.00	95.08	87.74	85.31	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	84.86	50.46	100.00	94.65	85.23	83.04	PRATAMA
28	Maluku	71.35	74.93	100.00	94.87	80.54	84.34	PRATAMA
29	Maluku Utara	67.94	61.13	100.00	93.39	88.17	82.13	PRATAMA
30	Bali	96.00	58.00	100.00	89.26	74.43	83.54	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	92.61	37.94	100.00	86.16	76.71	78.68	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	63.42	54.45	100.00	93.72	80.66	78.45	KURANG
33	Papua	60.59	40.66	100.00	92.00	91.04	76.86	KURANG
34	Papua Barat	73.49	56.02	100.00	94.51	89.17	82.64	PRATAMA
	Indonesia	89.74	71.88	100.00	84.08	81.44	85.43	MADYA

Berdasarkan Tabel 4.35B, secara nasional kinerja guru dikdasmen sebesar 76,43 termasuk kategori kurang karena %GPNS sebesar 55,31 walaupun %GL sebesar 84,46, %GP sebesar 84,15, %GPen sebesar 90,08 dan %GT sebesar 68,13. Kinerja guru dikdasmen terbesar di Provinsi Bali sebesar 81,20 termasuk kategori pratama dan terkecil di Nusa Tenggara Timur sebesar 71,84 termasuk kategori kurang. Oleh karena secara nasional termasuk kurang maka 30 provinsi termasuk kurang dan 4 provinsi termasuk pratama, yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bali. Provinsi yang termasuk kategori kurang dengan nilai kurang dari 60 akibat rendahnya %GPNS di 16 provinsi. Perbedaan antara nilai guru dikdasmen

tertinggi dan terendah menunjukkan disparitas guru dikdasmen antarprovinsi sebesar 9,37 yang cukup besar walau kurang dari 10%.

Tabel 4.35B
Kinerja Guru Tiap Provinsi
Dikdasmen, Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Konversi					Kinerja	
		%GL	%GP	%GT	%GPNS	%GPen	Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	87.69	80.98	71.64	39.51	84.81	72.93	KURANG
2	Jawa Barat	89.29	87.60	67.03	48.52	90.77	76.64	KURANG
3	Banten	86.86	86.18	66.62	44.59	93.96	75.64	KURANG
4	Jawa Tengah	90.73	89.70	71.31	57.95	87.50	79.44	KURANG
5	DI Yogyakarta	89.00	86.61	77.10	60.14	83.89	79.35	KURANG
6	Jawa Timur	90.73	90.50	72.60	54.22	87.73	79.15	KURANG
7	Aceh	79.96	74.45	60.50	57.60	90.78	72.66	KURANG
8	Sumatera Utara	78.47	75.37	72.21	54.19	88.88	73.82	KURANG
9	Sumatera Barat	88.20	71.08	71.53	65.99	88.18	77.00	KURANG
10	Riau	83.45	75.57	60.86	49.39	93.63	72.58	KURANG
11	Kepulauan Riau	85.30	79.71	64.91	45.64	95.52	74.22	KURANG
12	Jambi	79.32	82.02	66.72	61.49	90.47	76.00	KURANG
13	Sumatera Selatan	80.76	77.44	60.44	54.38	91.52	72.91	KURANG
14	Bangka Belitung	80.71	82.23	75.58	70.87	91.87	80.25	PRATAMA
15	Bengkulu	83.74	83.71	69.31	64.93	91.12	78.56	KURANG
16	Lampung	79.48	81.64	69.83	57.04	89.83	75.56	KURANG
17	Kalimantan Barat	74.29	91.44	67.13	61.10	90.59	76.91	KURANG
18	Kalimantan Tengah	80.87	83.58	75.75	69.58	93.56	80.67	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	86.14	84.80	72.65	68.12	90.07	80.36	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	83.66	83.75	68.35	56.37	93.76	77.18	KURANG
21	Kalimantan Utara	75.45	93.11	67.54	63.20	95.30	78.92	KURANG
22	Sulawesi Utara	75.02	73.21	76.73	66.54	86.64	75.63	KURANG
23	Gorontalo	85.49	73.02	66.06	65.04	90.81	76.08	KURANG
24	Sulawesi Tengah	72.79	82.67	66.99	64.06	93.36	75.97	KURANG
25	Sulawesi Selatan	86.83	78.35	64.70	58.76	91.08	75.95	KURANG
26	Sulawesi Barat	71.60	85.82	55.46	52.59	94.48	71.99	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	81.60	83.96	62.80	59.69	94.27	76.46	KURANG
28	Maluku	66.38	78.48	74.66	71.18	91.07	76.35	KURANG
29	Maluku Utara	63.89	84.30	67.18	63.70	95.73	74.96	KURANG
30	Bali	89.79	95.55	71.12	63.09	86.47	81.20	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	83.83	96.19	56.75	47.44	92.26	75.29	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	71.20	89.22	56.27	49.15	93.34	71.84	KURANG
33	Papua	64.31	98.13	65.81	57.11	95.15	76.10	KURANG
34	Papua Barat	75.93	88.59	68.04	62.24	94.83	77.93	KURANG
	Indonesia	84.46	84.15	68.13	55.31	90.08	76.43	KURANG

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan tentang tiga materi sesuai dengan tujuan, yaitu kebutuhan, kekurangan/kelebihan KS dan guru menurut satuan dikdasmen adalah SD, SLB, SMA, SMA, dan SMK, analisis indikator pendidikan KS dan guru berdasarkan 5 jenis indikator menurut satuan dikdasmen, dan kinerja SDM berdasarkan 5 jenis indikator menurut satuan dikdasmen.

Tabel 5.1
Kebutuhan, Yang Ada, Kekurangan/Kelebihan Kepala Sekolah dan Guru
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

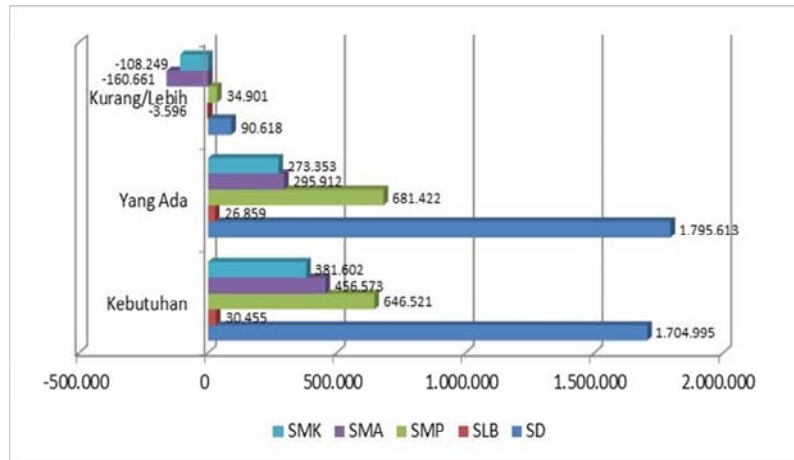
No.	Variabel	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Dikdasmen
1.	Kebutuhan	1.704.995	30.455	646.521	456.573	381.602	3.220.146
	a. Kepala Sekolah	147.536	1.962	37.023	12.689	12.659	211.869
	b. Guru	1.557.459	28.493	609.498	443.884	368.943	3.008.277
2.	Yang Ada	1.795.613	26.859	681.422	295.912	273.353	3.073.159
	a. Kepala Sekolah	147.536	1.962	37.023	12.689	12.659	211.869
	b. Guru	1.648.077	24.897	644.399	283.223	260.694	2.861.290
3.	Kekurangan/Kelebihan	90.618	-3.596	34.901	-160.661	-108.249	-146.987
	a. Kepala Sekolah	0	0	0	0	0	0
	b. Guru	90.618	-3.596	34.901	-160.661	-108.249	-146.987
4.	Rasio Siswa per Guru						
	a. Kebutuhan	15,18	3,75	15,53	9,45	11,36	13,88
	b. Yang Ada	14,42	4,25	14,73	14,57	15,86	14,54
	Artinya	KELEBIHAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN	KEKURANGAN	KEKURANGAN	KEKURANGAN

Catatan: Nilai 0 berarti sudah sesuai, nilai – (minus) berarti kekurangan, nilai + berarti kelebihan.

Berdasarkan Tabel 5.1, secara nasional kebutuhan dikdasmen sebesar 3.220.146 KS dan guru dengan rincian KS sebesar 211.869 dan guru 3.008.277. Bila dilihat KS dan guru yang ada maka KS semua satuan pendidikan sudah sesuai, sedangkan guru dikdasmen masih kekurangan sebesar 146.987 orang. Kekurangan guru terjadi di semua satuan pendidikan kecuali SD dan SMP dengan rincian kekurangan guru terbesar terjadi pada guru SMA sebesar 160.661 orang dan terkecil pada SLB sebesar 3.596 orang, sedangkan guru SD dan SMP masing-masing kelebihan guru sebesar 90.618 dan 34.901 orang.

Masih pada Tabel 5.1, dengan menggunakan rasio siswa per guru maka dapat diketahui kelebihan guru karena yang ada lebih kecil daripada kebutuhan dan kekurangan guru karena yang ada lebih besar daripada kebutuhan. Sesuai dengan perhitungan kebutuhan guru maka untuk SD dan SMP telah kelebihan guru, sedangkan SLB, SMA, dan SMK kekurangan guru, namun tidak diketahui kuantitasnya.

Grafik 5.1
Kebutuhan, Yang Ada, Kekurangan/Kelebihan SDM Dikdasmen
menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016



Tabel 5.2
Analisis Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016

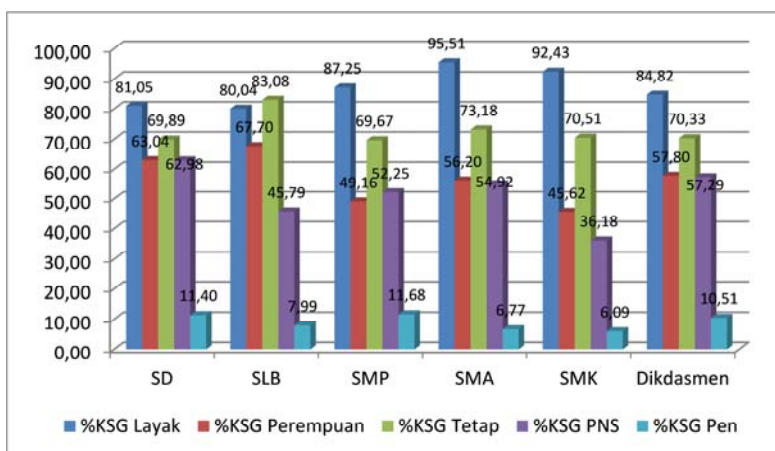
No.	Indikator SDM	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Dikdasmen
1	%KSG Layak	81,05	80,04	87,25	95,51	92,43	84,82
	%KS Layak	89,08	46,43	94,53	83,27	96,57	89,74
	%G Layak	80,33	82,69	86,83	96,05	92,23	84,46
2	%KSG Perempuan	63,04	67,70	49,16	56,20	45,62	57,80
	%KS Perempuan	39,86	38,43	22,53	46,66	18,35	35,94
	%G Perempuan	65,12	70,00	50,69	56,62	46,95	59,42
3	%KSG Tetap	69,89	83,08	69,67	73,18	70,51	70,33
	%KS Tetap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	%G Tetap	67,20	81,74	67,93	71,98	69,08	68,13
4	%KSG PNS	62,98	45,79	52,25	54,92	36,18	57,29
	%KS PNS	94,12	51,94	68,33	60,07	42,20	84,08
	%G PNS	60,19	45,31	51,33	54,69	35,89	55,31
5	%KSG Pensiun	11,40	7,99	11,68	6,77	6,09	10,51
	%KS Pensiun	22,89	5,40	6,37	5,82	18,45	18,56
	%G Pensiun	10,37	8,19	11,98	6,81	5,49	9,92

Catatan: KSG adalah kepala sekolah dan guru, KS adalah kepala sekolah, dan G adalah guru

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis indikator SDM. %KSG Layak dikdasmen sebesar 84,82% yang berarti masih terdapat 15,18% KSG tidak layak atau perlu penyetaraan. KSG yang terbaik pada SMA sebesar 95,51% dan terkecil pada SLB sebesar 80,04%. %KS Layak dikdasmen sebesar 89,74% dengan terbaik pada SMP sebesar 94,53% dan terkecil pada SLB sebesar 46,43%. %G Layak dikdasmen sebesar 84,46% dengan terbaik pada SMA sebesar 96,05%.

%KSG Perempuan dikdasmen sebesar 57,80% yang berarti tidak ada kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki menjadi KS dan guru, terbaik pada SLB sebesar 67,70% dan terkecil pada SMK sebesar 45,62%. %KS Perempuan sebesar 35,94% yang berarti belum ada kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki menjadi KS dengan terbaik pada SMA sebesar 46,66% dan terkecil pada SMK sebesar 18,35%. Hal yang sama untuk %G perempuan dikdasmen sebesar 59,42% dengan terbaik pada SLB sebesar 70,00% dan terkecil pada SMK sebesar 46,95%. Terlihat bahwa %KS perempuan di semua satuan pendidikan lebih kecil daripada %G perempuan, yang berarti KS lebih belum setara jika dibandingkan dengan guru.

Grafik 5.2
Analisis Kepala Sekolah dan Guru menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016



%KSG Tetap dikdasmen sebesar 70,33% yang berarti masih terdapat 29,67% KSG dengan status tidak tetap. %KSG Tetap dikdasmen terbesar pada SLB sebesar 83,08% dan terkecil pada SD sebesar 69,89%. %KS Tetap semua satuan pendidikan 100% karena menjadi KS harus status kepegawaianya tetap. %G Tetap dikdasmen sebesar 68,13% yang berarti tidak semua guru adalah guru tetap, terbaik pada SLB sebesar 81,74% dan terkecil pada SD sebesar 67,20%.

%KSG PNS dikdasmen sebesar 57,29% yang berarti KSG PNS hanya separuh lebih. %KSG terbesar pada SD sebesar 62,98% karena ketika pembangunan SD Inpres sejak tahun 1973/1974 banyak diangkat KS dan guru PNS dan terkecil pada SMK sebesar 36,18% karena SMK lebih banyak swasta daripada negeri. %KS PNS dikdasmen sebesar 57,29%, terbesar pada SD sebesar 94,12% dan terkecil pada SMK sebesar 42,20%. %G PNS dikdasmen sebesar 55,31% dengan terbesar pada SD sebesar 60,19% dan terkecil pada SMK sebesar 35,89%. %KS PNS di semua satuan pendidikan lebih kecil daripada %G PNS, yang berarti KS lebih banyak PNS jika dibandingkan dengan guru.

%KSG Pensiun dikdasmen sebesar 10,51%, terbesar pada SMP sebesar 11,68% dan terkecil pada SMK sebesar 6,09%. %KS pensiun dikdasmen sebesar 18,56%, terbesar pada SD sebesar 22,89% dan terkecil pada SLB sebesar 5,40%. %G pensiun

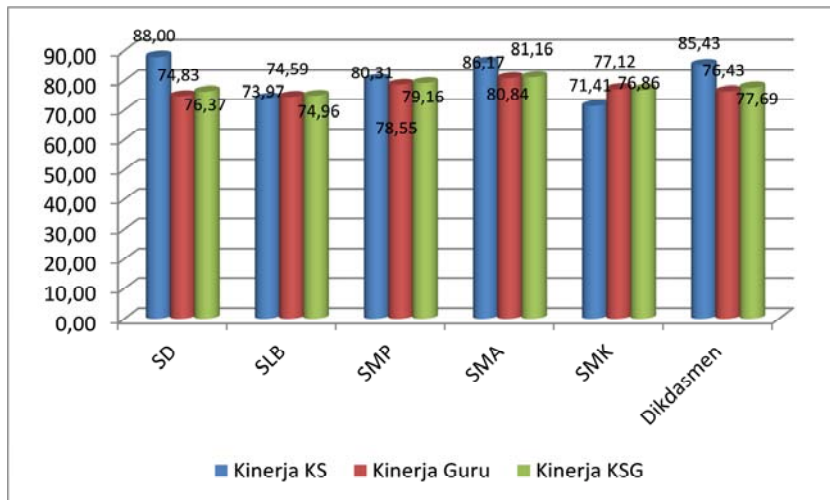
dikdasmen sebesar 9,92% dengan terbesar pada SMP sebesar 11,98% dan terkecil pada SMK sebesar 5,49%. Dengan demikian, KS yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan guru

Tabel 5.3
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015/2016

No.	Indikator SDM	SD	SLB	SMP	SMA	SMK	Dikdasmen
1	%KSG Layak	81,05	80,04	87,25	95,51	92,43	84,82
	%KS Layak	89,08	46,43	94,53	83,27	96,57	89,74
	%G Layak	80,33	82,69	86,83	96,05	92,23	84,46
2	%KSG Perempuan	79,31	73,86	98,32	88,98	91,25	86,51
	%KS Perempuan	79,71	76,86	45,06	93,32	36,70	71,88
	%G Perempuan	76,78	71,42	98,64	88,30	93,90	84,15
3	%KSG Tetap	69,89	83,08	69,67	73,18	70,51	70,33
	%KS Tetap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	%G Tetap	67,20	81,74	67,93	71,98	69,08	68,13
4	%KSG PNS	62,98	45,79	52,25	54,92	36,18	57,29
	%KS PNS	94,12	51,94	68,33	60,07	42,20	84,08
	%G PNS	60,19	45,31	51,33	54,69	35,89	55,31
5	%KSG Pensiun	88,60	92,01	88,32	93,23	93,91	89,49
	%KS Pensiun	77,11	94,60	93,63	94,18	81,55	81,44
	%G Pensiun	89,63	91,81	88,02	93,19	94,51	90,08
6	Kinerja KSG	76,37	74,96	79,16	81,16	76,86	77,69
	Kinerja KS	88,00	73,97	80,31	86,17	71,41	85,43
	Kinerja Guru	74,83	74,59	78,55	80,84	77,12	76,43
	Jenis Kinerja KSG	KURANG	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	KURANG
	Jenis Kinerja KS	MADYA	KURANG	PRATAMA	MADYA	KURANG	MADYA
	Jenis Kinerja Guru	KURANG	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	KURANG

Berdasarkan Tabel 5.3 maka kinerja KSG dikdasmen yang dihitung dari 5 jenis indikator SDM sebesar 77,69 termasuk kategori kurang. Namun, kinerja KS dikdasmen sebesar 85,43 termasuk madya adalah lebih besar daripada kinerja guru dikdasmen sebesar 76,43 termasuk kurang. Bila dirinci menurut satuan pendidikan maka kinerja KSG SD, SLB, SMP, dan SMK masing-masing sebesar 76,37, 74,96, 79,16, dan 76,86 termasuk kategori kurang, sedangkan kinerja KSG SMA sebesar 81,16 termasuk kategori pratama. Bila dilihat kinerja KS maka hanya SLB dan SMK masing-masing sebesar 73,97 dan 71,41 termasuk kategori kurang, SMP sebesar 80,31 termasuk pratama, sedangkan SD dan SMA masing-masing sebesar 88,00 dan 86,17 termasuk madya. Selanjutnya, kinerja guru SD SLB, SMP, dan SMK masing-masing sebesar 74,83, 74,59, 78,55, dan 77,12 termasuk kategori kurang, sedangkan kinerja guru SMA sebesar 80,84 termasuk kategori pratama.

Grafik 5.3
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Dikdasmen
menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016



B. Saran

Seperti halnya dalam simpulan maka saran juga dirinci menjadi tiga materi, yaitu kebutuhan, kekurangan/kelebihan KSG, analisis SDM KSG, dan kinerja SDM KSG. Dalam rangka meningkatkan mutu SDM maka kekurangan guru di SLB, SMA, dan SMK hendaknya dipenuhi dengan memberikan formasi untuk guru SLB, SMA, dan SMK sehingga dapat meningkatkan mutu SLB, SMA, dan SMK karena guru yang ada sudah sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya, kelebihan guru di SD dan SMP secara nasional hendaknya dirinci tiap provinsi dan dirinci menurut mata pelajaran apa yang kelebihan dan yang kekurangan. Bila kekurangan guru di SLB dapat diambil dari kelebihan guru SD maka tidak perlu menentukan formasi baru. Demikian juga bila di SMA dan SMK bisa diambil dari kelebihan guru dari mata pelajaran yang serumpun maka tidak perlu menentukan formasi baru.

Dalam analisis SDM KSG maka %KS di semua jenjang hendaknya diusahakan semuanya layak atau berijazah S1 atau D4 dan lebih tinggi dengan cara melakukan penyetaraan atau mengganti dengan guru yang layak terutama untuk guru SD dan SLB yang kelayakan mengajarnya paling rendah. Khusus untuk %KSG perempuan perlu diberikan kuota bagi perempuan menjadi KS agar KS perempuan meningkat, sehingga terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ketika menjadi KS. %G Tetap supaya ditingkatkan karena akan lebih meningkatkan mutu pendidikan karena guru hanya mengajar di satu tempat, sehingga bisa lebih konsentrasi dalam mengajar. Dengan adanya setiap tahun KS dan guru yang pensiun maka harus sudah direncanakan setahun sebelumnya untuk mengganti KS dan guru yang pensiun dengan merencanakan formasi baru.

Kinerja kepala sekolah dan guru dikdasmen termasuk kategori kurang karena dari 5 indikator SDM yang digunakan terdapat KSG Tetap dan KSG PNS sangat

kurang karena nilainya masing-masing sebesar 70,33 dan 57,29. Agar meningkatkan kinerja KSG maka KSG Tetap harus ditingkatkan melalui pengangkatan KSG agar berstatus tetap atau meningkatkan kepegawaiannya. Selain itu, kinerja KSG akan meningkat bila KSG dapat diangkat menjadi PNS, sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Bila saran untuk kedua jenis indikator tersebut dapat dipenuhi maka kinerja KSG pasti akan meningkat. Bila dilihat setiap satuan pendidikan maka kinerja KSG SD pada %KSG Perempuan perlu ditingkatkan dengan memberikan kuota bagi perempuan, demikian juga %KSG Tetap dengan menambah status kepegawaian menjadi tetap dan %KSG PNS dengan menambah formasi KSG PNS. Kinerja KSG SLB pada %KSG Perempuan perlu ditingkatkan dengan memberikan kuota bagi perempuan, demikian juga %KSG PNS dengan menambah formasi KSG PNS. Kinerja KSG SMP, SMA, dan SMK pada %KSG Tetap dengan menambah status kepegawaian menjadi tetap dan %KSG PNS dengan menambah formasi KSG PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/analisis>, diakses tgl 20 Agustus 2016.
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/kinerja>, diakses tgl 20 Agustus 2016.
- [http://kamus.bahasaindonesia.org/sumber daya manusia](http://kamus.bahasaindonesia.org/sumber%20daya%20manusia), diakses tgl 20 Agustus 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/kinerja>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_dasar, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_menengah, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia, diakses pada tanggal 21 Juli 2016.
- <http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.
- Kintamani, Ida. 2007. *Analisis Data Pendidikan*. disajikan sebagai bahan pelatihan regional. Pusat Statistik Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI*. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67, Tahun 2013. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014a. *Kurikulum 2013 SMP/MTs*. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58, Tahun 2014. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014b. *Kurikulum 2013 SMA/MA*. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59, Tahun 2014. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014c. *Kurikulum 2013 SMK/MAK*. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60, Tahun 2014. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2015. *Analisis SDM Pendidikan Dasar dan Menengah 2013/2014*. Jakarta.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016a. *Statistik Persekolahan Sekolah Dasar 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016b. *Statistik Persekolahan Sekolah Luar Biasa 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016c. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016d. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2016e. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.